



SAGA KONSERVASI

NARASI PELESTARIAN DI PESISIR BARAT ACEH

SAGA KONSERVASI
NARASI PELESTARIAN DI PESISIR BARAT ACEH

PERPUSTAKAN NASIONAL RI
KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

SAGA KONSERVASI
NARASI PELESTARIAN DI PESISIR BARAT ACEH

Penulis
Agus Prijono

Editor
Ali Sofiawan

Desainer
Aries "Bachil" Bachtiar

Terbit 2016
ISBN 978-979-3598-44-4

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan oleh:



Jl. Bangka VIII No.3B Pela Mampang
Jakarta 12720 - INDONESIA
Tel: +(62-21) 7183185; 7183187
www.kehati.or.id



Tropical Forest Conservation Action Sumatera (TFCA-Sumatera) adalah program bilateral pengalihan utang untuk lingkungan (Debt for Nature-Swap) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Program ini menyediakan hibah untuk lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi setempat dalam mengelola hutan tropis Sumatera secara lestari. Administrator : Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)



Yayasan Leuser Internasional (YLI) didirikan pada 1994 untuk melestarikan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Bersama TFCA-Sumatera, YLI melakukan pengamanan koridor Aceh Singkil-Subulussalam dan penataan batas Suaka Margasatwa Rawa Singkil.

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
MENATA TAPAL 233 KILOMETER	2
Berbilang tahun, Suaka Margasatwa Rawa Singkil tanpa tanda batas kawasan. Eksistensinya kabur. Penataan batas oleh masyarakat madani merangkak pelan di lingkar sempadan.	
PENGAYOM NEK RAUYEUK	44
Manusia dan gajah bersekutu melerai konflik yang tiada henti. Solusi adil untuk melindungi gajah, menyelamatkan manusia.	
MENGURAI BAHARA SEJARAH	84
Selama 15 tahun lebih, jatidiri Suaka Margasatwa Rawa Singkil antara ada dan tiada. Masih adakah asa bagi pengelolaan kawasan loh jinawi ini?	
MEMUPUK PENEBAR DAMAI	126
Duet serasi yang pantas tetap berkiprah di wilayah rawan konflik gajah-manusia. Bagaimana keberlanjutan CRU Trumon dan pengelolaan Koridor Satwa?	
TERAJU KONSERVASI	158
Upaya pelestarian berada di antara benturan kepentingan manusia dengan kehidupan alam liar. Ikhtiar tiada henti untuk menjaga keseimbangan antara konservasi dengan ekonomi.	
PUSTAKA	175

PENGANTAR

Pada 1990-an para pakar konservasi memandang Rawa Singkil sebagai ekosistem rawa terakhir yang relatif utuh di pantai barat Sumatera. Upaya konservasi dilakukan dengan menetapkan Rawa Singkil sebagai suaka margasatwa pada 1998. Setelah penetapan tersebut, kawasan suaka belum pernah ditata batas secara tuntas. Penataan batas itu untuk mewujudkan kepastian hukum kawasan Rawa Singkil, agar pengelolaannya efektif.

Secara regional, Aceh juga memiliki ekosistem gambut Rawa Tripa. Sayangnya, Rawa Tripa telah menjadi areal penggunaan lain. Perlindungan bagi Rawa Tripa hanya mencakup sebagian kecil ekosistem rawanya. Dengan demikian, harapan terakhir bagi konservasi ekosistem rawa secara utuh ada di Rawa Singkil. Begitu juga dari aspek manajemen, Rawa Singkil lebih mudah dikelola dan dilestarikan.

Dari perspektif itu, terlihat bahwa penataan batas akan memberikan jaminan legitimasi bagi pengelola dalam menjalankan program-program di Rawa Singkil. Dengan kata lain, tata batas sebenarnya juga menunjukkan adanya tata kelola yang baik.

Yayasan Leuser Indonesia berinisiatif untuk menata batas suaka, setelah mengkaji banyaknya kepentingan di kawasan ini. Tantangan terbesarnya adalah pembalakan liar dan perambahan kawasan. Tata batas sebenarnya ranah pemerintah. Namun YLI mengambil peran dengan memfasilitasi penataan batas, bersama Badan Pemanfaatan Kawasan Hutan Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, pemerintah daerah Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulussalam.

Tujuan akhir program ini, tentu saja demi pengelolaan Rawa Singkil yang efektif dan tepat sasaran. Pihak-pihak terkait di sekitar kawasan juga akan memahami bahwa Rawa Singkil berstatus kawasan konservasi. Legitimasi setempat ini akan mempermudah pengelola mengajak parapihak turut serta mendukung pengelolaan Rawa Singkil.

Yayasan Leuser Internasional juga melakukan mitigasi konflik gajah-manusia dengan mendirikan Conservation Response Unit Trumon. Konflik antara manusia dengan satwa liar adalah fenomena umum di Sumatera. Dan tim CRU Trumon berada di garis depan dalam menyelesaikan dan mencegah konflik. Sebelum gajah jinak

bersama mahoutnya hadir di Koridor Satwa Trumon, Aceh Selatan dan Subulussalam sering dilanda konflik gajah dengan manusia.

Tropical Forest Conservation Action Sumatera menyokong aktivitas YLI sebagai wujud aksi konservasi di Sumatera. Pustaka ini memaparkan upaya, tantangan dan dinamika yang dihadapi YLI dalam menata batas Rawa Singkil dan mitigasi konflik gajah-manusia.

Dari paparan dua program konservasi itu, TFCA berharap ada langkah maju dari kegiatan yang telah dirintis YLI. Penataan batas diharapkan membuka momentum bagi pengelolaan yang lebih baik bagi Rawa Singkil di masa datang. Tujuan ke depan adalah menjadikan Rawa Singkil sebagai model kesatuan pengelolaan hutan konservasi. Sementara dalam hal mitigasi konflik, TFCA lebih menekankan keberlanjutan CRU Trumon.

Keberlanjutan CRU Trumon sangat penting karena konflik terjadi tanpa mengenal waktu. Permukiman dan perkebunan sawit telah memecah belah daerah jelajah gajah. Dampaknya, gajah yang sebenarnya melewati daerah jelajahnya akan terperangkap di permukiman dan perkebunan. Semenjak CRU Trumon beraktivitas, konflik memang menurun. Tapi, sebagai upaya mitigasi, gajah jinak dan mahoutnya harus selalu siaga sepanjang waktu. Saat konflik terjadi, tim CRU akan segera bertindak.

Mitigasi konflik gajah versus manusia memerlukan usaha yang terus-menerus. Karena itu, TFCA memandang pentingnya melibatkan pihak-pihak lain dalam pendanaan CRU Trumon di masa datang.

Direktur Program TFCA-Sumatera

Ir. Samedi, Ph.D.

PRAKATA

Langkah demi langkah, tim tata batas Yayasan Leuser Indonesia-Tropical Forest Conservation Action Sumatera bergerak maju. Satu demi satu, pal batas ditanam di lingkar luar Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Tujuannya jelas: memasang pal batas hingga temu gelang.

Namun, setiap langkah maju sekaligus juga rem darurat. Kapan dan di mana saja, pal jatuh di titik yang telah didaku pihak lain, pecahlah sengketa. Rem darurat itu menyala, membuat tim terhenti. Kadang malah melangkah mundur. Suaka kadung terlalu lama ditinggalkan kosong, yang akhirnya digerogoti para pembalak dan perambah.

Pamor Rawa Singkil sebagai kerajaan margasatwa meredup. Tak ada yang meratapi—bahkan para pengelolanya. Tak ada yang peduli, hingga YLI dan TFCA Sumatera bergerak menata batas. Lantaran itu, YLI-TFCA Sumatera terjun langsung membentengi kawasan suaka. Ini baru tahap awal bagi pengelolaan yang pantas bagi suaka yang bergelimang tanah gambut itu.

Apa boleh buat, Rawa Singkil mesti kembali mundur nyaris ke masa-masa awal penunjukkannya. Tanpa kepastian hukum kawasan, pengelolaan tidak akan mendapatkan legitimasi dari pihak-pihak terkait. Kepastian hukum seolah sirna selama 15 tahun lebih. Tahap selanjutnya lebih menantang, yaitu tata kelola yang baik bagi Rawa Singkil.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Rawa Singkil sebagai kesatuan pengelolaan hutan konservasi. Kendati begitu, geliat KPHK belum terasa di Rawa Singkil. Sementara para pembalak dan perambah menggempur suaka dari hari ke hari, pengembangan KPHK masih mengendap di internal kementerian. Sementara itu, tepat di sudut utara suaka, di kawasan Koridor Satwa Trumon, Aceh Selatan, YLI-TFCA Sumatera mendirikan unit juru damai konflik gajah-manusia. Namanya Conservation Response Unit Trumon.

Sengketa gajah dengan manusia telah menahun di Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam. Selama bertahun-tahun, konflik dibiarkan berkecamuk. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Satwa dilindungi itu akhirnya dipandang sebagai musuh masyarakat.

Dari pesisir barat Aceh, muncul pertanyaan buat bangsa ini: benarkah konservasi di Indonesia anak kandung peradaban? Konservasi yang sepenuhnya maujud sebagai usaha sadar manusia Indonesia untuk menyisihkan alam liar bagi masa depan. Jawaban atas pertanyaan itu mudah-mudah susah. Mudah, lantaran tidak sulit untuk menuding keberadaan kawasan konservasi yang tersebar di seluruh negeri.

Sekadar membilang sebanyak jari-jemari, di Pulau Sumatera saja ada sebelas taman nasional : Gunung Leuser, Batang Gadis, Sembilang, Siberut, Tesso Nilo, Bukit Dua Belas, Bukit Tiga Puluh, Berbak, Bukit Barisan Selatan, Kerinci Seblat, dan Way Kambas. Ini belum menghitung lusinan suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam, serta kawasan penting bagi keanekaragaman hayati. Susah, lantaran nyaris semua kawasan konservasi dirundung perkara: pembalakan liar dan perambahan. Status kawasan konservasi tidak menjamin kekayaan hayati aman dari serangan zaman.

Bisa dibayangkan, wilayah penting bagi keanekaragaman hayati di Sumatera, yang tanpa status kawasan konservasi, tantangan jauh lebih berat. Kiprah sejawat YLI baru dua kisah pelestarian di 13 kawasan prioritas TFCA Sumatera. Dua kisah yang menyentil akal sehat ihwal masa depan hutan di daratan yang saban tahun dikerubuti asap kebakaran hutan dan lahan ini. Tentu saja, rangkaian kisah dalam buku ini belum tuntas benar di lapangan. Saat buku ini ditulis, tim tata batas masih berjibaku di lapangan.

Pembangunan KPHK Rawa Singkil juga masih digodok kementerian. Pun, tim CRU Trumon selalu siap siaga meredakan konflik gajah-manusia. Untuk menjaga perdamaian, YLI masih mengembangkan mekanisme pendanaan bagi operasi CRU. Pekerjaan rumah aksi pelestarian bertumpuk-tumpuk. Konservasi menuntut daya tahan jangka panjang. Proyeksinya melampui imajinasi hari ini: menyisihkan kebutuhan sesaat untuk kehidupan anak-cucu. Sayangnya proyeksi konservasi sulit ditularkan kepada kebanyakan orang.

Dengan demikian, upaya konservasi bagaikan saga atau kisah besar umat manusia mencegah kepunahan makhluk di muka Bumi. Narasi yang tak bakal berhenti.

Selamat membaca.

Mengenang sahabat kami,
Project Leader TFCA-Sumatera-YLI,
Abu Hanifah Lubis

Menata Tapal



PADA MULANYA

Penataan batas baru langkah awal dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pal beton yang berdiri di pinggir kawasan ini menjadi penanda jatidiri Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Pal sekaligus simbol pelaksanaan amanah pelestarian.

233 Kilometer

Berbilang tahun, Suaka Margasatwa Rawa Singkil tanpa tanda batas kawasan. Eksistensinya kabur. Penataan batas oleh masyarakat madani merangkak pelan di lingkar sempadan suaka.





PENUH RUMPANG

Tidak jauh dari batas kawasan, hutan suaka menganga lebar dan disesaki tumbuhan perintis. Para pembalak telah membabat pohon-pohon besar. Mereka hanya meninggalkan hutan tersisa yang merana.

41 desa di 3 kabupaten bersisian dengan suaka



A

ngkasa berpendar biru terang. Dari ujung ke ujung, cakrawala membentang luas. Dalam tatapan matahari khatulistiwa, Nizar Tarigan menembus hamparan sawit muda. Kakinya menjelajahi tanah gambut yang goyah.

Hari itu, di bawah sengatan matahari, Nizar sedang mencari patok yang menjadi batas antara Suaka Margasatwa Rawa Singkil dengan PT Agro Sinergi Nusantara di Krueng Luas, Trumon, Aceh Selatan, Aceh. Tak lama kemudian, dia menemukan sepucuk pal batas itu. Warnanya putih bersih, ujungnya merah menyala. Di kepala patok tertera SM T 463.

“SM itu suaka margasatwa; T: tugu; 463 adalah nomor pemasangan,” papar Koordinator Tata Batas Yayasan Leuser Internasional (YLI) ini. Dari patok ini 100 meter ke selatan berdiri pal 464.

Kedua patok itu baru segelintir dari ratusan pal yang membatasi suaka di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Pal berbaris memanjang, bermula dari T 423 di utara hingga T 575 di selatan. Itu baru satu garis tapal batas sepanjang 15,2 kilometer—dari total 233 kilometer batas suaka.

Di sisi barat pal, sejarak 300 meter, belantara suaka terlihat ringkih. Tajuk hutan tak lagi utuh. Kanal lebar berair hitam memisahkan lahan kebun dengan suaka. “Menurut perusahaan, kanal itulah batas perkebunan dengan suaka margasatwa,” tutur Nizar.

Warna pal yang cemerlang sebenarnya melambungkan harapan. Namun karena berada di kebun sawit, patok itu juga menyulut rasa bimbang. Penanda batas sejatinya untuk menegaskan keberadaan suaka dengan lahan di sekitarnya. Di lahan itu, keraguan justru mengambang di udara: Tanah itu masuk dalam kawasan suaka ataukah perkebunan sawit?

“Kami tidak tahu apakah peta penunjukan suaka margasatwa yang keliru atau perusahaan memang sengaja merambah,” jelas Nizar. Dia menuturkan, kawasan di sekitar patok dahulu masih berupa hutan sekunder. Sebelum dikelola oleh Agro Sinergi, kebun sawit ini dalam



Bayangan langit memantul di air rawa suaka margasatwa yang membentengi daratan pesisir barat Sumatera. Luapan air tahunan dari kawasan ini memasok sumber pakan bagi perairan dangkal Samudera Hindia. Alam berkembang sempurna di lahan basah Rawa Singkil, kawasan perawan yang belum banyak tersentuh manusia.

kelolaan PT Perkebunan Nusantara I. Areal ini telah dibuka pada 1993-1997, sebelum Rawa Singkil menjadi suaka. Sesuai peta kawasan tahun 2000, batas barat perkebunan memang bersentuhan dengan suaka.

Sementara itu, kanal telah dibuat sejak 1994 dan menjadi batas areal perkebunan. Kanal memanjang 2,5 kilometer di utara dan 2 km di selatan batas suaka. Faktanya, kawasan suaka di sisi utara masuk di areal perkebunan.

Selama 1994-1999, lahan lantas ditanami kelapa sawit. Konflik Aceh 1999-2005 membuat aktivitas perkebunan mandek. Pada 2008 perusahaan giat kembali: membangun jalan, membuka lahan, lalu menanam sawit.

Saat Yayasan Leuser Internasional bersama Tropical Forest Conservation Action Sumatera melakukan tata batas pada 2011, Nizar bersama timnya melakukan survei status kepemilikan lahan. Dia menelisik status lahan di lingkar luar suaka.

“Itu untuk merencanakan pemasangan batas suaka margasatwa,” imbuhnya. “Terdatalah: perusahaan ini waktu itu sedang membuat jalan perkebunan.”

Jalan tanah ini pula yang mengantarkan Nizar ke lokasi patok batas tersebut. Pada awal 2015, YLI bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan. (Sejak 2015 menjadi

Nun jauh di sana, lansekap suaka membayang redup bersentuhan dengan kaki langit. Di tepi jalan Subulussalam-Tapaktuan, Suaka Margasatwa Rawa Singkil terlihat landai.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.)

“Ada laporan tentang pembiaran pembukaan kawasan suaka. Yang diundang sebenarnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Kami hanya mendampingi, karena kebetulan YLI melakukan tata batas dan investigasi.” Dari situlah, perkebunan sawit diketahui telah merangsek ke kawasan suaka. Direktorat Jenderal lantas menyarankan untuk memeriksa di lapangan. Pada Maret 2015, Nizar bersama BKSDA turun ke lapangan.

“Kita coba memeriksa koordinatnya. Hasilnya, lahan yang ditanami sawit adalah kawasan suaka margasatwa. Setelah kita cek di lapangan batasnya bukan kanal, tapi patok batas. Itu clear. Ini sudah dilaporkan ke pemerintah pusat. Hanya saja saya belum tahu tindak lanjutnya.”

Nizar menyatakan BKSDA akan memanggil perusahaan sawit itu soal perambahan kawasan suaka. “Jadi belum ada tindakan apapun. Tapi Balai KSDA Aceh memandang perusahaan telah melakukan kegiatan illegal.”

Terbitlah bimbang. Menghalau pembalak atau memasang pal batas?

UPAYA MENATA batas rupanya mengungkap pertarungan antara upaya pelestarian dan desakan manusia dari pinggiran suaka. Nizar menjadi saksi hasrat manusia yang terus merangsek dari luar suaka. Sementara itu, dari dalam suaka, pengelolaan Rawa Singkil masih jauh dari harapan. Rusuhnya perbatasan menunjukkan tepi suaka telah lama tak



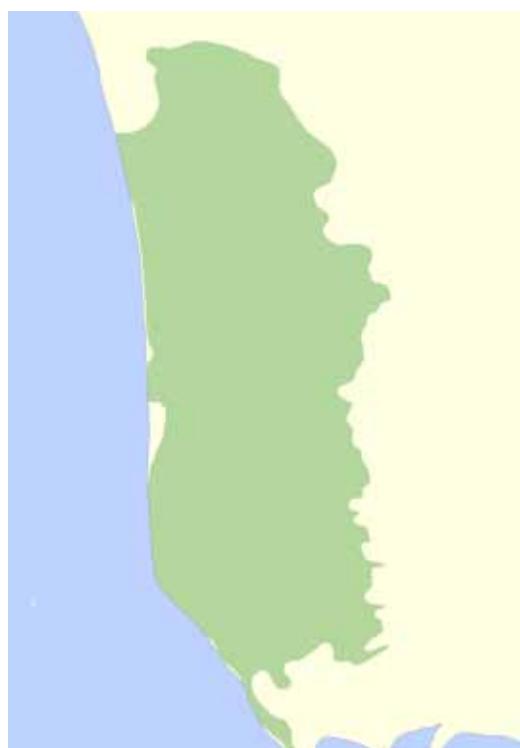
AGUS PRIJONO

SILAP MENATA BATAS

Sejak 1998 batas Rawa Singkil gaib di lapangan. Papan peringatan diam membeku; pengelola kawasan absen. Konflik yang pernah mendera Aceh memang membuat penataan batas terkatung-katung. Namun, saat damai pun, batas Rawa Singkil tetap tak tersentuh penataan. Suaka ini makin larut dalam ketidakpastian. Dampaknya, kini suaka terpuruk di titik nadir. Masa depan Rawa Singkil bakal menanggung beban berat sejarah. Dari waktu ke waktu, suaka mengalami tiga kali perubahan luas dan bentuk. Perubahan ini tanpa disertai penandaan batas. Dampaknya: pengelola dan pihak lain buta terhadap batas kawasan. Perubahan di atas peta sejatinya berefek domino di lapangan. Batas yang bergeser seratus meter saja, berarti menata kembali ratusan pal. Runyamnya, perubahan tidak serta-merta diikuti tata batas sesegera mungkin. Berikut ini wujud perubahan bentuk dari 1998 sampai 2014.

1998

Sebagian kawasan suaka berasal dari areal HPH PT Lembah Bhakti dan PT Alas Aceh Perkasa Timber. Permukiman dan lahan budidaya telah bercokol di dalam kawasan. Ada juga areal PTPN I Krueng Luas, kompleks transmigrasi, kampung tua le Meudama dan Teupin Tinggi.



SUMBER:
YAYASAN LEUSER INTERNASIONAL DAN TROPICAL FOREST
CONSERVATION ACTION SUMATERA. 2013. LAPORAN
FINAL FASILITASI PENYUSUNAN KONSEP TRAYEK BATAS
KAWASAN SUAKA MARGASATWA RAWA SINGKIL-TRUMON.

2000

Luas suaka menyusut. Sebagian permukiman dan lahan budidaya di Trumon, Runding, dan Singkil, dikeluarkan dari kawasan. Kampung tua le Meudama, transmigrasi Seuneubok Jaya, dan seboro areal PTPN I Krueng Luas tetap di dalam suaka.



2014

Kali ini bentuk dan luas suaka berubah dan bertambah. Sebagian areal tukar guling, 5.430 hektar, PT Barumun Agro Sentosa menjadi bagian suaka. Nampaknya, perubahan ini belum final, karena Aceh Selatan memprotes tukar guling itu. Tata batas bakal tersendat-sendat.



tersentuh pemantauan.

Wilayah pinggiran yang kisruh menegaskan betapa penting upaya menata batas kawasan. Dan itu perlu kerja keras. Tak hanya menghadapi medan berat, penataan batas juga menuntut daya tahan nurani menyaksikan pembalak menebangi pohon.

Terbitlah bimbang. Menghalau pembalak atau memasang pal batas? Nizar bersama timnya memilih yang kedua: Menata pal batas kawasan. Batas yang jelas akan menjamin kepastian hukum suaka margasatwa sepanjang masa. Lagipula, kata Nizar, “Penegakan hukum ada di tangan pengelola kawasan.”

Para pembalak liar sejatinya paham perbuatannya melanggar hukum. Kala menata batas, Nizar dan tim kerap bersirok dengan para pembalak. Mereka lari dan meninggalkan segala alat pembalakan. “Artinya, mereka tahu melanggar hukum.”

Selama ini, tidak adanya tanda batas selalu menjadi alasan bagi para pembalak liar dan kebun sawit bebas melebarkan lahananya ke suaka. “Alasannya karena mereka tidak tahu batas kawasan. Bahkan tanah nenek moyang juga dipandang sudah ada sebelum penunjukan suaka margasatwa,” jelas Abu Hanifah Lubis, Project Leader YLI-TFCA.

Kawasan Rawa Singkil agaknya bukan selembar kertas kosong yang bersih: ditunjuk sebagai suaka, lalu beres. Bibit pergulatan telah membayangi Rawa Singkil jauh sebelum ditetapkan sebagai

Seorang tua duduk menghangatkan diri di bawah mentari pagi di tepi Sungai Soraya. Pada era 1990-an, sungai ini menjadi sarana transportasi kayu bulat perusahaan HPH dari kawasan hutan. Kini, perahu-perahu kecil kerap lewat membawa kayu liar yang diduga dari suaka.



kawasan konservasi. “Sebelum menjadi suaka, wilayah ini disebut kawasan hutan Singkil Tengah Barat,” lanjut Abu. Sebagian areal hutan juga sudah dialokasikan sebagai kompleks transmigrasi di Cot Bayu, Padang Harapan, dan Lhok Raya.

Dengan menelusuri sejarah suaka, Yayasan Leuser Internasional menemukan catatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Medan yang menyatakan kawasan hutan itu pernah ditata batas sepanjang 186,2 km pada 1994. (Pada masa itu, Rawa Singkil dalam kewenangan BPKH Medan.) Buktinya: peta Tata Batas Kawasan Hutan Singkil Tengah Barat yang disahkan Menteri Kehutanan. Pengesahan ini berdasarkan hasil kerja panitia tata batas hutan Kabupaten Aceh Selatan.



Kerja menata batas juga menuntut daya tahan nurani menyaksikan ulah pembalak liar.

Pada tahun yang sama, Menteri Kehutanan melepas sebagian kawasan Singkil Tengah Barat—seluas 5.588 hektar—untuk kebun sawit PTPN I. “Dari pengamatan, pal tata batas pada 1994 sudah tidak ada di lapangan,” lanjut Abu. Sementara perkebunan sawit dan kompleks transmigrasi masih ada sampai sekarang.

Keadaan makin ruwet. Setelah ditunjuk sebagai suaka pada 1998, batas kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil belum pernah dipasangi tanda batas. Semenjak itu pula, bentuk dan luas suaka telah berubah tiga kali.

Perubahan terakhir terjadi pada 2014. Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 865 tentang Kawasan

Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Aceh. Lagi-lagi, bentuk dan luas kawasan Rawa Singkil berubah.

Perubahan itu karena sebagian areal tukar guling PT Barumun Agro Sentosa di Aceh Selatan dimasukkan menjadi kawasan suaka—seluas 5.430 hektar. Dua tahun sebelumnya, pada 2012, Menteri Kehutanan sudah memutuskan tukar-menukar kawasan hutan PT Barumun Agro Sentosa di Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Luas hutan yang ditukar 13.571 hektar.

Penataan batas sebenarnya pernah dilakukan pada 1999. Saat itu, YLI dengan program Unit Manajemen Leuser memfasilitasi pemasangan tanda batas sepanjang 70 km bersama BKSDA Aceh.



Wilayah pinggiran yang kisruh menegaskan betapa penting upaya menata batas kawasan.

Sayangnya, konflik yang melanda Aceh saat itu memaksa aktivitas itu buyar.

Setelah berbilang tahun, di antara raungan gergaji liar, kepungan sawit, dan perubahan kebijakan tersebut, Yayasan Leuser Internasional bersiteguh menata batas Rawa Singkil. Ini adalah penataan batas perdana di kawasan konservasi di Sumatera yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

“Kami tahu Rawa Singkil sudah ditunjuk sebagai suaka margasatwa, tapi belum pernah ditata batas. Karena tidak ada batasnya, lantas banyak persoalan. Masyarakat bersengketa dengan BKSDA yang mengelola kawasan. Kedua belah pihak merasa benar. Pecahlah salah paham. BKSDA merasa benar, sementara

warga sekitar kawasan juga tidak tahu batas kawasan,” Nizar menguraikan. “Dasar pemikirannya, kenapa tidak kita perjelas batasnya? Lalu kita memfasilitasi tata batas agar tidak terjadi lagi kekeliruan antara pengelola kawasan dengan masyarakat.”

Program ini tak sekadar memasang patok beton di tepian suaka. Itu baru salah satu tahap yang mesti ditempuh Nizar dan timnya. Sebelum menembus medan di lapangan, tim tata batas melakukan pertemuan dari forum ke forum. “Perjalanan tata batas ini panjang dan ada runtutannya,” ucap Nizar.



Perahu bergerak pelan memintas di depan papan peringatan dari pengelola kawasan suaka. Batas kawasan berjarak beberapa meter dari sempadan Sungai Soraya. Imbauan yang nyaris tanpa guna di tengah maraknya penebangan liar.

SUAKA MARGASATWA RAWA Singkil membujur dari selatan ke utara di pesisir barat Aceh. Bentang alamnya menghampar di tiga wilayah administrasi tingkat dua: Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Subulussalam. Sebagian besar kawasan, sekitar 70 persen, berada di Kabupaten Aceh Selatan; 25 persen di sisi Kabupaten Aceh Singkil; dan sisanya di Kota Subulussalam.

Itu juga berarti, selain BKSDA, penataan batas mesti melibatkan tiga pemerintahan daerah. Karena wewenang tata batas ada di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, YLI bekerjasama dengan Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Aceh. Badan inilah yang berwenang dalam penataan batas.

“Kita berkoordinasi dengan BKSDA, BPKH Aceh dan mengumpulkan semua peraturan yang berkaitan dengan tata batas,” kata Nizar.

Penataan batas kawasan konservasi memang dalam kewenangan BPKH dengan dana dari pemerintah pusat. Lantas bagaimana peran dan posisi YLI sebagai eksponen masyarakat sipil yang memfasilitasi tata batas? “Kita bertanya ke Direktorat Jenderal Planologi, ternyata itu tidak menyalahi aturan yang berlaku. Pihak lain bisa melaksanakan tata batas.”

Karena itu, dia menegaskan kembali, sejak awal YLI berkoordinasi dengan BKSDA dan BPKH. Di sisi lain, BPKH mempercayai YLI untuk melibatkan pihak ketiga. “Kami punya kontraktor yang melaksanakan tata batas. Artinya, kami tidak seratus persen melakukan sendiri. Yang membuat pal batas dan memasang adalah pihak ketiga.”

Pada tahap awal, YLI juga mengunjungi beberapa camat dan keuchik (kepala desa) untuk sosialisasi rencana pemasangan pal batas. “Tujuannya untuk memberikan informasi tentang apa yang akan dilakukan panitia tata batas,” lanjut Nizar.

Sebenarnya, dengan melibatkan pemerintah setempat, tata batas juga bisa menjadi solusi menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan suaka. “Tata batas ini untuk memperjelas kepemilikan lahan dalam membantu perlindungan suaka margasatwa,” papar Abu. Jadi, tak hanya memastikan batas kawasan, program ini sekaligus mengkaji

RIWAYAT RAWA SINGKIL

Sebagian kawasan suaka merupakan gabungan hutan produksi seluas 46.000 hektare dan kawasan hutan Rawa Singkil, 56.500 hektare. Hutan produksi awalnya areal HPH PT Lembah Bhakti, seluas 19.000 hektare, dan PT Alas Aceh Perkasa Timber, 27.000 hektare. Sebagian areal suaka juga telah dialokasikan untuk kompleks transmigrasi di Cot Bayu, Padang Harapan dan Lhok Raya.

1994

- Semula areal suaka disebut kawasan hutan Singkil Tengah Barat.
- BPKH Medan mencatat kawasan hutan Singkil itu pernah ditata batas 186,2 km. Buktiya: peta tata batas yang disahkan Menteri Kehutanan.
- Pal ataupun tanda saat tata batas tersebut sudah tidak dijumpai di lapangan.
- Menteri Kehutanan menerbitkan SK No. 505, yang melepas sebagian hutan Singkil seluas 5.588 hektare untuk kebun sawit PTPN I.

1998

Menteri Kehutanan menunjuk Rawa Singkil sebagai suaka margasatwa melalui SK No. 166. Luasnya: 102.500 hektare.

1999

Yayasan Leuser International memfasilitasi BKSDA Aceh untuk pemasangan tapal batas suaka sepanjang 80 km. Konflik bersenjata menghentikan aktivitas ini.

2000

Keputusan Menteri No. 170, tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Aceh. Bentuk dan luas Rawa Singkil berbeda dengan peta penunjukan 1998.

2012

- Rapat rencana pemasangan tanda batas di BKSDA Aceh. Pertemuan dihadiri Dinas Kehutanan Aceh, Direktorat KKBHL, Direktorat Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan, BPKH Medan, BPKH Aceh, TFCA Sumatera dan YLI.
- Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan Nomor 345 tentang tukar-menukar kawasan hutan PT Barumun Agro Sentosa, seluas 13.571 hektare. Seluas 5.430 hektare di antaranya ditunjuk sebagai bagian suaka. Keputusan ini berdasarkan rekomendasi Gubernur Aceh Nomor 522/16076 dan Bupati Aceh Selatan Nomor 522/1112.

2013

Terbit keputusan Menteri Kehutanan No. 941. Menteri memutuskan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, seluas 42.616 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 130.542 hektare; dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan 26.461 hektare.

2014

Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan Nomor 865 tentang Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Aceh. Selain memperbarui surat keputusan Nomor 941/2013, keputusan ini menjadi acuan dan dasar hukum penataan batas.



Panitia tata batas dibentuk di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Dinamika panitia di setiap pemerintah daerah berbeda-beda. Di Aceh Selatan, pemerintah setempat menghendaki pergantian nama suaka serta menunda tata batas di areal tukar guling PT Barumun Agro Sentosa. Forum panitia juga membahas trayek batas, menyepakati berita acara tata batas. Sengketa lahan di sekitar suaka didiskusikan panitia untuk mencari solusi bersama.



status lahan masyarakat di sekitar suaka. “Bila ada lahan masyarakat di dalam kawasan dan disertai bukti legal, pemerintah wajib merevisi batas suaka,” imbuah Nizar.

Berbekal surat keputusan Gubernur Aceh yang membentuk panitia tata batas, BPKH Aceh turun tangan dalam proses pemasangan patok batas. Nizar menegaskan, BPKH mendorong segera terbitnya surat keputusan gubernur tersebut. Lalu, panitia tata batas dibentuk di tiga wilayah administrasi: Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil. Panitia ini diketuai kepala daerah. “Itu sesuai dengan aturan Menteri Kehutanan Nomor 147 Tahun 2010,” tegas Nizar. Aturan menteri tentang pembentukan panitia tata batas kawasan hutan itu juga menjabarkan kewenangan panitia.

Karena luas dan bentuk suaka telah berubah tiga kali, penataan batas mengacu Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Aceh, yang terlampir di keputusan menteri Nomor 865 tahun 2014. “Peta terakhir itulah yang menjadi dasar dan acuan menata batas,” ujar Nizar.

Pertemuan demi pertemuan lantas digelar oleh panitia tata batas di Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Subulussalam. Panitia melibatkan seluruh camat dan keuchik yang wilayahnya berbatasan dengan suaka margasatwa. “Mereka menjadi anggota panitia tata batas di kabupaten. Otomatis mereka ikut terlibat dan bertanggung jawab.”

Rapat panitia untuk menyusun rencana

Usai pal sementara dipasang, dan berita acaranya diteken panitia tata batas, selanjutnya dilakukan pemacakan pal definitif. Seluruh kegiatan berlangsung di lapangan: memanggul pal beton, gali lubang, mengecat dan penomoran.

kerja, konsep trayek batas dan membuat berita acara. Dalam rapat panitia inilah, semua pihak akan memahami trayek tata batas. “Semua anggota panitia menandatangani berita acara trayek batas, yang digunakan sebagai peta kerja pemasangan batas sementara,” Nizar memaparkan. “Jika satu anggota saja tidak tanda tangan, penataan batas tidak bisa jalan.”

SEBAGIAN BESAR lingkar luar suaka dibatasi bentang alam seperti sungai dan laut. Di Aceh Singkil dan Subulussalam, suaka dibatasi Sungai Soraya dan Sungai Kuala Baru. Jarak batas kawasan dari tepi sungai bervariasi: dari 0 meter hingga 1,9 km.

Beberapa titik terluar suaka ternyata juga berada di tengah atau melewati Sungai Soraya, seperti di Subulussalam: Panji, Longkip dan Sepang; dan di Aceh Singkil: Samardua, Ladang Bisik, Muara Pea, dan Kota Sembelin. Sementara itu, di Aceh Selatan, batas suaka sebagian besar berbatasan dengan garis pantai Samudera Hindia. Jarak dari pantai mulai 0 meter hingga yang terjauh 8 km.

Panjang garis batas suaka membentang 233 kilometer, melewati berbagai medan dan berkelok-kelok. Untuk menata seluruh bentangan perbatasan itu, pemasangan pal dilakukan dalam dua tahap. “Tahap pertama sepanjang 120 km; yang kedua 113 km,” jelas Nizar.

Berbekal konsep trayek batas dan peta kerja, Nizar dan timnya menggelar





Lahan basah Rawa Singkil menghembuskan peradaban bagi masyarakat sekitar. Jasa lingkungannya melampaui batas-batas kawasan suaka. Luapan air rawa memasok nutrisi bagi belut yang biasa dianpan oleh warga dan dijual di tempat pengepulan di Runding, Subulussalam (kanan atas). Ikan jurung yang bernilai tinggi menjadi santapan warga ekonomi kelas atas di Medan, Sumatera Utara. Ikan diikat hidup-hidup di sungai agar tetap segar (kanan bawah).



pemasangan pal batas sementara. Sesuai konsep trayek batas, jarak antar-pal dipasang sejauh 100 meter. Pal sementara terbuat dari kayu atau disebut broti. Ukurannya 4 x 4 inchi, panjang 120 cm, yang dipendam sedalam 60 cm. Jadi, tinggi broti di permukaan tanah 60 cm.

“Nah, pada saat pemasangan pal batas sementara inilah baru muncul masalah,” ungkap Nizar.

MOMEN pemasangan broti menyingkap berbagai perkara di sekeliling suaka. Tak hanya sekali-dua kali tim memasang patok yang titik koordinatnya jatuh di lahan yang diklaim masyarakat. “Padahal lahan itu masuk dalam kawasan yang ditunjuk pemerintah menjadi suaka margasatwa.” Bila masih bisa bernegosiasi, Nizar tetap menanam pal batas sementara. “Kalau ngotot, broti tidak kita pasang.”

Peliknya, lahan yang didaku belum tentu dilengkapi sertifikat atau surat legal tanah. Pecahlah perdebatan yang tak jarang diiringi ancaman. “Jawabannya, ‘Saya tidak peduli Anda dari mana, tanah saya jangan diganggu. Kami tidak tahu undang-undang, tidak tahu hukum, yang kami tahu cuma ini: parang,’” ungkap Nizar menuturkan kembali sepenggal perdebatan di lapangan.

Nizar juga tak akan pernah melupakan satu peristiwa di Runding, Subulussalam. “Ada seorang warga yang menawarkan ‘sesuatu’ asal lahannya dikeluarkan dari suaka margasatwa. Luas tanahnya sekitar 5 hektar. Ia sadar lahannya masuk

Di pesisir barat yang berbatasan dengan suaka, tim YLI dan panitia tata batas melakukan sosialisasi pemasangan batas definitif di Teupin Tinggi dan le Meudama, Trumon, Aceh Selatan. Tak jarang, dalam pertemuan seperti ini diskusi berlangsung alot.



kawasan, dan ia coba menego.”

Tak jarang pendakuan berlangsung diam-diam. Saat pemasangan broti, sejumlah orang diam saja meski sadar kebunnya masuk kawasan. “Dia diam saja saat kita memasang pal. Tapi setelah itu, dia buang palnya. Kita pernah pasang 410 pal, sebulan kemudian 120 pal hilang.”

Sengketa juga merebak di Trumon dan Buloh Seuma, Aceh Selatan. Sekelompok warga bahkan tidak mengakui keberadaan suaka margasatwa. Alhasil, terjadi penentangan atas pemasangan pal sementara. Pada saat yang sama, di pantai barat yang berbatasan dengan suaka, sedang berlangsung pembangunan jalan Buloh Seuma-Trumon. Sebagian warga menolak tim memasang pal sebelum



Bila ada lahan warga di dalam kawasan dan legal, pemerintah wajib merevisi batas suaka.

pembangunan jalan selesai. Salah seorang warga bahkan melayangkan ancaman kepada tim tata batas di lapangan.

Pada peta penunjukan yang terakhir, sebagian pantai barat dari Trumon ke Buloh Seuma memang telah dikeluarkan dari suaka margasatwa. Hanya saja, untuk menghindari rawa-rawa, sejumlah ruas jalan sengaja dibelokkan menembus suaka.

Barangkali sosialisasi program tata batas kurang intens. Pada pertemuan panitia tata batas memang ada rekomendasi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui camat dan keuchik. "Apakah kita memang lemah dalam sosialisasi, atau mereka yang nekat. Dalam rapat panitia kami sudah melibatkan keuchik setempat,

yang semestinya menyampaikan hasil pertemuan kepada warganya. Semua camat dan keuchik yang dilewati trayek batas wajib menjadi anggota, ditambah ketua adat setempat. Mungkin pesan kita belum bisa ditangkap."

Tim agaknya menuai dampak tidak adanya tata batas sejak 1998 saat Rawa Singkil menjadi kawasan konservasi. Tak heran, kepanikan merebak saat ada rencana pemasangan pal batas.

Sengketa dengan warga sebenarnya akan diselesaikan setelah pemasangan pal sementara selesai. Ini agar panitia mengetahui pasti lahan yang tumpang tindih di sepanjang trayek batas. Usai pemasangan pal, tim lapangan akan menyampaikan adanya sengketa lahan ke



JASA LINGKUNGAN RAWA TERSISA

Rawa Singkil memendam jutaan ton karbon. Sebagai satu-kesatuan lansekap, suaka ini mengayomi ekosistem rawa dalam cakupan Kawasan Ekosistem Leuser. Pada 1990-an, Rawa Singkil dipandang hutan rawa terakhir yang utuh di pantai barat Sumatera. Jasa lingkungannya berlimpah ruah: menjaga air, tandon karbon, habitat satwa liar, dan tempat berpijahan aneka ikan. Jasa alam yang tak kasatmata itu meniupkan peradaban: memasok air, mengairi lahan pertanian, sumber protein, dan benteng daratan dari terjangan tsunami.



Tandon Karbon

Rawa Singkil memendam sekitar 175 juta ton karbon. Hutan gambutnya mencapai 86 persen luas kawasan, dengan kandungan karbon 98 persen. Rimba suaka rata-rata meluruhkan serasah 11 ton per hektare per tahun, yang memasok simpanan karbon di tanah gambut.

Rumah Mawas

Setiap satu kilometer persegi Rawa Singkil rata-rata didiami 5 orangutan sumatera (*Pongo abelii*). Kepadatan mawas tertinggi di sekitar Buloh Seuma, Trumon, dan Ladang Bisik. Kera besar ini biasa membuat sarang berdiameter 1-1,25 meter di 48 jenis pohon. Rawa Singkil dipandang sebagai tempat tinggal bagi 1.660 orangutan sumatera.

Rawa Ruaya

Lahan basah Rawa Singkil menjadi habitat ruaya bagi burung air yang bermigrasi ke pantai barat Sumatera. Burung-burung air kerap menyambangi kawasan ini di sela perjalanan panjangnya. Para pakar memprediksi 80 persen populasi mentok rimba yang langka berkembang biak di Rawa Singkil. Suaka ini tempat terakhir bagi beberapa spesies terancam punah: buaya muara, kelabang raksasa, dan kura-kura pesing—yang bobotnya bisa mencapai 70 kg.

Lahan Basah Gemah Ripah

Rawa Singkil menyediakan 50 persen habitat pemijahan ikan-ikan perairan dangkal di sekitarnya. Hasil tangkapan ikan di kawasan ini sekitar 360.000 ton setiap tahun. Produktivitas ini didukung oleh luapan air tahunan dari hutan rawa. Luapan air menyediakan tempat berpijih dan memasok hara ke perairan pantai. Kanal-kanal kebun sawit bakal memeras air rawa, yang bakal memangkas 30 persen hasil tangkapan ikan.

SUMBER:

- ONRIZAL, ERWIN A PERBATAKUSUMA, DAN NURDIN SULISTIYONO. 2009. **KANDUNGAN KARBON RAWA SINGKIL DAN POTENSI PENGEMBANGAN PRODUK JASA LINGKUNGAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN KOTA SUBULUSSALAM**. KERTAS KERJA SEMINAR "PENGEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN BAHAN BAKAR NABATI DAN PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN."
- YAYASAN LEUSER INTERNASIONAL DAN TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION SUMATERA. 2013. LAPORAN FINAL SURVEI SUMBERDAYA ALAM (BIODIVERSITAS) DI KAWASAN SM RAWA SINGKIL-TRUMON UNTUK MENDUKUNG RENCANA PENGELOLAAN/RENCANA STRATEGIS SM RAWA SINGKIL.

BOBOLNYA SUAKA KAMI

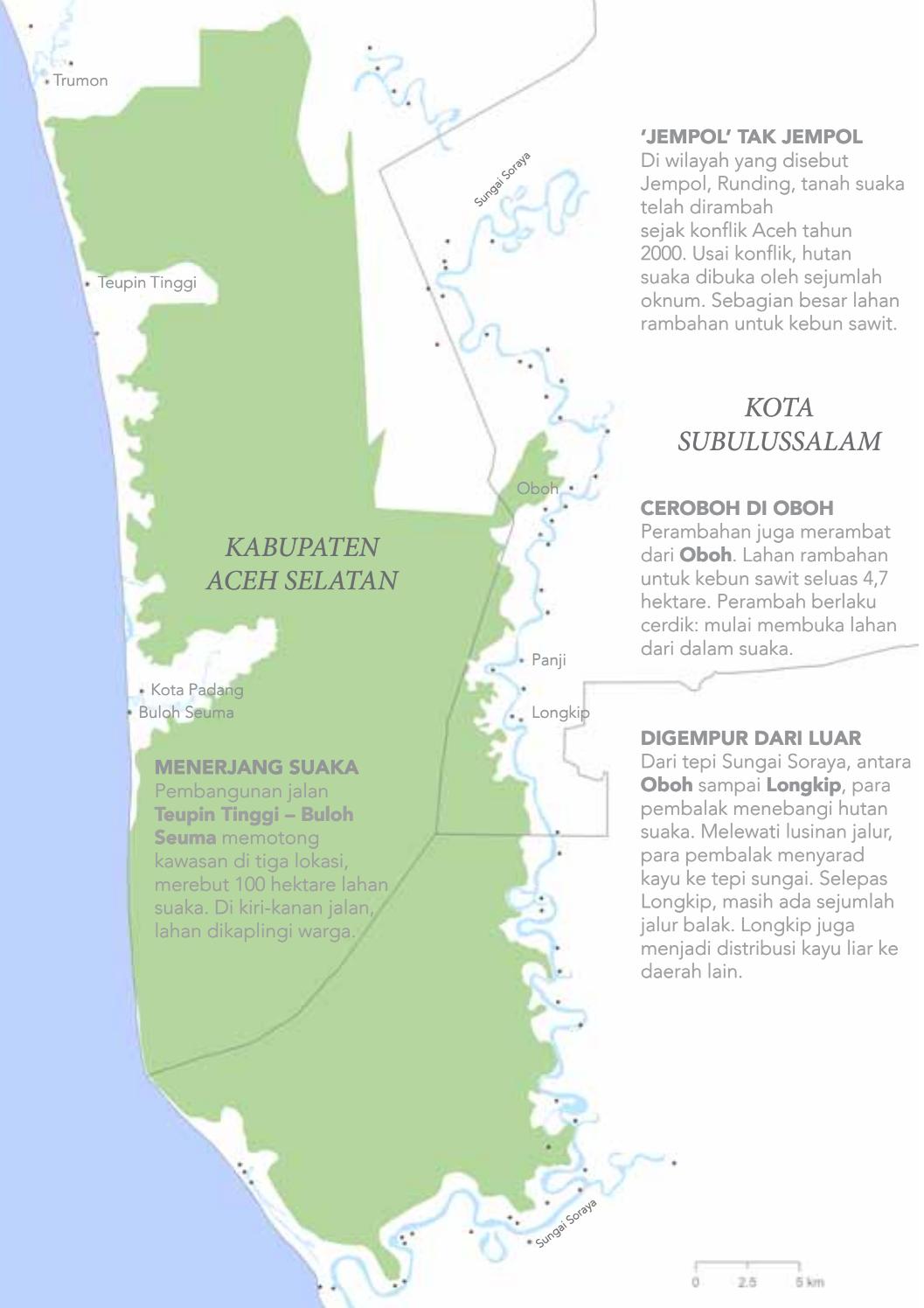
Satwa liar yang semestinya berkuasa di Rawa Singkil. Nyatanya, dari luar dan dalam, suaka digempur habis-habisan. Batas kawasan yang gaib memudahkan manusia membobol suaka dari segala arah. Para pembalak gelap mata membabati pohonnya; kanal kebun sawit memeras gambutnya; perambah kemaruk merenggut tanahnya. Ini mengancam ide keramat: melindungi kekayaan hayati pesisir barat Sumatera.

DIGEROGOTI DARI DALAM

Suaka dibabati dari dalam di sekitar jalan Keude Trumon - Teupin Tinggi. Di sekitar Keude Trumon, suaka dibuka 500 meter ke timur, dan 1 – 4 km arah timur menuju le Meudama. Awalnya, lahan dibuka, lalu dijual ke sejumlah oknum. Di sisi wilayah ini, sebagian kawasan telah menyimpan perkara sejak mula: kampung tua le Meudama dan kompleks transmigrasi yang dibangun pada 1992.

Program kebun bibit rakyat 2012 Dinas Kehutanan Aceh Selatan di Teupin Tinggi mencaplok lahan suaka. Sesuai peta suaka tahun 2000, sebagian kebun bibit itu masuk kawasan suaka. Versi dinas: kebun bibit berada di luar kawasan. Di sini juga telah dibuat jalan dan kanal berbentuk U sebagai program PNPM. Luas suaka yang dicaplok: 126 hektare.

S A M U D E R A H I N D I A



AREA YANG DIPERBESAR





ketua panitia tata batas.

“Panitia akan membahas lahan yang tumpang tindih dan mencari solusi,” Nizar memaparkan. Di sejumlah lokasi batas suaka memang bersinggungan langsung dengan pemukiman, terutama di Kecamatan Trumon, Aceh Selatan; Kecamatan Runding, Kota Subulussalam; Kecamatan Kota Baharu dan Kuala Baru di Aceh Singkil.

Upaya penyelesaian sengketa lahan telah dilakukan melalui pertemuan dengan masyarakat. Di Ie Meudama dan Teupin Tinggi, Trumon, Aceh Selatan, misalnya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa pemasangan pal harus berkoordinasi dengan keuchik dan melibatkan tenaga setempat.

Rumitnya, masyarakat juga berharap diberi lahan seluas 4 hektar untuk setiap kepala keluarga. Namun kesepakatan itu juga tidak menjamin penataan batas steril dari ancaman. Masih saja ada oknum yang

mengintimidasi keuchik untuk menolak tata batas.

Sedangkan di wilayah Subulussalam, pal sementara sudah dipasang sejak Juni 2013. Bentangan lingkar batas Rawa Singkil di wilayah ini sejauh 43,6 km dengan 439 pal. Tapi, yang berhasil dipasang 411 pal. Ada 28 pal sementara tidak dapat dipasang dan 101 patok lenyap tak berbekas. Dari pertemuan panitia Subulussalam, pal definitif bisa dipasang di batas kawasan yang bebas sengketa, mulai Runding, Oboh, sampai Sepang.

“Karena menghadapi tantangan seperti itu, pal belum bisa dipasang. Kalau ada warga yang menolak, pemasangan ditunda dulu. Nampaknya, akan ada tim khusus yang akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Memang tidak gampang...,” sergah Nizar.

Tuntasnya pekerjaan memasang patok sementara adalah syarat bagi pemasangan pal definitif atau permanen.



Melewati pantai, dan menembus rawa-rawa, tim memasang papan peringatan sebagai persiapan tata batas suaka. Kerja ini dilakukan bersama tim YLI dan BKSDA Aceh di sekitar Suka Jaya, Kecamatan Kuala Baru (kiri-kanan).

Dalam rapat panitia akan dibuat berita acara pemasangan pal sementara, yang ditandatangani oleh seluruh anggota. “Dokumen berita acara ini sebagai dasar pemasangan pal batas definitif di lapangan.”

SEJENAK SAJA, perhatikan wujud pal definitif: Beton bertulang berdimensi 120 cm x 10 cm x 10 cm. Bobotnya, 40 – 50 kilogram. Beton itu dipanggul, lalu ditancapkan 60 cm—sepanjang pal. Sekujur pal beton berwarna putih, pucuknya dicat merah. Kemudian ditandai: SM T dan nomor pemasangan. Jarak antar-pal: 100 meter.

Pada tahap pertama, batas yang ditata sepanjang 120 km. Itu berarti ada 1.200 patok beton yang bakal ditancapkan di

lingkar batas suaka. Pal beton dipacak mengikuti pal batas sementara yang telah ditanam sebelumnya.

“Pemasangan pal definitif sesuai dengan berita acara pal batas sementara,” papar Nizar. Ada dua sampai tiga tim yang turun ke lapangan. Setiap tim berisi 10-12 orang, yang terdiri Yayasan Leuser Internasional, BKSDA Aceh, porter dan kontraktor.

Untuk menata batas sepanjang 120 km sudah dicetak 1.200 pal beton. “Tapi yang kita drop ke lapangan sesuai kebutuhan. Kalau bulan ini perlu dua ratus pal misalnya, jumlah itu yang kita bawa,” jelas Nizar. Medan berat dan terpencil membuat satu tim hanya bisa memasang empat patok sehari. Dengan jarak antar-patok 100 meter, berarti tim hanya memasang



Tiadanya batas suaka membuat penebang liar bebas membalak pohon-pohon bernilai ekonomi tinggi. Hutan yang tersisa dekat batas suaka hanyalah ampas para pembalak. Selama penataan batas, tim menjadi saksi kayu liar dikumpulkan di tepi Sungai Soraya. Kayu kemudian dibawa menghilir atau menghulu, disebar ke segala penjuru (kanan). Dekat dengan kayu berserakan, kantong semar meregang nyawa pelan-pelan. Mengering, mati! Paya di sekitar kantong semar telah menguap karena hutan dibabati (atas).



TEPAT 463

Kawasan di dekat perbatasan, tepat di pal T 463, berupa hamparan sawit muda. Tanda batas dipasang berselang 15 tahun lebih sejak Rawa Singkil menjadi suaka. Sungguh sangat terlambat.





6.642 hektare kawasan suaka dirambah



Ketika air surut, buaya biasa berjemur di hamparan pasir.

pal untuk 400 meter. "Membawa pal beton dengan dipanggul. Satu porter, satu patok. Ini pekerjaan yang sangat berat, karena pengangkutan, pemasangan, pengecatan, dan penomoran dilakukan di lapangan," tegas Nizar.

Rata-rata tim baru turun pukul 10 siang. Lantas, Nizar menuturkan, "Bikin lubang, menanam, mengecat. Memasang satu patok paling cepat 1 jam. Tim lapangan ini sudah kuat. Bayangkan saja, memanggul patok 50 kg, dan kaki bisa terperosok ke dalam gambut. Makin digoyang, kaki makin terjerumus dalam." Ketika musim hujan, tim tidak bisa bekerja di lapangan lantaran hamparan gambut terendam air.

Itu tantangan medan di daratan. Di rawa-rawa yang berada di Kabupaten

Aceh Singkil, tantangan lebih berat lagi. Kendati tepi suaka di Aceh Singkil belum di tata batas, Nizar dan tim telah memasang papan peringatan di rawa-rawa. "Batas di Aceh Singkil itu termasuk dalam tahap kedua tata batas. Tapi papan peringatannya sudah kami pasang."

Rawa-rawa di suaka margasatwa ini dikenal sebagai habitat buaya. "Sepanjang sungai merupakan habitat buaya. Saya pernah ketemu dua kali. Gede-gede.... Ketika air surut, buaya biasa berjemur di hamparan pasir. Tapi aman, asal tidak turun ke sungai."

DARI TARGET lingkar batas 120 km, yang telah ditata mencapai 97 km. Itu



Meniti setiap jengkal pinggiran suaka, penataan batas acap memergoki jalur pembalak liar. Jejak jalur balak menjalar dari tepi Sungai Soraya hingga kawasan suaka. Para pembalak yang gelap mata berpesta pora di tanah untuk margasatwa ini.

juga berarti tim telah memasang 970 pal beton. Sisanya, sepanjang 23 km masih menunggu kepastian tukar guling kawasan hutan PT Barumun Agro Sentosa.

Pemerintah daerah Aceh Selatan menolak tukar guling kawasan hutan di Trumon Raya dan Bakongan Raya itu. Sebagian masyarakat juga menentang keras rencana itu. Pemerintah Aceh Selatan memandang tukar guling merugikan daerah dan masyarakat setempat. Aceh Selatan merasa butuh lahan untuk pertanian dan perkebunan. Kawasan budidayanya memang hanya 26 persen dari seluruh wilayah kabupaten. Sisanya adalah kawasan hutan.

Menteri Kehutanan memasukkan sebagian lahan tukar guling ke dalam

suaka—seluas 5.430 hektar. Jadi, luas dan bentuk suaka berubah dan bertambah luas. Sayangnya, areal itu yang dituntut Aceh Selatan untuk dijadikan kawasan budidaya. Sebelum ada kepastian ihwat tukar guling itu, tim belum bisa menyentuh batas kawasan yang ditukar guling.

Padahal Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan penunjukan lokasi tukar guling berdasarkan rekomendasi Bupati Aceh Selatan Husin Yusuf dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Keduanya kini telah lengser. Berganti bupati, kini Aceh Selatan tidak setuju. “Itulah yang membuat pemasangan pal batas sepanjang 120 km belum kelar. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun,” ungkap Nizar.

Penataan batas sebenarnya untuk memastikan kawasan suaka beserta lahan masyarakat sekitarnya. Kepastian ini baru langkah awal dalam mengelola dan melindungi kekayaan hayati Rawa Singkil. Sebaliknya, tanpa kepastian kawasan, pengelolaan tidak akan berjalan efektif.

Daerah perbatasan selalu meniscayakan ketegasan dan kepastian. Dua hal itu yang tidak ada di Rawa Singkil selama limabelas tahun lebih. Tanpa batas yang jelas, suaka margasatwa gagap mengikuti langkah zaman: bertambahnya penduduk, dan meluasnya lahan budidaya. Imbasnya, penduduk yang lapar tanah, kebun sawit yang menggurita, pembalak yang kemaruk kayu dengan leluasa merenggut lahan suaka.

Tidak mengejutkan bila penataan batas ini mesti bentrok dengan

Bersama petugas lapangan dari BKSDA Aceh, tim tata batas memastikan pal sementara dipasang tepat di titik koordinatnya sesuai trayek batas. Setelah itu, disusul pemasangan pal permanen.

Tata batas untuk memastikan kawasan suaka dengan lahan sekitarnya.

banyak kepentingan. Selama hari-hari pemasangan pal, sudah pasti memunculkan ada pihak sana, ada pihak sini; ada yang di dalam, ada yang di luar. Perbatasan selalu menuntut ketegasan.

SIANG ITU, di wilayah yang disebut Jempol, Subulussalam, Nizar terkesiap. Dia mengereyitkan dahi. Sepucuk pal kayu gosong; lidah api pernah menyengatnya. Jempol meliputi empat desa: Pasar Runding, Muara Batubatu, Panglima Saman dan Binanga. Dari sisi ini, sejak konflik Aceh pada 2000, suaka dirambah warga. Apalagi saat itu, pemerintah Aceh Singkil membangun perumahan bagi korban konflik di Jempol.

Lima belas meter dari pal hangus itu, sebuah surau teronggok lapuk. Dinding kayunya rontok. Kubahnya miring dikerubuti karat. Di tengah surau, sepucuk sawit muda tumbuh merana. Raungan gergaji mesin pembalak dari dalam suaka menusuk hingga jantung musala.

Hari itu, terpampang wajah gelap negeri yang mendaku bergelimang kekayaan hayati. Ikhtiar menata batas Rawa Singkil bakal menantang siapapun yang berakal sehat. Ujian serupa sedang menggeliat di sisi utara Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Kali ini, ujian datang dari *nek rauyeuk*: ‘orang besar’ yang dihormati masyarakat Aceh. Ujian yang mengajak merenungkan dampak perkembangan populasi manusia terhadap makhluk hidup yang lain. ***





ROBOH DI OBOH

Pohon yang roboh menyamarkan jalur pembalak liar yang masuk ke suaka di sekitar Oboh, Runding, Subulussalam. Setapak kayu yang kusam menunjukkan jalur ini telah lama menjadi lorong pencurian kayu suaka.

122

spesies pohon, 6 di antaranya bernilai ekonomi





PADA AKHIRNYA

Saat tata batas rampung, pal batas akan berdiri sendirian menjaga tepi suaka. Batas kawasan tak lagi khayali, tapi maujud nyata. Setelah tata batas tuntas, suaka margastwa ini mesti dikelola secara layak dengan menggandeng pihak-pihak terkait.



Pengayom

MATA LARON

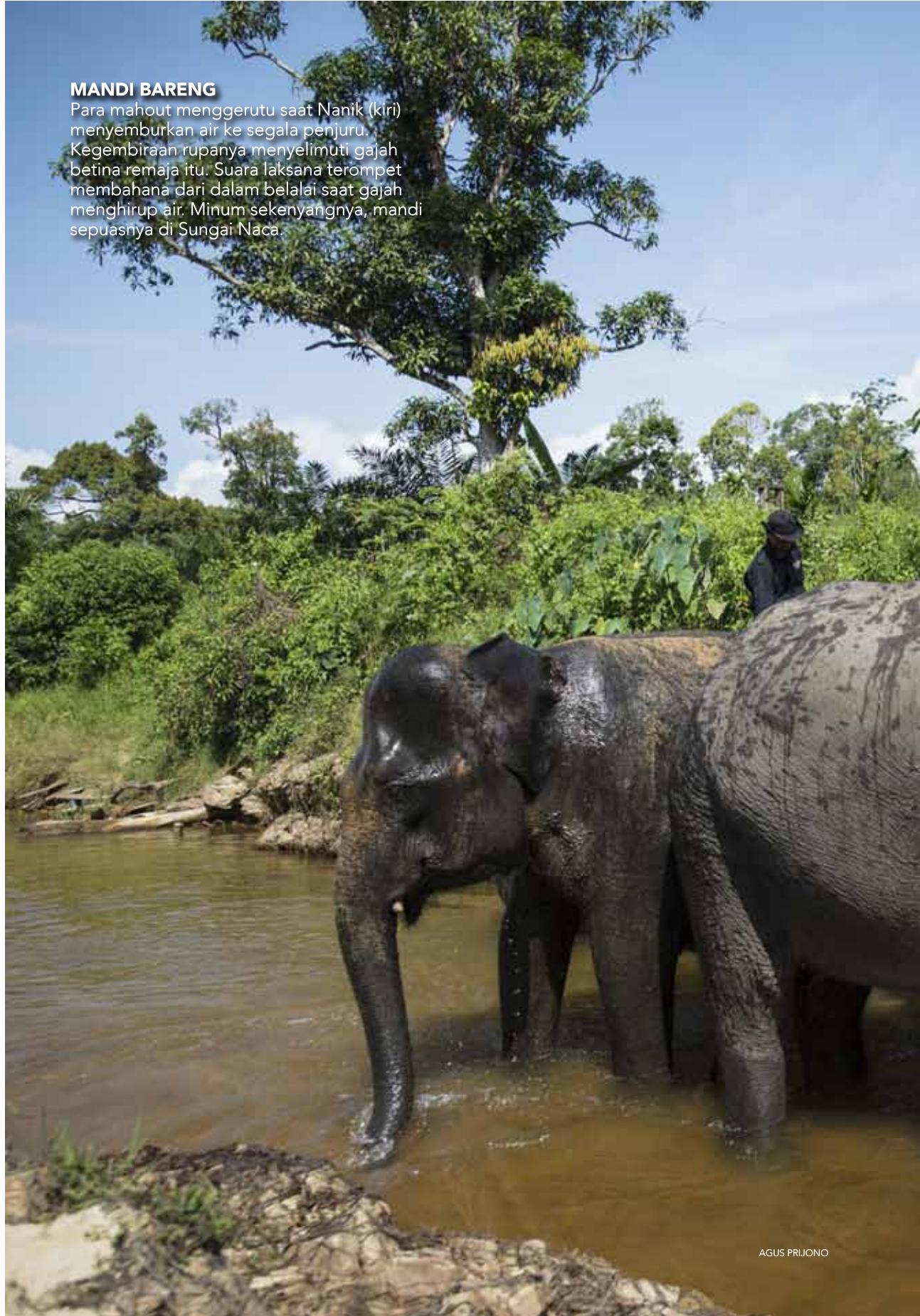
Bertelinga besar dan bermata mungil adalah ciri gajah yang dikenal banyak orang. Kedua ciri itu juga yang digunakan mahout sebagai alat pengendali gajah berjalan. Belok ke kanan, mahout akan menggerakkan telinga kiri gajah, dan sebaliknya.

Nek Rauyeuk

Manusia dan gajah bersekutu melerai konflik yang tiada henti. Solusi adil untuk melindungi gajah, menyelamatkan manusia.

MANDI BARENG

Para mahout menggerutu saat Nanik (kiri) menyemburkan air ke segala penjuru. Kegembiraah rupanya menyelimuti gajah betina remaja itu. Suara laksana terompet membahana dari dalam belalai saat gajah menghirup air. Minum sekenyangnya, mandi sepuasnya di Sungai Naca.





4
gajah dan 4 mahout meredakan konflik satwaliar

Tinggi... tinggi!" Sore itu, aba-aba Koordinator Mahout Fransisco Sirait menggema di lapangan Conservation Response Unit Trumon, Aceh Selatan, Aceh. Tuah, Bayu, Siska, dan Nanik serentak mengangkat salah satu kaki depannya. "Tinggi... tinggi!"

Tuah, Bayu, Nanik mengangkat kaki kanan, Siska kaki kiri. Tidak kompak. Para mahout tersenyum kecil, lalu mengarahkan Siska meninggikan kaki kanannya.

Usai mandi dan segar, empat gajah sumatera itu kudu berlatih: angkat kaki, naik ke anjungan, buka mulut, angkat belalai. Mahout atau srti juga mengobati luka kecil di tubuh Bayu. Obatnya berupa kunyit dicampur antiseptik. Agar tidak dikerubuti lalat, luka disemprot dengan obat khusus pengusir serangga. "Lalat akan meninggalkan kotoran sehingga luka bisa menjadi borok" jelas Koko, panggilan akrab Fransisco.

Secara berkala, dokter dari Veterinary Society For Sumatran Wildlife Conservation (Vesswic) Medan datang memeriksa para gajah. Bagaikan pasien khusus, empat mamalia besar itu mendapatkan perawatan ekstra: diberi obat cacing dan vitamin kebugaran,

tinggi dan lingkar dada diukur, telapak dan kuku kaki dibersihkan.

Setiap pagi dan sore, gajah-gajah berbobot di atas dua ton itu rutin mengeyam pendidikan. Lihatlah Tuah. Pejantan tua itu dibiasakan mengacungkan gadingnya yang kokoh. Gunanya, ungkap Koko, "Ketika menggiring gajah liar, Tuah akan mengusir dengan mengangkat gadingnya."

Rutinitas liman yang berdiam di kawasan Koridor Satwa Trumon itu bermula sejak pagi hari. Mereka mulai keluar kandang pukul 8. Setelah itu, ujar Koko, "Latihan angkat kaki, tidur-tiduran, mengangkat gading, membuka mulut, dan angkat kaki bersama."

Latihan menjulangkan gading hanya dilakukan pejantan Tuah dan Bayu. "Itu untuk mitigasi konflik, agar pejantan bisa bertarung dengan gajah liar. Itu untuk menanamkan jiwa keberanian." Latihan lain, seperti membuka mulut, bermanfaat



Aktivitas mahout didukung berbagai sarana: barak berisi lima kamar, dua kamar mandi, dan teras. Setiap kamar tidur dilengkapi dua kasur, meja kerja dan lemari pakaian. Pemilihan lokasi basecamp berdasarkan kajian dengan menimbang kelayakan lokasi bagi kehidupan gajah.

untuk pemeriksaan kesehatan. Dokter hewan akan mudah memirsa ke dalam mulut si gajah. Sebaliknya, si gajah juga tak canggung mengangkakan mulutnya.

“Terkadang ada makanan yang bisa melukai bagian dalam mulut. Jika tidak dilatih, kita tidak bisa tahu kondisi mulutnya. Untuk itu, gajah dibiasakan membuka mulut yang memudahkan kita memeriksa,” papar Koko.

Usai olah fisik, mahout menggiring Tuah dan kawan-kawan ke Sungai Naca. Mereka wajib mandi dan wajib minum. Gajah mungkin bisa menahan lapar, tapi ia tidak bisa menahan haus. Hampir 70 persen tubuh gajah adalah air. “Jika kehausan, ia bisa marah dan dehidrasi.”

Mandi di sungai adalah waktu

yang menyenangkan bagi para liman ini. Lantaran itu, gajah sengaja diberi kesempatan berlama-lama di air. Mereka bisa minum dan mandi sepuas-puasnya.

Sembari berbasah ria, lagi-lagi, gajah-gajah berlatih. Srati akan meminta gajah membuka telapaknya, lalu srati membersihkan telapak dan kuku. Menanggung beban tubuh jumbo, kesehatan telapak kaki sangat penting. “Bila kakinya berjamur, gajah tidak bisa lagi ditempatkan di lokasi yang basah. Padahal, di Koridor banyak tempat yang basah,” ungkap Koko yang sejak kecil telah mengakrabi gajah ini.

Satu-satunya kesempatan Tuah dan kawan-kawan berjumpa air adalah sewaktu mandi di sungai. Kandangnya

Menyebar di sungai, para gajah didampingi sang mahout mandi dan berlatih. Dalam sehari, gajah mesti mandi dua kali, pagi dan sore, untuk minum dan membasuh debu di tubuh.

Mendampingi satwa raksasa ini menggetarkan jiwa.

pun kering, tanpa kolam ataupun wadah air. Koko menegaskan kandang hanya untuk istirahat dan makan. “Sungai untuk tempat bermain, mandi, dan minum. Kandang mesti kering. Kalaupun ada kolam, letaknya tidak di kandang. Ini untuk menghindari kandang lembap, yang bisa menumbuhkan jamur di kaki gajah.”

Setelah puas mandi, pawang akan menggembala para liman di hutan. “Itu kalau tidak ada jadwal patroli. Kala ada patroli, gajah akan keliling kawasan Koridor Satwa.” Saat bebas tugas, Tuah, Bayu, Siska, dan Nanik ditambatkan di hutan untuk menyantap pakan alami.

Ada daerah khusus untuk mengangon gajah. “Tidak semua daerah di hutan Koridor bisa untuk menambatkan gajah. Kita punya lokasi khusus. Kalau menambatkan gajah di seluruh Koridor, pohon-pohon kecil akan roboh,” papar Koko.

EMPAT GAJAH, empat watak.

Tuah adalah pejantan dewasa, 38 tahun. Setelah dijinakkan, Tuah jadi pendiam. Tabiatnya sulit ditebak. “Mungkin sudah tua, ia agak lamban mengikuti perintah.”

Bayu: pejantan 27 tahun yang lumayan pintar. “Ia mudah menangkap ajaran mahout. Untuk ukuran gajah, Bayu masih remaja,” terang Koko.

Lalu Siska, gajah betina yang lebih tua ketimbang Tuah. Usianya 42 tahun. “Ia pernah punya anak ketika masih liar. Seperti Tuah, ia juga agak susah menangkap perintah mahout.”



AGUS PRIJONO

Gajah yang satu ini favorit CRU Trumon: Nanik. Betina remaja ini paling pintar. Ia awalnya bertugas memberi penyuluhan kepada masyarakat, sehingga Nanik pandai beratraksi. Tapi, ia kini telah pensiun.

Dokter juga punya perhatian khusus pada Nanik dan Siska. Keduanya dipantau khusus, karena sedang bunting. Koko menuturkan Nanik dan Siska sedang bunting.

Dan ini kejutan. Ini yang pertama terjadi di Aceh: gajah betina kawin dengan pejantan di dalam kandang. Mereka mungkin kawin dengan Bayu atau Tuah yang hidup sekandang. “Di pusat latihan gajah lainnya, betina bunting karena kawin dengan jantan liar dari luar kandang,” kata Koko.

Empat gajah dengan beragam karakter itu didampingi empat mahout.

Fransisco Sirait mendampingi Tuah; Hendra Masrizal memegang Bayu; Ramayadi menemani Siska; dan Wahidin mengendalikan Nanik. Para mahout didukung dua asisten: Azwir dan Sarmudi.

“Satu gajah dipegang satu mahout agar interaksinya lebih akrab. Gajah menjadi biasa mendengarkan suara mahout dan menghafalnya. Selain itu, agar mahout mengenali watak si gajah yang diasuhnya.”

Gajah dan mahout seolah menyatu dalam hidup. Biasanya, Koko menjelaskan, watak gajah akan mengikuti tabiat sang mahout. Jika mahoutnya pendiam, gajahnya juga pendiam. Mahoutnya nakal, gajahnya nakal. “Mahoutnya pintar, ia juga pintar.”

Tuah mendekati Siska dan Nanik; Bayu menyendiri di ujung kandang. Di sangkar ini mereka diharapkan menjalin keakraban. Di CRU yang lain, betina jinak biasanya kawin dengan pejantan liar; sementara pejantan jinak kawin dengan betina liar. Tapi di CRU Trumon, mereka mau tak mau mesti kenal satu-sama-lain.





Gajah dan mahout seolah menyatu dalam hidup. Mahoutnya nakal, gajahnya juga nakal.

berkecamuk di Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam. Di Aceh Selatan, konflik kerap membara di Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah; Naca, Ie Jernih, Cot Bayu, Krueng Batee, Gunong Kapho, Kecamatan Trumon Tengah; Pintu Rimba, Jambo Dalem, Kapa Sesak, Kecamatan Trumon Timur; dan sekitar Simpang, Kecamatan Bakongan Timur. Sementara di Subulussalam, pertikaian mengharu biru di Kecamatan Sultan Daulat.

Kawanan gajah liar mungkin datang dari Bengkung—Taman Nasional Gunung Leuser, yang merupakan populasi terbesar di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). “Prediksinya, gajah dari Bengkung yang kadang-kadang masuk ke Trumon Timur dan Sultan Daulat. Ada juga populasi

yang sudah menetap di Subulussalam, karena mereka sudah tidak tahu lagi ke mana mencari pakan. Ada dua gajah yang sering muncul di Sultan Daulat,” papar Abu Hanifah Lubis, project leader YLI-TFCA.

Yayasan Leuser Internasional mencatat, di masa lalu kawanan gajah liar biasa menjelajahi Aceh Selatan dan Subulussalam. Artinya, dua wilayah administrasi ini menjadi habitat alami gajah. Pada saat tertentu, gajah melintas di ladang masyarakat. Pertikaian mulai pecah pada akhir 1980-an. Kala itu, sejumlah pengusahaan hutan mulai beroperasi, dan menebangi hutan di Bengkung dan sekitarnya.

Keadaan makin runyam lantaran



Penangkapan gajah liar telah dilarang, terbitlah ide mendirikan CRU Trumon.

kawasan berhutan, di antaranya bekas areal HPH, dirombak menjadi kebun sawit. Dampaknya, daerah jelajah gajah pecah berkeping-keping. "Gajah punya kebiasaan menjelajahi wilayah yang sama dengan selang waktu tertentu. Ingatan gajah sangat tajam, ia bisa mengingat daerah jelajahnya," jelas Abu. Dengan begitu, gajah pasti berhadapan dengan manusia yang telah merambah dan membongkar daerah jelajahnya.

Konflik kian memanas semenjak era 2000-an. Intensitasnya kian tinggi, dan menyebar ke desa-desa. "Konflik gajah di Trumon ada sejak 2006. Itu sejak banyak kebun sawit, banyak kawasan hutan yang dibuka. Gajah makin sering melintas, terutama di kawasan sisi kiri jalan dari

Tapaktuan—ibukota Kabupaten Aceh Selatan," terang Abu.

Kecamuk bentrok dirasakan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Masrul. "Saya juga bingung. Keuchik dan masyarakat dari Manggamat sampai Trumon selalu memberi laporan," tutur Masrul. Melalui telepon genggam, dia acap menerima laporan yang datang tak mengenal waktu—seiring dengan gajah yang masuk kampung.

"Malam-malam gajah merusak tanaman jagung. Padahal dua minggu lagi mau panen. Itu tahun 2009. Masyarakat menangis. Gajah turun merusak kebun. Makannya sedikit, tapi tanaman rusak semua. Gajah-gajah itu sebenarnya jalani-



Setelah mandi, gajah akan digembala di sejumlah sudut di Koridor Satwa. Rumput dan tumbuhan lain menjadi pakan tambahan bagi para gajah. Pakan berlimpah dan sumber air yang berlimpah membuat Koridor Satwa pantas dijadikan basecamp CRU Trumon.

jalan saja, tapi kebun bisa rata. Telepon berdering terus. Saya jawab, ‘ya, terima kasih’. Tapi saya bingung juga,” ungkap Masrul mengenang.

Begitu juga di Kota Subulussalam. “Subulussalam banyak mengeluarkan izin kebun sawit, karena kontribusinya bagi pendapatan daerah paling besar. Masalahnya, efek pembukaan kebun sawit tidak diperhatikan oleh pemberi izin. Sejak marak kebun sawit, gajah sering masuk kampung dan kebun,” papar Abu.

Baku sengketa gajah-manusia di Subulussalam begitu terang benderang. Gajah sering menggerayangi kebun dan kampung. Medan konflik hanya beberapa kilometer dari perkampungan. “Sebagian besar lokasi konflik adalah kebun sawit.

Dan sejak 2010, mulai muncul banyak keluhan,” lanjutnya.

Sayangnya, masyarakat tidak pernah menyadari faktor pemicu sengketa. Pemicunya, salah satunya, ekspansi perkebunan sawit. “Kalau pun dibilang bukan pemicu, tapi sebagian besar yang menjadi kebun sawit adalah daerah jelajah gajah.” Sedikitnya 29 desa yang tersebar di Bakongan Timur, Trumon, serta Sultan Daulat menjadi medan pertarungan. Di setiap desa itu, kebun sawit telah menggantikan habitat sang gajah.

KONFLIK antara gajah dengan manusia adalah pertarungan yang berat sebelah. Jika berhadapan satu lawan satu, manusia pasti kalah. Tubuh manusia tidak lebih besar dari kaki gajah. Belalai gajah yang lentur tapi perkasa dengan mudah mencampakkan manusia. Jika adu cerdik: main jerat, main racun, manusia di atas angin.

Yang pasti, tak ada yang diuntungkan. Kedua pihak sama-sama merugi.

Semenjak 2006, amuk gajah telah merenggut 6 orang; 4 meninggal dan 2 luka berat. Di pihak gajah: 3 ekor ditangkap dan beberapa gajah mungkin telah dibunuh manusia. Puluhan pondok dan rumah remuk, ratusan hektar tanaman budidaya hancur. Gajah, akhirnya, dipandang sebagai musuh masyarakat.

Pandangan itu berbalik seratus delapan puluh derajat dengan tradisi pedalaman Aceh. Gajah biasa disebut nek rauyeuk atau ‘orang besar’. Sebutan takzim itu sebanding dengan sebutan datuk buat harimau.

Dalam pusaran konflik yang kian ganas, Yayasan Leuser Internasional mencari solusi. Yayasan ini telah menampung berbagai keluhan masyarakat seawal 2005. Ikhtiar pun sudah dilakukan: bersama BKSDA Aceh dan pemerintah Aceh Selatan, YLI coba menanggulangi konflik.

Sayangnya, bentrokan tak kunjung reda. Usai diusir dengan gajah jinak dari Pusat Latihan Gajah Saree, Aceh Besar, gajah liar kembali lagi. Untuk memboyong kembali gajah jinak ke lokasi konflik butuh dana besar dengan persiapan dan perizinan yang memakan waktu. Artinya, pengusiran bersifat sementara. Akhirnya manusia dan gajah kucing-kucingan. Gajah liar ditangkap? Ini bukan solusi karena akan mengurangi populasi di alam, yang malah mendorong gajah ke jurang kepunahan. Lagipula, penangkapan gajah sudah dilarang pemerintah. Cara-cara itu tidak efektif dan temporal. Bukan solusi yang tuntas.

Lantas terbit gagasan membentuk Conservation Response Unit Trumon. "Kita membuat pertemuan di Subulussalam, Aceh Singkil dan Aceh Selatan, muncullah ide penanganan konflik gajah," Abu menuturkan. Hasilnya, mitigasi konflik menjadi program utama YLI-TFCA Sumatera. Forum diskusi merekomendasikan program berbentuk unit tanggap konservasi atau conservation response unit. Program ini untuk menanggulangi konflik dengan pengusiran dan patroli kawasan lindung dengan gajah terlatih.

"Masyarakat berharap ada CRU. Bisa dibilang masyarakat sudah resah. Dari 2006, lapor ke mana-mana tidak ada solusi yang tepat. Juga, tidak ada jalan keluar dari pemerintah kabupaten maupun BKSDA. Kalaupun ada tim yang turun, ya, hanya melihat tempatnya tanpa ada perlakuan mitigasi," jelas Abu.

Lantaran sengketa menyebar di Subulussalam, Aceh Selatan dan Aceh Singkil, lokasi CRU perlu ditentukan, yang sesuai bagi gajah. "Kita mulai survei Februari 2011 bersama BKSDA. Kira-kira survei selama enam bulan. Ada beberapa kriteria dari BKSDA dan tim PLG Saree," jelas Abu. "Syarat penting bagi gajah adalah sumber air dan pakan. Gajah sangat butuh air; sehari-hari ia harus bertemu air. Kemudian aksesibilitas dan listrik."

Tiga lokasi calon lantas diteliti tim gabungan yang terdiri pawang gajah, BKSDA, Dinas Kehutanan, dan kepala desa setiap lokasi. Calon lokasi pertama: Koridor Satwa Trumon, Aceh Selatan. Lokasi kedua: Desa Darul Makmur; dan lokasi terakhir, bekas Pos Pemantauan Gajah di Singgersing. Kedua lokasi terakhir berada di Kecamatan Sultan Daulat, Subulussalam.

Abu menyatakan, dari tiga lokasi yang disurvei, dua di antaranya dipandang layak, yaitu Koridor Satwa Trumon dan Singgersing. "Akhirnya, kita pilih Koridor Satwa karena air berlimpah. Selain itu, kita tidak perlu sewa dan membeli lahan, karena sudah milik negara."

Hutan Koridor yang rimbun bisa



Saat peresmian CRU Trumon, para mahout dilakukan dan diberkati oleh tetua setempat. Selain demi keselamatan, hubungan mahout dan gajah diharapkan akan berfaedah bagi mitigasi konflik.

memberi tempat berlindung dan cocok buat menambatkan gajah. Koridor juga terletak di antara daerah konflik, sehingga mudah bergerak ke segala penjuru. Yang tak kalah penting, dukungan masyarakat dan pemerintah setempat. Dukungan ini sekaligus menjamin keamanan kawasan Koridor dari perambahan dan pembalakan liar.

Sebelum 2002, Koridor merupakan permukiman dan lahan pertanian warga Naca dan Ie Jernih. Pemerintah lantas membebaskan lahan Koridor. "Pembebasan lahan dengan Dana Reboisasi melalui Program Pengembangan Leuser," terang Abu.

Luas lahan yang dibebaskan 2.700 hektar. Kawasan Koridor untuk memberi

lintasan satwa liar bolak-balik: dari Bengkung ke Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Di luar Koridor, perkebunan, jalan, permukiman, dan transmigrasi, telah memecah belah jalur jelajah satwa liar.

"Koridor sebenarnya hanya areal secuil di Kawasan Ekosistem Leuser yang seluas 2,6 juta hektar. Tapi Koridor berperan penting dalam mengaitkan Taman Nasional Gunung Leuser dengan Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Idenya begitu," Abu memaparkan.

DI KORIDOR Satwa Trumon lantas didirikan basecamp CRU. Pembangunan berlangsung antara medio Agustus sampai Desember 2011. Masyarakat Naca dan Ie



KESUMAT DI UJUNG 'TYMEX'

Dendam yang membara telah menebar maut Perhatikan peristiwa 5 Juni 2012. Kala itu, dua gajah ditemukan terkapar di kebun sawit warga Jambo Dalem, Trumon Timur, Aceh Selatan.

Sebenarnya, wilayah ini tercakup dalam Kawasan Ekosistem Leuser dengan status areal penggunaan lain. Di sekitar kebun sawit tumbuh pinang, cokelat dan jagung. Kebun tak begitu terawat dan ditumbuhi sesemakan. Sejumlah pohon cokelat, jagung, serta pondok kerja dirusak gajah.

Apapun status lahan, bagi gajah itu tak bermakna apapun. Yang pasti: dua nyawa telah melayang. Sang pencabutnya: manusia yang menebar Tymex! Ini racun celeng yang dijual di Medan, Rp 800.000 per kilogram. Ada juga Tymex kemasan eceran. Mudah didapat, murah, tapi mematikan buat gajah. Masyarakat sekitar rupanya kerap meracuni gajah dengan Tymex yang ditaruh di kelapa sawit. Dendam kesumat itu tak selalu berhasil; gajah jarang menyentuh sawit yang beracun.



Sejumlah warga diduga akan membentangkan kabel listrik tegangan tinggi untuk membunuh si gajah. Dan, kali ini dua gajah ketiban sial; bangkainya terpisah jarak sekira 15 meter. Bangkai pertama tinggal tengkorak dan tulang-belulang. Ia mungkin mati sebulan sebelumnya. Gadingnya sirna, dipenggal dengan senjata tajam. Tak seorang pun mengaku mencuri gading. Bangkai kedua, tubuh gajah masih utuh. Tubuhnya mengembung dan membusuk, dikerubuti belatung dan lalat. Lagi-lagi, gadingnya lenyap. Gajah apes ini jantan dewasa, sepanjang 2,2 meter. Ia mungkin dijemput maut beberapa hari sebelumnya. Beberapa orang sempat melihat si gajah lemah terkulai, terpuruk, lalu mati. Dua gajah terlihat menemani kawannya yang meregang nyawa. Biawak pesta pora menyantap buntang sang gajah. Kelompok gajah ini akan mengenang lokasi itu sebagai kuburan kerabatnya. Akankah dendam terus berputar?





Sepasang calingnya ikut menjulang saat
Nanik membuka mulutnya lebar-lebar.
Lantaran makanan bisa melukai mulut,
mahout rutin memirsa kondisi mulutnya.
Telapak kaki selalu dibersihkan untuk
mencegah tumbuhnya jamur (sebelah).
Diduga bunting, Nanik mendapatkan
perhatian khusus: USG lambung dan ususnya.
Jika bunting, Nanik adalah gajah jinak
betina yang pertama kawin dengan jantan
sekandang (atas).

Jernih menyokong pembangunan sarana CRU dengan surat dukungan yang diteken kepala desa Naca dan tuha peut Ie Jernih. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh juga memantau dan memverifikasi lokasi basecamp.

Pembangunan basecamp dilakukan secara swakelola oleh YLI untuk menggaet partisipasi masyarakat. Sistem swakelola itu muncul setelah keuchik Desa Naca melayangkan permohonan pelibatan masyarakat dalam pembangunan basecamp.

Kendati swakelola, untuk menentukan pemenang tetap melalui tender terbatas, yaitu khusus untuk tukang lokal. Mekanisme tender diserahkan kepada masyarakat. Para peminat bisa menghubungi kepala desa, yang juga akan memeriksa rancangan desain basecamp.

Lokasi basecamp merupakan bekas kilang kayu. Kawasan Koridor telah berkembang menjadi hutan muda setelah melewati proses suksesi alami selama 10 tahun. Sekitar basecamp dibatasi dua sungai. Dari timur-barat dibatasi Sungai Trumon dan arah utara-selatan mengalir Sungai Naca. Kedua sungai memagari Koridor dengan permukiman. Di luar kedua sungai, bentang alam telah dirombak besar-besaran.

Seiring survei lokasi CRU, digelar pula penyadartahanan program mitigasi konflik gajah di Naca, Ie Jernih, dan Darul Makmur. Warga tiga desa ini menginginkan basecamp berada di desanya. Dalam pertemuan sosialisasi, tim memaparkan hasil survei lokasi

Tak jauh dari jalan raya antara Subulussalam dengan Tapaktuan, sebuah pabrik pengolahan sawit mengepulkan asap. Di sekitar kawasan ini, gajah sering bentrok dengan manusia



CRU kepada masyarakat. Selain itu, juga dijelaskan tujuan, sistem, teknis dan mekanisme program CRU dalam mengatasi konflik. Forum ini sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat di sekitar Koridor Satwa dan daerah konflik.

Aktivitas gajah dan mahout di basecamp didukung dengan berbagai sarana: barak berisi lima kamar, dua kamar mandi, dan teras. Setiap kamar tidur dilengkapi dua kasur, meja kerja dan lemari pakaian. Untuk memasak ada dapur, dan aula untuk pertemuan. Pasokan listrik bersumber dari PLN, dengan tiga lampu sorot 500 watt. Sementara bagi gajah, terdapat lima jangkar penambatan di tenggara basecamp.



Malam-malam, gajah merusak kebun jagung. Padahal, dua pekan lagi panen.

KRAK... BEDEBUM! Kaki Bayu menginjak batang pohon yang roboh melintang di jalur patroli. Pohon kering sebesar paha orang dewasa itu patah seketika. Bagi Bayu, mematahkan kayu itu seringan menginjak kerupuk. Siang itu, Bayu dan Nanik berpatroli, menembus hutan Koridor.

Tubuhnya yang besar menerebas segala rintangan. Kulit Bayu dan Nanik yang tebal bergesekan dengan ranting dan dahan tajam. Kakinya menyeret semua tumbuhan yang menjalar. Lalat-lalat menusuki kulitnya, meninggalkan setitik darah segar. Goresan ranting membekas di tubuh Nanik dan Bayu.

Tanpa pelana, Koko bertengger di tengkuk Nanik. Pinggang lelaki berkulit

gelap ini meliuk-liuk mengikuti gerak langkah Nanik. "Bergerak bebas, jangan kaku, biar tidak jatuh," tuturnya.

Untuk menuntun arah jalan, Koko cukup mengibaskan telinga gajah betina itu. Belok ke kiri, Koko mengibaskan telinga kanan Nanik. Belok ke kanan: goyang telinga kiri. Rupanya, saat dikibaskan, telinga yang lebar akan menutupi mata Nanik yang mungil.

Ia akan berjalan ke arah yang tidak terhalangi telinga. "Karena telinganya lebar, gajah sebenarnya tidak tahu punya tubuh besar," imbuhan Koko. "Kalau tahu, ia pasti melawan sama mahout. Kita takut juga."

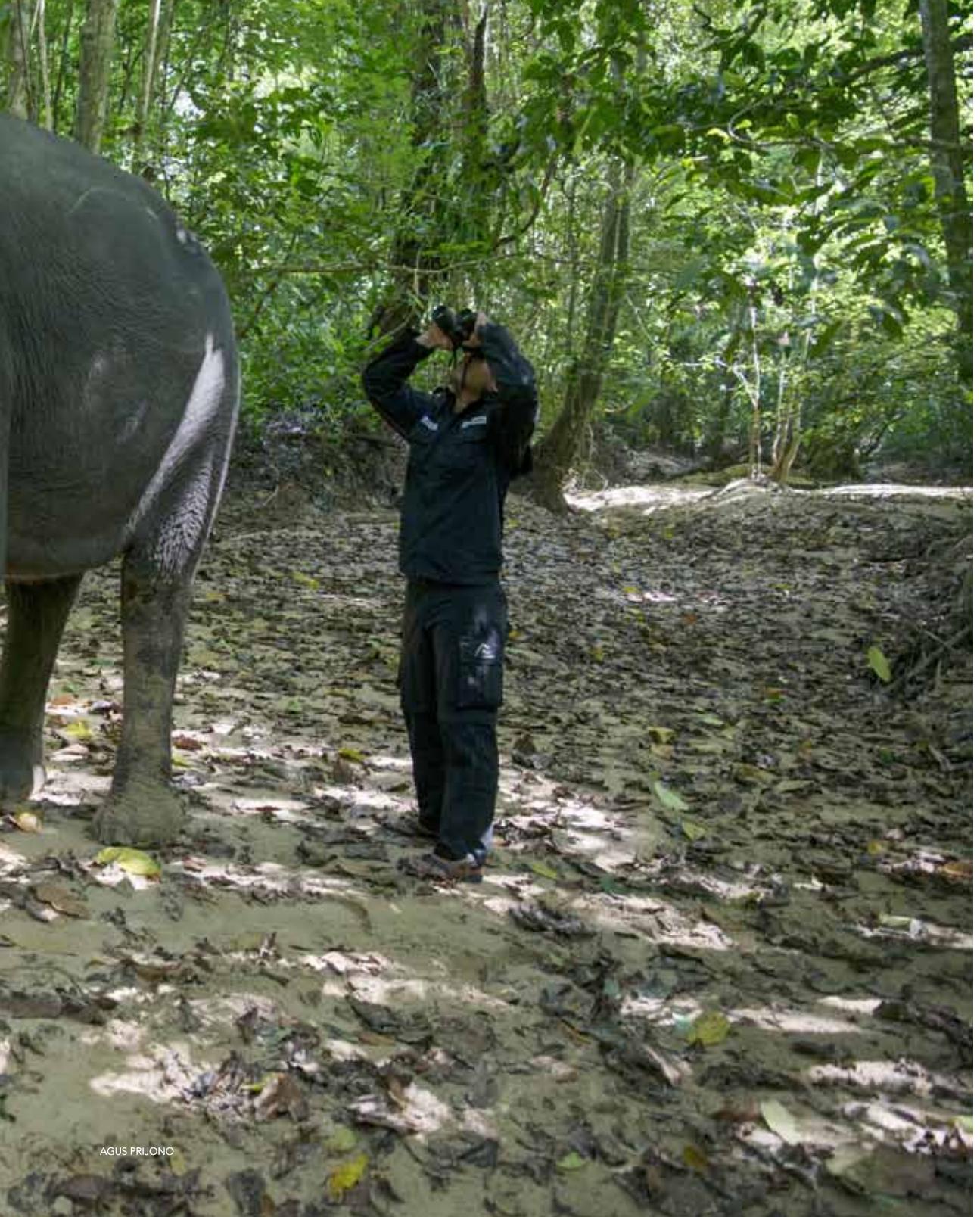
Sewaktu mengendalikan gajah, kaki sratii berada di belakang telinga. "Alat



PATROLI BERSAMA

Di bawah hutan yang padat, Nanik dan Fransisco Sirait berhenti sejenak. Sementara Fransisco mengamati satwa liar, Nanik terus saja memamah biak. Kawasan ini sering disebut pasir putih, karena pasir sungai yang berwarna terang.

160,3 *kilometer jarak tempuh patroli pada 2014*

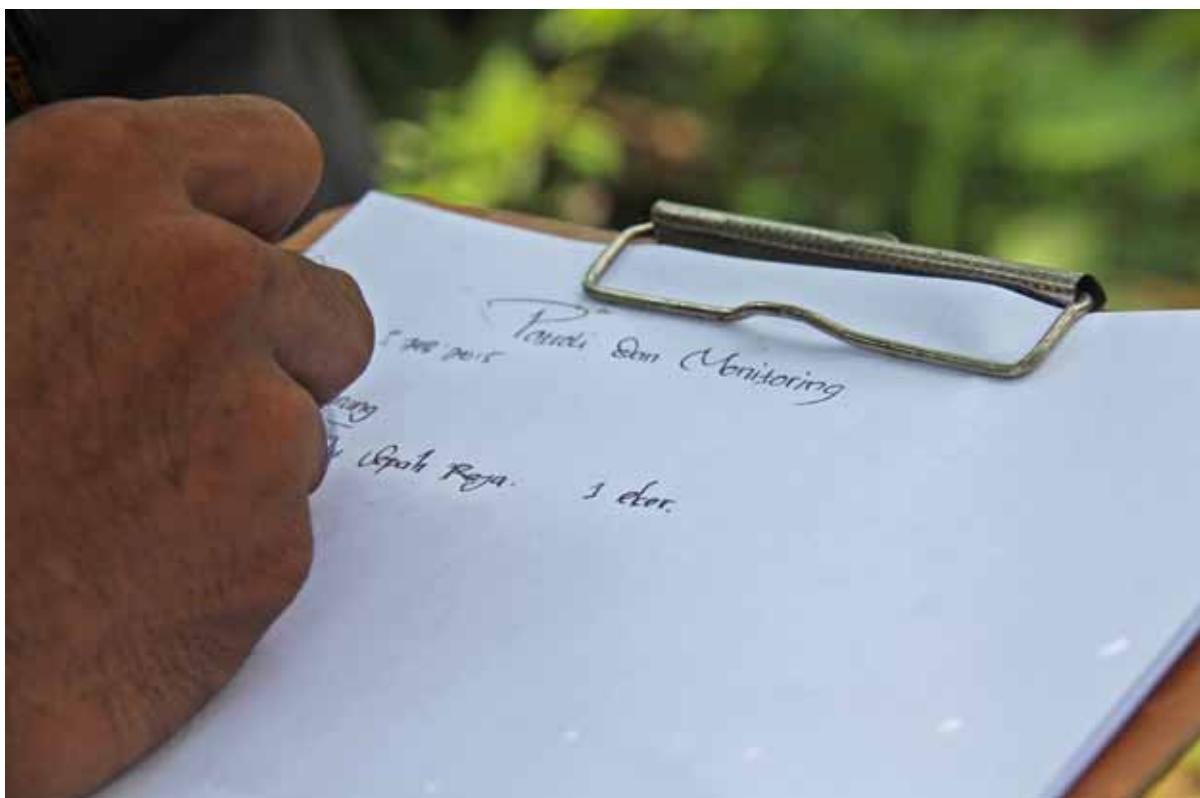




Bersama warga sekitar, CRU Trumon rutin menggelar patroli di Koridor Satwa. Selain mengamankan kawasan, patroli juga untuk memantau kekayaan hayati.

Kawasan hutan ini menjadi jalan lintas satwa liar dari utara ke selatan: dari Taman Nasional Gunung Leuser ke Suaka Margasatwa Rawa Singkil, dan sebaliknya.

Kawasan secil ini berperan besar menautkan Kawasan Ekosistem Leuser yang terpecah-belah oleh populasi manusia. Peran krusial yang belum banyak dipahami.



Meliuk liat bagaikan seekor ular, belalai gajah amat kuat dan lentur. Ujung belalai adalah indera pemindai yang tajam dan peka. Nanik sedang mencumbui batang pohon beringin yang tumbuh meraksasa di Koridor Satwa.

*Sejinak-jinaknya gajah,
ia tetap memendam
naluri liarnya.*

kemudi gajah ada di telinganya. Kita juga aman agar tidak terjatuh ke depan, karena kaki tertahan daun telinga. Telinga itu stir gajah untuk ke kanan, ke kiri.”

Untuk menghentikan jalannya si liman, srahi cukup menjepitkan kedua kaki di leher gajah. “Kalau lari, kita goyang kedua kaki. Bila jalan lurus juga begitu, tapi goyangan tidak terlalu keras.”

Gajah memiliki indra pemindai di ujung belalainya. Meski sang pawang menghendaki jalan lurus, namun bila medan tak aman, gajah akan berhenti. Suatu kali, Koko memerintahkan Nanik turun ke sungai yang menghadang di depannya. Sesemakan tumbuh rimbun di tebing sungai. Belalai Nanik melambai-lambai, memindai medan. Nanik berhenti. Ia enggan meneruskan perjalanan. “Ia tahu, kalau terus bisa terperosok.”

Patroli gajah ini untuk pengamanan dan perlindungan hutan Koridor. Ada patroli rutin; ada patroli khusus saat genting saat ada pembalakan liar, perambahan dan perburuan satwa. “Patroli lebih mengarah ke kawasan Koridor, dengan menjelajahi sepanjang batas sungai. Terkadang, kita mengajak gajah untuk menembus medan yang sulit dalam survei biodiversitas,” ungkap Koko

Aktivitas patroli juga melibatkan warga sekitar. “Dalam sebulan 10 hari patroli. Kita melibatkan 10 orang: lima dari Naca, lima dari Ie Jernih. Yang utama, patroli di dalam Koridor Satwa. Kita survei apakah ada perubahan, ada yang aneh, dan semua biodiversitas,” jelas Hera Sumitra, seorang warga Naca.



AGUS PRIJONO



Ini sekelumit kemelut sengketa di kampung-kampung selama Juni – Agustus 2012. Gajah punya kebiasaan berjalan sambil melahap apa saja yang disukainya. Perilaku ini tentu tak menyenangkan bagi petani dan pekebun. Bersama masyarakat, tim CRU Trumon memantau, menghalau dan meredakan konflik. Tim juga memasyarakatkan peranti pengusir gajah liar yang disediakan CRU Trumon. Peranti itu sebagai langkah awal meredakan konflik. Alat pengusir diberikan gratis sesuai kebutuhan: meriam paralon, karbit, senter halogen dan mercon.

Saat magrib, dua-tiga gajah menggerayangi areal pertanian. Mereka masuk dari kebun Idris menuju kawasan sekitarnya. Mereka balik ke hutan kala subuh. Jagung, pisang, cokelat dan kelapa sawit muda porak poranda.

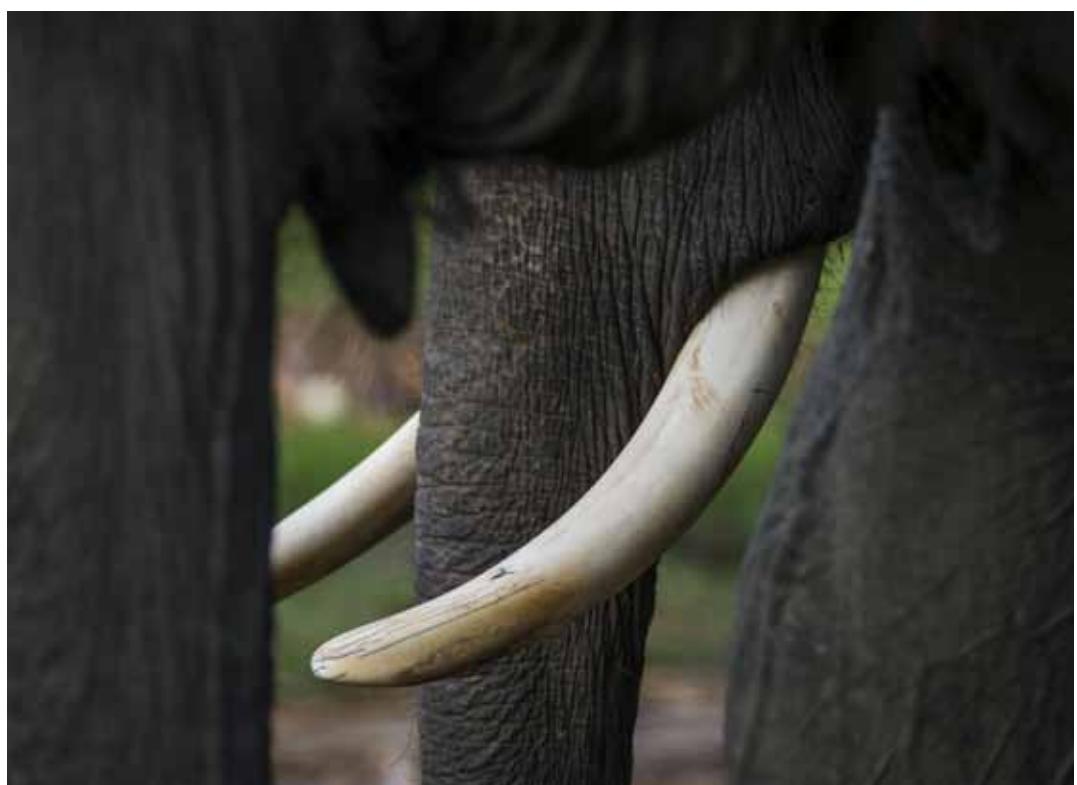
Ada yang rombongan 9 gajah, ada yang sendirian. Gajah masuk dari utara, dari hutan bekas PT Hargas, menuju timur ke kebun sawit PT Asdal. Meski hanya melintas, para gajah rupanya sambil memakan tanaman. Cokelat, cabe dan satu pondok remuk.



Sengketa membara sejak akhir 2009, dan telah merenggut 4 orang. Medan konflik terjadi di Alue Keujereun, Kampung Sawah, Lawe Melang, Kampung Sawah, Kampung Padang dan Pulo Air. Puluhan hektare tanaman budidaya lebur. Gajah melintasi tepi Sungai Kluet, dari Alue Keujeureun sampai Lawe Melang. Gajah terpaksa merangsek ke kebun, karena topografi di kiri-kanan sungai sangat terjal. Lima desa telah membentuk kelompok pengusir gajah. Upaya itu belum berhasil, karena belum terkoordinasi dan medan yang sulit.

Dari Koridor Satwa Trumon, dua gajah liar masuk kebun warga. Mereka melintas ke utara menuju kawasan hutan. Sambil memintas, gajah menyantap dan merusak pisang, tebu, kelapa sawit dan nangka.

Dua gajah masuk dari Jambo Dalem, menuju Ie Jernih dan Koridor Satwa. Gajah diduga hanya lewat untuk menuju Koridor Satwa dan kawasan hutan di sisi utara Aceh Selatan. Tanaman yang dilahap gajah: jagung, cokelat, pinang.



Tak ada gading yang tak retak. Alat pertahanan gajah ini diburu manusia, lalu dijual di pasar gelap. Hanya manusia yang mampu melumpuhkan senjata pamungkas ini dengan cara licik. Gading hanya dimiliki pejantan, sementara betina punya caling.

Kendati sebagian kawasannya berupa hutan sekunder, Koridor Satwa memendam berbagai spesies tumbuhan dan satwa. “Ada orangutan, cacing raksasa dan kodok raksasa. Kami juga baru menemukan burung trogon, warnanya indah,” lanjut Hera yang rutin turut serta berpatroli.

Memasuki hutan yang rimbun dengan pohon yang rapat, Koko menunggu tanda-tanda kehidupan primata. “Kita belum beruntung. Biasanya ada siamang di hutan ini.” Jauh di ujung tajuk pohon, lelaki berbadan dempak itu melihat sarang orangutan. Rimbunnya tajuk menyamarkan sarang yang kosong itu.

Orangutan sumatera (*Pongo abelii*) adalah salah satu mamalia besar utama di Koridor Satwa. Orangutan ditemani primata lain: kedih, siamang, kera ekor panjang, dan beruk. Pada rumpang hutan yang terbuka, burung srigunting terbang ke sana-ke mari, mengikuti langkah maju Bayu dan Nanik.

Hari itu, tidak banyak perjumpaan dengan satwa liar. Namun Koridor Satwa telah menautkan keping-keping habitat dalam lansekap Kawasan Ekosistem Leuser.

“Gajah liar tidak melintasi Koridor, karena di selatan ada rawa-rawa di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Gajah memang tidak menjelajahi rawa-rawa. Tetapi, untuk beberapa jenis mamalia, seperti harimau dan primata, ada pergerakan dari utara ke selatan. Kalau burung bisa kita lihat pergerakannya pada pagi hari, dari utara ke selatan atau sebaliknya,”

ungkap Abu.

BASECAMP CRU Trumon berada di antara wilayah rawan konflik gajah dan manusia. Kendati sudah berdiam di CRU, Tuah, Bayu, Nanik dan Siska belum pernah turun ke titik konflik.

“Belum pernah turun ke lokasi konflik,” ucap Koko. Jarak lokasi konflik menjadi kendala utama bagi pergerakan gajah terlatih. Untuk memboyong gajah, Abu menyatakan, perlu dana, logistik dan persiapan yang matang.

Selama ini, untuk meredakan sengketa, cukup para mahout yang turun ke lapangan dengan membawa perangkat pengusir gajah liar. “Kita belum perlu menurunkan gajah jinak karena mahout sudah bisa menghalau gajah liar,” ungkap Koko.

Pertarungan terakhir meletup sekitar April 2015 di Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Subulussalam. Sebelum menanggulangi konflik, unit akan mengirim anggotanya mengecek kebenaran berita bersama informan, masyarakat sekitar dan aparat desa.

“Pertama, kita cek apakah benar yang masuk adalah gajah,” Koko menjelaskan. “Dari bekas tapaknya, mungkin ada tiga gajah yang masuk ke permukiman Namo Buaya. Satu induk, satu remaja dan satu anak. Mereka masuk permukiman, tapi kami baru tahu setelah empat hari.” Hasil pengecekan akan menentukan langkah selanjutnya: apakah perlu gajah jinak untuk pengusiran, atau cukup mahout saja.



Relasi antara satri atau mahout dengan gajah nyaris tak berbatas waktu. Keseharian mereka diisi dengan berbagai aktivitas untuk siap menghadapi suasana genting. Setiap mahout dituntut untuk memahami watak gajah yang didampinginya. Sejinak-jinaknya gajah, satwa raksasa ini tetap menyimpan sisi liarnya.

Lantas bagaimana bila beradu muka dengan satwa tangguh ini?

“Gajah tidak menyukai suara keras. Kita boleh meletuskan mercon dengan tetap menjaga jarak aman, sekitar 50 meter. Karena, terkadang ada gajah yang tidak takut. Yang penting, saat gajah berbalik, kita bisa menyelamatkan diri.”

Tetapi, sebelum mengusir, Koko menambahkan, mesti diamati lokasi gajah, kampung dan kebun. Pengamatan ini untuk memastikan medan pengusiran aman dan tidak menghalangi gerak gajah. “Jangan sampai gajah malah kembali ke kampung atau kebun.”

Ada dua cara penggiringan gajah liar. Pertama, pengusiran rutin di sekitar wilayah Trumon yang cukup dekat

dengan basecamp. Kedua, pengusiran khusus di luar Trumon, seperti Trumon Timur, Bakongan, dan Kluet Tengah, Sultan Daulat dan Simpang Kiri.

Kawasan rawan konflik itu memang lumayan jauh dari basecamp, sehingga gajah dan mahout perlu menginap. Pengusiran khusus ini perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

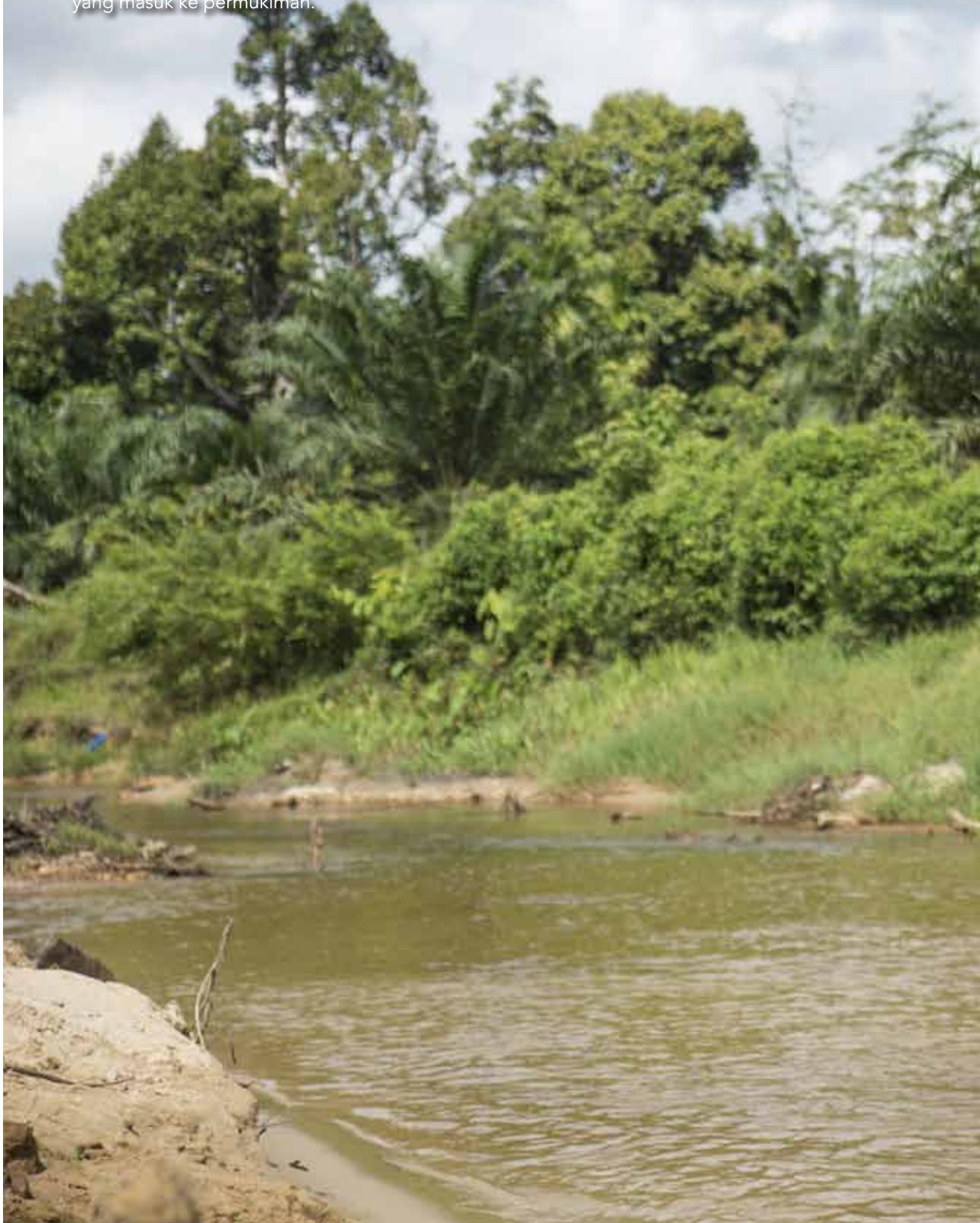
Setakat ini, pengusiran gajah liar cukup dengan kehadiran mahout yang dibantu masyarakat. “Ternyata hanya dengan mahout bisa selesai konfliknya. Kecuali, kalau gajah liar tidak mau keluar, kita baru menurunkan gajah jinak,” terang Koko.

MAHOUT DAN GAJAH adalah dua



SANG JAGOAN

Tuah selalu berlatih menjulangkan gadingnya untuk menumbuhkan keberanian. Sewaktu-waktu pecah bentrok, ia akan siap mengusir gajah liar yang masuk ke permukiman.





60 temuan aktivitas manusia saat patroli pada 2014

Seorang anak melompat girang menyaksikan gajah-gajah mandi. Tempat pemandian gajah ini tepat di bawah jembatan jalan raya ke Tapaktuan. Aktivitas CRU menyemarakkan suasana Aceh Selatan yang masih jarang lokasi wisata alam.

spesies yang menjalin persekutuan. Koko menjelaskan, masyarakat Aceh sebenarnya menghormati satwa berbelalai itu.

Masyarakat pedalaman Aceh enggan menyebut gajah dengan sembarang. “Kalau kita menyebut dengan sok, gajah biasanya datang tak terduga. Artinya, kita harus menghormati gajah agar tidak datang ke permukiman,” papar Koko. “Gajah disebut nek rauseuk yang berarti orang besar yang dihormati.”

Sayangnya, kini satwa jumbo ini menyandang sebutan miring sebagai hama. Gajah tak lagi dihormati. Manusia, orangutan, harimau, dan gajah, punya sedikit kemiripan: sama-sama mendiami dataran rendah. Lanskap dataran rendah memang berlimpah sumberdaya, pakan, air, dan tempat berlindung.

Semakin tinggi lokasi, pakan makin menyusut. “Daerah-daerah konflik adalah dataran rendah yang datar. Ini tempat manusia dan gajah. Gajah tidak akan ke dataran tinggi karena pasokan pakan berkurang.”

Sialnya, manusia cepat beranak-pinak, lalu merombak hutan. Daerah jelajah gajah porak-poranda. Aceh Selatan dan Subulussalam dikenal sebagai daerah sebaran gajah sejak dahulu kala. “Gajah mendatangi wilayah yang sama dengan selang waktu tertentu. Ia pasti akan berhadapan dengan manusia yang telah membuka wilayah jelajahnya,” ungkap Abu.

Gajah adalah satwa dengan ingatan tajam. Saat kembali menyambangi daerah jelajahnya, ia berharap mendapatkan

pakan. “Jika pakan tidak ada, gajah akan masuk permukiman. Ketika makan, diusir masyarakat. Sama seperti manusia, sedang makan diganggu, ya, marah,” Koko mengimbuhkan.

Gajah menggerayangi kampung karena stok pakan di habitatnya telah berkurang. “Saat stok alami habis, gajah mencari pakan di kebun masyarakat,” lanjut Koko. “Sayangnya, masyarakat menanam tumbuhan yang disukai gajah, seperti tebu, pisang.”

Pendek kata, manusia butuh lahan, gajah butuh habitat. Inilah sejatinya pemicu pertikaian. Sebenarnya gajah tidak bakal datang lagi ke kebun. Masalahnya, warga menanam tumbuhan yang disukai gajah. “Kita juga sering sosialisasi agar masyarakat memilih tanaman yang tidak disukai gajah, tapi bernilai jual, semisal kopi.”

Sengketa yang berlarut-larut membuat masyarakat trauma. Dalam wawasan Koko, rasa takut itu yang harus diubah. “Kalau ingin gajah tidak masuk kampung, habitatnya jangan diganggu. Sudah merusak habitatnya, menanam tumbuhan kesukaan gajah pula,” sergahnya.

Pendulum konflik agaknya berayun di antara kepentingan manusia dan gajah. Dua kutub inilah yang bersatu di Conservation Response Unit Trumon. Persekutuan mahout dan gajah mencerminkan hubungan harmonis *Homo sapiens* dengan *Elephas maximus sumatranaus*.***



AGUS PRIJONO



KEMBARA RIMBA

Bayu menjelajahi jalur patroli, menembus rimba redup. Kakinya yang kokoh menerjang segala semak, tubuhnya bergesekan dengan ranting-ranting tajam. Bekas goresan menyemburat di kulitnya yang keriput.

2.700 hektare areal koridor untuk lintasan satwa



MANUSIA - GAJAH

Dua manusia dan dua gajah hidup guyub di Sungai Naca yang dangkal. Saling memahami, saling mengisi, untuk memutus pusaran dendam antara manusia dengan gajah.



AGUS PRIJONO

Mengurai



PENANDA SUAKA

Beginilah semestinya: Suaka Margasatwa Rawa Singkil mewujud di lapangan. Pal beton ini menjadi simbol bagi keseriusan Rawa Singkil dalam mengayomi keanekaragaman hayati Sumatera. Tentu saja, tanda batas mesti diimbangi dengan upaya sosialisasi kepada masyarakat sekitar suaka.

Bahara Sejarah

Selama 15 tahun lebih, jatidiri Cuaka Margasatwa Rawa Singkil antara ada dan tiada. Masih adakah asa bagi pengelolaan kawasan loh jinawi ini?





PERADABAN MANUSIA

Pelestarian Rawa Singkil tidak hanya demi kelanggengan margasatwa yang hidup di dalamnya. Pada akhirnya, manfaat jasa lingkungannya akan bermuara pada kehidupan manusia. Jasa alam yang tak kasat mata memang kerap dikorbankan bagi kepentingan ekonomi sesaat.



AGUS PRIJONO

Sungai Soraya mengalir pelan. Airnya yang cokelat berpusar tenang. Kubah-kubah arus bergolak dari kedalaman sungai. Setelah terpanggang matahari, di kedai di tepi sungai, Nizar Tarigan rehat bersama warga Desa Oboh. Mereka duduk lesehan.

Tubuh Nizar seolah memuai. Keringatnya bercucuran. Bajunya kuyup. Dalam naungan pohon mangga raksasa, warung itu meruapkan hawa sejuk. Tajuk pohon semarak dengan buah mangga nan ranum. Minuman dingin dan kopi tersaji di lantai kedai. Siang itu, koordinator tata batas YLI-TFCA itu baru saja keluar dari Suaka Margasatwa Rawa Singkil.

Perjalanan menuju suaka bagaikan menjamah neraka. Selepas Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, Nizar melewati kebun sawit yang sedang dibuka. Di empat penjuru mata angin, segalanya gosong. “Land clearing paling murah, ya, dengan cara dibakar,” jelas Nizar. Api sengaja disulut untuk membersihkan lahan dari sisa pepohonan. Tanah gambut mengering. Kanal-kanal berair hitam.

Sinar matahari mengelantang hamparan gambut. Tiada pohon untuk berteduh. Segalanya menghitam.

Langit biru yang teduh kontras dengan permukaan bumi yang hangus.

Nyaris tak ada sisa kehidupan di lahan sawit itu. Pada sebuah kanal yang membatasi suaka, Nizar menatap air hitam yang mengucur deras. Lapisan gambut menyamarkan asal aliran air. “Air itu mungkin dari suaka margasatwa,” imbuah Nizar. Air memang mengucur dari tepi kanal yang bersisian langsung dengan suaka.

“Tujuan kanal untuk mengosongkan air di dalam gambut dan memadatkan tanah sehingga sawit bisa berdiri hidup.” Kendati jaringan kanal untuk mengeringkan tanah kebun, namun dampaknya bisa merembet ke suaka.

Tanah gambut bagaikan spon: jika diperas, air akan cepat lepas. Daya kapiler menyeret seluruh air di dalam gambut masuk ke kanal. Pelan-pelan tanah penuh karbon ini mengering. Lantas gambut terurai, melepas karbon ke atmosfer.



Aktivitas menata batas suaka melibatkan banyak pihak. Selain Yayasan Leuser Internasional, juga ada kontraktor yang melakukan pekerjaan di lapangan. Tak ketinggalan pula personel dari BKSDA Aceh yang mengelola suaka. Dalam panitia tata batas, bergabung unsur pemerintah daerah, camat, kepala desa dan tokoh masyarakat.

Terjadilah petaka yang tak kasatmata. Gambut yang terurai akan membongkar deposit karbon yang bisa memicu pemanasan global. Ada juga petaka lain yang tiada terperi. Kala gambut dibakar, Nizar menuturkan, di bawah tanah, bara api bisa menjalar ke areal suaka.

“Kita tak pernah tahu ke mana api menjalar. Tahu-tahu pohon-pohon mati karena akarnya terbakar di dalam tanah. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kebun milik perseorangan. Mana dia berpikir soal lingkungan...,” sergahnya.

Runyamnya, tidak ada kawasan penyangga yang membentengi suaka dengan lahan sekelilingnya. Batas yang gaib memperburuk keadaan: siapa saja bisa seenaknya membabati pinggiran

suaka. Eksistensi Suaka Margasatwa Rawa Singkil di dunia nyata bagaikan ada dan tiada.

Kebun sawit itu milik seorang pemodal dari Medan, Sumatera Utara. Semula seluruh lahan itu milik warga setempat. “Tanah lalu dijual kepada seorang haji dari Medan. Luasnya sekitar 60 hektar. Tapi saya pikir, luasnya lebih dari 60 hektar,” tutur Nizar yang sempat mengulik informasi dari warga.

Dia pantas curiga. Kala pemasangan pal sementara, Nizar pernah melewati lahan itu. Jalan kebun membelah lahan sawit menjadi dua bagian. Nizar ingat, lahan di sisi kiri jalan telah lama dibuka. Namun di sisi kanan, dahulu masih rimbun, dan kini dibuka. Pohon-pohnnya belum

Pada akhir pekan, para pembalak libur dari aktivitas menebangi hutan Rawa Singkil. Seluruh alat balak tercecer di tepi Sungai Soraya. Pengelola suaka seolah menutup mata. Kenyataan ini menegaskan mendesaknya pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Rawa Singkil.

*Selama penataan batas,
bentrok kepentingan
begitu terasa.*

lama ditebangi, lalu dibakar.

“Lahan di kanan jalan itu baru dibuka. Beberapa meter dari kanal, kami pernah memasang pal sementara,” ujarnya. “Saya menduga kebun masuk kawasan suaka margasatwa.” Bimbang membayang di wajah Nizar.

Dia paham betul modus perambahan suaka. Setelah merenggut kawasan suaka, perambah lalu menjual lahan ke pengusaha sawit. Itu bukan akhir cerita. Setelah tanahnya laku, perambah mencari lagi lahan suaka di sudut lain. Dirambah lagi, kemudian dijual lagi.

Untuk mencapai suaka, dari lahan yang mengepulkan asap itu, Nizar berjalan tertatih di atas gambut yang gosong. Kaki bisa terperosok atau tersandung akar dan dahan yang mencuat. Kayu-kayu yang mengarang meninggalkan bekas hitam di ujung celana dan sepatu. Di seberang kanal, yang berdekatan sisi luar suaka, pohon-pohon tumbang berserakan. Hutan Rawa Singkil di garis perbatasan suaka turut porak-poranda.

Sepotong jalur pembalak liar menuntun Nizar masuk ke kawasan suaka. Jalur ini rupanya telah lama digunakan pembalak untuk menyarad kayu sampai tepi Sungai Soraya. Pembalakan liar hanya menyisakan pohon-pohon kecil.

Makin masuk suaka, rumpang hutan makin lebar dan membelah kerumunan vegetasi. Hingga di ujung sana, tajuk nampak bolong memanjang. Jalur balak telah jauh menusuk suaka.

Gelondongan kayu yang bagian dalamnya keropos dibiarkan tergeletak



AGUS PRIJONO



Konservasi perlu wawasan futuristik: pengelolaan dituntun oleh tanggung jawab masa depan.

di tanah. Pembalak rupanya tak mau repot membawa kayu keropos. Jejak-jejak pembalakan liar terlihat dari tonggak-tonggak kayu. Dedaunan berserakan di mana-mana.

Tajuk hutan yang terbuka menguapkan air rawa; satu-dua jenis kantong semar mengering layu. Vegetasi rawa-rawa merana di atas tanah yang mengering.

TRAGEDI di Oboh itu baru satu titik di sepanjang 233 kilometer lingkar batas suaka margasatwa. Bentangan batas suaka di Kota Subulussalam saja 43,6 km. Di sekitar Oboh, YLI mencatat dua titik perambahan yang merenggut sekira 14 hektar hutan suaka.

(Ini hasil survei pada 2013 lalu. Pada 2015, keadaan di lapangan telah jauh

berbeda. Perambah dan pembalak setiap hari masih mengeroyok suaka. Mereka libur saat akhir pekan.)

Pada lokasi pertama, perambah telah mencaplok lahan suaka seluas 4,7 hektar, dan telah ditanami kelapa sawit. Perambahan acap bermula dari dalam suaka, lantas bergerak ke luar. Modus ini dilakukan agar perambah lain tidak menyerobot lahan. Alhasil, lahan rambahan menjadi lebih luas.

Lokasi kedua merupakan warisan lama. Warga telah membuka lahan suaka semenjak perusahaan hutan PT Lembah Bhakti masih aktif. Luas areal yang dirambah mencapai 10 hektar. Dahulu, warga menanam cokelat, durian, karet dan kelapa sawit. Berbagai tanaman itu kini

Sepotong pal batas sementara di wilayah Jempol, Runding, Subulussalam, gosong tersengat api. Di wilayah ini, sawit muda tumbuh merana di antara rapatnya ilalang. Jejak-jejak kekayaan hutan suaka sudah tak nampak lagi.

berumur 15-30 tahun. Kendati saat konflik Aceh lokasi ini sempat ditinggalkan, saat ini sejumlah orang masih memaneni hasil tanaman itu.

Di wilayah yang biasa disebut Jempol di Runding, perambahan juga menerabas areal suaka. Jempol meliputi empat desa: Pasar Runding, Muara Batubatu, Panglima Saman dan Binanga. Sejak konflik Aceh pada 2000, warga sudah merambah kawasan suaka dari sisi Jempol.

Saat itu, pemerintah Aceh Singkil membangun kompleks perumahan bagi korban konflik di Jempol. Usai konflik, pembukaan hutan makin menjadi-jadi. Sejumlah oknum pengusaha, pejabat, mantan pejabat, politikus dan tokoh lokal kian gencar mengacak-acak hutan suaka. Perambahan dan pembalakan liar masih berlanjut sampai saat ini.

Di kawasan Jempol itu, Nizar mengisahkan, pemasangan pal sementara sejatinya sudah rampung pada 2014 sesuai peta kawasan tahun 2000. Hanya saja, kerja keras itu gugur karena luas dan bentuk suaka berubah berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 865 tahun 2014. Pada Juni 2015, tim telah memasang patok sepanjang 4,5 km. Pemasangan ini seturut trayek batas surat keputusan menteri tersebut. Jika tak ada aral, pemancangan pal permanen akan dilakukan pada Agustus 2015.

Tak tenang melihat gerak maju perambahan di Oboh, Nizar bersicepat memasang tanda batas permanen di seputar kebun sawit itu. Pada pekan kedua Juni 2015, pemasangan pal digelar

di Oboh dan sekitarnya. Pal beton telah siap di rumah kepala desa Oboh. Nizar menuturkan pemasangan pal di sekitar Oboh nyaris tanpa masalah. “Kecuali, di lahan land clearing itu. Di situ, tim seharusnya menempatkan dua pal, tepatnya di sisi kanan kanal.”

Namun, pemilik kebun sawit melarang. “Dan, ketika dikonfirmasi kepada kepala desa Oboh, agar menyaksikan pemasangan pal, dia tidak pernah hadir di lapangan.” Perkara ini dirembug di pertemuan Panitia Tata Batas Subulussalam. Di forum ini, panitia akan membahas solusi dari semua persoalan di lapangan. Kepala desa Oboh, yang desanya berdampingan dengan suaka, turut menjadi anggota panitia.

FORUM PANITIA tata batas memberi ruang untuk mengurai sengketa lahan di sekeliling suaka. Setiap aktivitas di lapangan akan dibuat berita acaranya di pertemuan panitia tata batas. “Berita acara adalah kesepakatan panitia tentang setiap kegiatan yang telah selesai di lapangan. Apakah ada masalah yang perlu diluruskan atau diselesaikan. Berita acara itu harus disetujui semua anggota panitia,” terang Nizar. Berita acara ini sebagai dasar untuk melanjutkan proses tata batas selanjutnya.

Forum panitia memberikan ruang diskusi untuk mencari dan membuka solusi. Di wilayah Kota Subulussalam, sebenarnya panitia telah memberi lampu hijau untuk pemasangan pal definitif dan rambu-rambu. Patok permanen



Tata batas sangat penting untuk menjamin kepastian pengelolaan KPHK.

bisa dipasang di batas suaka yang steril sengketa: mulai dari Desa Runding, Oboh sampai Sepang. Ini dinamika panitia tata batas di Subulussalam.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Selatan yang mengemuka justru tuntutan pemerintah setempat yang meminta sebagian lahan suaka margasatwa untuk dijadikan areal penggunaan lain (APL). Tuntutan ini buat memenuhi kebutuhan lahan warga di sekitar suaka. Lahan yang dituntut bupati membentang dari Trumon sampai perbatasan Kabupaten Aceh Singkil. Panjangnya sekitar 40 km, dan selebar 1 – 2 km dari batas luar seturut peta suaka tahun 2000.

Bupati juga menolak pemasangan pal di areal yang berbatasan dengan lahan

tukar guling PT Barumun Agro Sentosa. Penolakan disebabkan bupati Aceh selatan memandang tukar-menukar kawasan hutan itu merugikan pemerintah daerah dan masyarakat. Kawasan budidaya Aceh Selatan memang hanya sekitar 26 persen dari seluruh wilayah kabupaten; sisanya adalah kawasan hutan. Sebagian lahan tukar guling, seluas 5.430 hektar, dimasukkan dalam suaka, sehingga luas Suaka Margasatwa Rawa Singkil bertambah.

Keputusan Menteri Kehutanan menunjuk lokasi tukar guling sebenarnya berdasarkan rekomendasi Bupati Aceh Selatan saat dipegang Husin Yusuf dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Kini, setelah keduanya lengser, Aceh Selatan



Sungai Soraya dan suaka menjadi urat nadi kehidupan manusia di sepanjang daerah aliran sungai. Sebagai satu kesatuan, Sungai Soraya dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil tak bisa dipisahkan satu sama lain. Nilai penting ini meneguhkan Rawa Singkil layak dikelola dalam satu unit KPHK.

berubah pikiran. “Aceh Selatan tidak setuju. Itulah yang membuat pemasangan sepanjang 120 km belum kelar,” ungkap Nizar.

Ringkasnya, pemerintah Aceh Selatan ingin mengembalikan bentuk dan luas suaka sesuai peta kawasan tahun 2000—minus lahan tukar guling. Kini muncul dilema baru: Gerak maju tim sangat tergantung pada kepastian tukar-menukar kawasan hutan itu.

“Dari target tahap pertama 120 km, yang sudah ditapal batas 97 km. Sisanya, menunggu kepastian tukar guling kawasan. Pemerintah daerah Aceh Selatan belum mengizinkan lahan yang ditukar guling dipasangi pal,” Nizar menguraikan.

Untuk tata batas suaka di Kabupaten

Aceh Singkil, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Aceh telah menyiapkan konsep trayek batas. Sejak Juni 2014, tim tata batas telah berkoordinasi dengan pemerintah Aceh Singkil. Kendati bupati Aceh Singkil telah meminta sekretaris daerah untuk menyiapkan pertemuan, rapat panitia tata batas belum juga terlaksana.

“Itu mungkin karena kesibukan instansi di lingkup sekretaris daerah Aceh Singkil,” terang Nizar memaklumi. Sampai Juli 2015, tim telah menambah pemasangan 70 pal definitif. “Total pemasangan hingga saat ini 1.040 pal atau sepanjang 104 kilometer,” ungkap Nizar.

SUAKA MARGASATWA Rawa Singkil agaknya menanggung beban bertumpuk-tumpuk. Beban warisan masa silam belum sempat terurai, masa kini telah menuntut terlalu banyak. Konflik yang pernah mendera Aceh di masa lalu memang membuat suaka tak tersentuh penataan batas. Sayangnya, saat damai pun suaka tetap larut dalam ketidakpastian kawasan.

Kiprah penataan batas Yayasan Leuser Internasional akhirnya memikul beban sejarah. Upaya untuk menegaskan kawasan suaka membentur banyak kepentingan dan tuntutan dari pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan perusahaan sawit.

Pengelolaan Rawa Singkil juga belum sesuai harapan sebagai kawasan konservasi yang menyangga kehidupan. Dampaknya, suaka gagap merespon perkembangan zaman: jumlah penduduk makin banyak,

Upaya YLI-TFCA menata batas memikul beban sejarah.

kebutuhan lahan makin luas.

Padahal, ikhtiar konservasi mensyaratkan wawasan futuristik: pengelolaan hari ini dituntun oleh tanggung jawab masa depan. Ini bukan tentang meramal masa depan. Ini persoalan masa kini: pengelolaan yang tidak efektif dan efisien akan semakin membebani Suaka Margasatwa Rawa Singkil di masa datang.

Selama hari-hari penataan batas, bentrok kepentingan begitu terasa. Pencaplokkan lahan suaka telah lama mengendap dan dibiarkan. Lama tak tersentuh, menegaskan batas kawasan bagaikan menyibak warisan tata kelola yang runyam.

Lantas, adakah harapan bagi Rawa Singkil? Akankah tata batas bakal menjadi salah satu tonggak penting dalam pengelolaan Rawa Singkil? Atau hanya sekadar meninggalkan deretan pal beton di batas suaka?

PADA 2013, Suaka Margasatwa Rawa Singkil ditetapkan sebagai kesatuan pengelolaan hutan konservasi atau KPHK. Dengan Surat Keputusan Nomor 980, Menteri Kehutanan menetapkan Rawa Singkil sebagai KPHK seluas 102.500 hektar—betapa luas suaka ini.

Kementerian telah menetapkan 50 kesatuan pengelolaan hutan konservasi: 38 di taman nasional dan 12 kawasan konservasi non-taman nasional. Jadi, Rawa Singkil merupakan salah satu KPHK bersama 11 kawasan di luar taman



Tumbuh di lahan gambut yang lembek, pohon sawit tumbuh doyon di sebuah perkebunan dekat suaka. Tanah gambut yang asam dan miskin hara sebenarnya tidak cocok untuk lahan budidaya.

nasional.

Taman nasional telah dikelola oleh balai taman nasional, dengan pembagian zona dan wilayah kelola dari seksi hingga resor. Sementara di luar taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam, dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Perbedaan ini krusial dalam membangun kesatuan pengelolaan hutan. Pembangunan KPHK di luar taman nasional butuh standar, prosedur, kriteria dan indikator. Hingga 2019 kelak, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem—dulu PHKA—bertekad membentuk 100 kesatuan pengelolaan hutan konservasi di luar taman nasional. Capaian ini sebagai

salah satu strategi untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

Sampai Oktober 2014, dalam indikator kinerja kegiatan penetapan KPHK, terdapat pekerjaan rancang bangun, pengusulan, dan penetapan KPHK. Proses ini ditempuh melalui forum pembahasan, koordinasi dan komunikasi dengan Direktorat Jenderal. Meski begitu rinci kegiatannya, pembentukan KPHK rupanya nyaris tanpa perkembangan penting.

Meski balai taman nasional ataupun BKSDA telah mengelola kawasan konservasi, ternyata pembangunan KPHK tak semudah membalik telapak tangan. Untuk taman nasional misalnya, setakat

A wide-angle photograph capturing a vast, smoky landscape under a heavy, overcast sky. The foreground is dominated by dark, charred remains of vegetation and soil, with several tall, blackened, vertical structures standing like skeletal fingers. In the distance, a small, silhouetted figure can be seen walking across the burnt ground.

MEMERAS GAMBUT

Jaringan kanal perkebunan sawit dekat tepi suaka memeras air yang terikat di dalam gambut. Dampaknya, kubah-kubah gambut di tanah suaka turut mengering. Api yang membbara di kebun sawit juga menghanguskan sebagian vegetasi di tepian suaka.



AGUS PRIJONO





Tanah gambut hanya cocok untuk tumbuh kembang beberapa jenis tumbuhan, semisal kantong semar (kanan atas). Rawa Singkil yang menyimpan jutaan karbon merupakan jasa lingkungan yang tak ternilai harganya. Kawasan ini pantas dijuluki sebagai benteng karbon di pesisir barat Aceh. Dari permukaan tanah hingga tajuk, suaka meniupkan kehidupan flora. Lestarinya kekayaan hayati Rawa Singkil adalah amanah generasi mendatang.



Amat menakjubkan melihat suaka terhubung dengan lansekap harimau dan orangutan.

ini pembangunan KPHK hanya berupa perubahan nama dari balai menjadi unit manajemen. Bisa dibayangkan untuk BKSDA: pembangunan KPHK akan lebih rumit. Ini karena satu BKSDA mengelola sejumlah kawasan konservasi, yang terpencar-pencar dengan berbagai status, semisal cagar alam atau suaka margasatwa.

Padahal KPHK menjadi tumpuan dan harapan bagi banyak pihak dalam mengurai berbagai persoalan yang mendera kawasan konservasi. Kesatuan pengelolaan hutan dimimpikan menjadi unit pengelola profesional dan mandiri secara pendanaan.

Direktorat Jenderal telah menggodok standar, prosedur, kriteria dan

indikator rancang bangun KPHK. Alur pembentukan KPHK di luar taman nasional bisa dilakukan di pusat dan unit pelaksana teknis—BKSDA. Proses di tingkat pusat untuk menghasilkan jumlah indikatif KPHK.

Pada tahap ini, Direktorat Jenderal bakal melakukan analisis dengan memperhatikan kedekatan geografis antar-kawasan. Sementara itu, proses di BKSDA untuk mendapatkan jumlah definitif institusi kesatuan pengelolaan hutan yang dibutuhkan. Pada tataran ini, BKSDA akan memeriksa dan memperhatikan aspek ekologi kawasan dan peluang pengembangan tata kelola di masa datang.

Dengan begitu, Rawa Singkil bakal



Pal beton bertumpuk-tumpuk di samping rumah kepala desa Oboh. Sayangnya, saat pemasangan di kebun sawit yang merambah suaka, pemiliknya melarang pemasangan pal beton. Kepala desa Oboh juga tidak hadir di lapangan untuk klarifikasi pemasangan dan posisi pal definitif itu.

memasuki babak baru. Balai KSDA Aceh akan mengelola Rawa Singkil sesuai aturan pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan hutan. Amanat aturan itu mencakup aktivitas perencanaan pengelolaan, organisasi, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan. Singkat kata, aturan itu mengamanatkan BKSDA Aceh untuk mewujudkan pengelolaan di tingkat tapak.

“Sesuai Peraturan Menteri Nomor P.6 tahun 2009, ada tiga tahap pembentukan KPHK: rancang bangun, arahan pencadangan, dan penetapan wilayah,” tutur Ali Djajono, Kepala Sub-Direktorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya

Hutan.

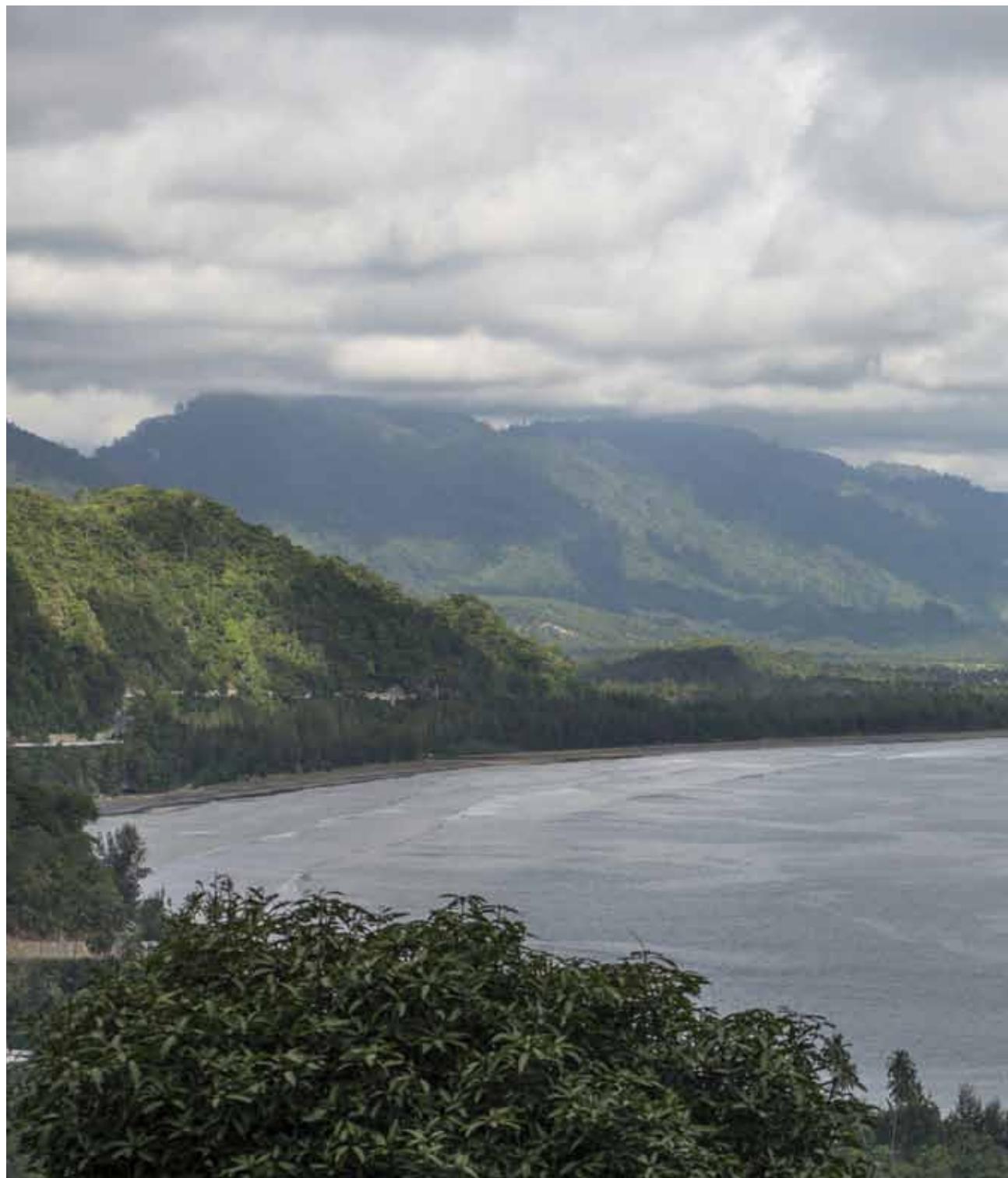
Dia menambahkan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam telah menyiapkan rancang bangun KPHK. “Sementara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memproses arahan pencadangan dan penetapannya.”

Aturan menteri itu menjabarkan bahwa rancang bangun merupakan rancangan wilayah yang memuat hasil identifikasi dan deliniasi awal areal KPHK dalam peta beserta deskripsinya. Ada empat kriteria dalam mendelineasi KPHK: kepastian wilayah kelola, kelayakan ekologi, kelayakan pengembangan kelembagaan dan peluang pemanfaatan di masa datang.

Kepastian wilayah merupakan kriteria deskriptif tentang status hukum kawasan. Dari sisi tata batas, kriteria ini dapat mewujud dalam beberapa tataran: belum tata batas; sudah tata batas, tapi belum temu gelang; sudah temu gelang, belum berita acara; sudah berita acara tata batas, belum ditetapkan; dan sudah ditetapkan.

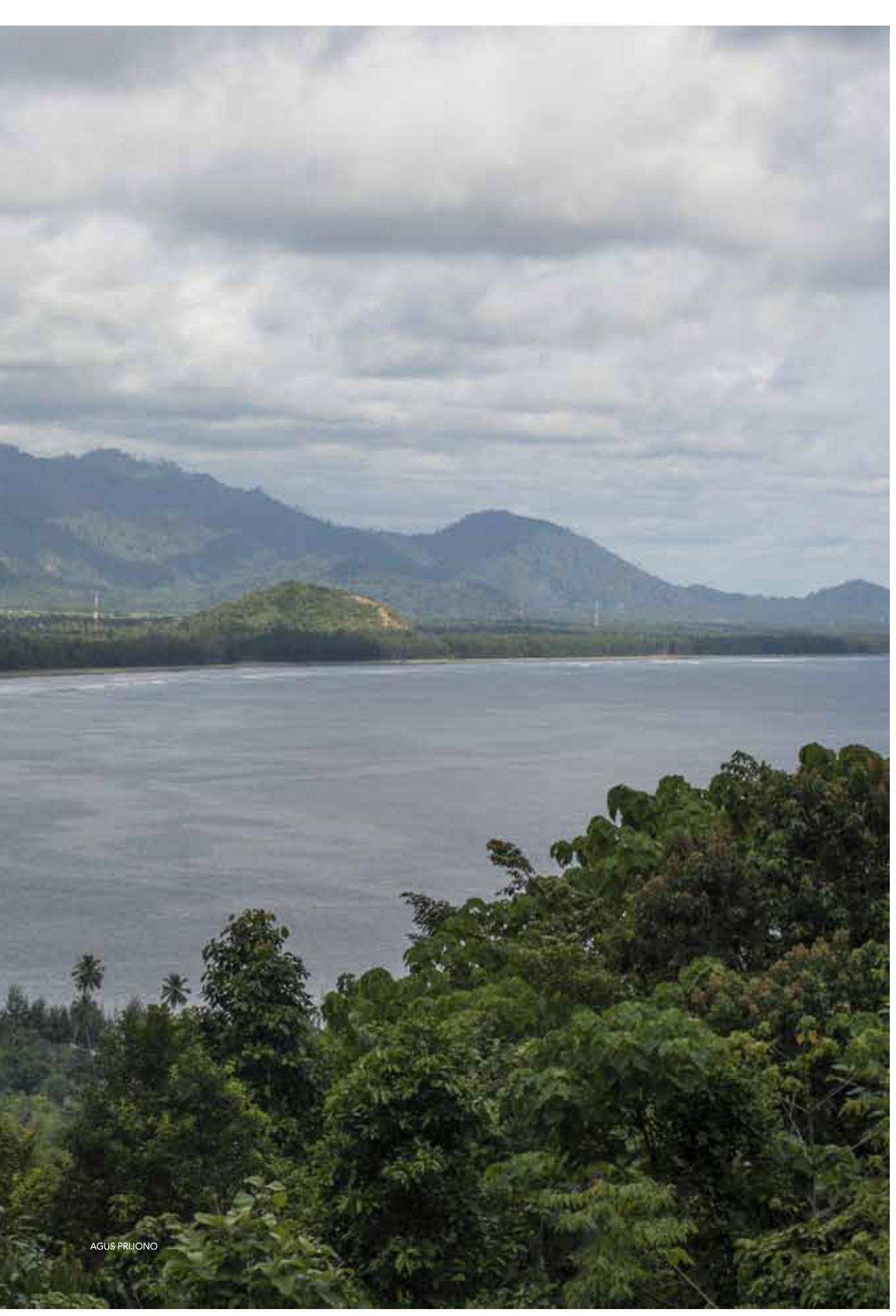
Istilah dalam tataran itu agak teknis. Namun hakikatnya, kawasan KPHK mesti memiliki kepastian hukum. Wujud kawasannya harus legal dan pasti. Tafsir lain kepastian wilayah juga dapat dilihat dari adanya dokumen penataan zona, rencana pengelolaan, ataupun desain tapak wisata alam.

Kepastian wilayah juga berarti kesatuan pengelolaan hutan harus berada dalam kawasan hutan tetap, setelah melewati tahap penunjukan, penataan batas, atau pun penetapan kawasan.



SAUJANA PESISIR

Alam Aceh Selatan didominasi perbukitan yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Sebagian besar kawasannya berupa hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Keadaan ini menuntut pengelolaan sumber daya yang selaras dengan kaidah kelestarian alam.



AGUS PRIJONO



Pekerjaan tata batas suaka masih panjang dan berliku. Tuntasnya pemasangan pal batas hingga temu gelang akan menjadi modal penting untuk menyambut KPHK Rawa Singkil. Kepastian kawasan akan memberi jaminan hukum bagi KPHK dalam mengelola Rawa Singkil. Saat ini, tim masih akan menata batas kawasan suaka. Hingga selesai, Rawa Singkil akan memasuki proses pengukuhan kawasan.



Dari generasi ke generasi, luapan air dari Rawa Singkil memasok pakan bagi aneka satwa perairan. Belut rawa di sekitar suaka misalnya, acap dipanen penduduk, dijual dan memutar ekonomi lokal. Keberadaan KPHK akan memudahkan pertautan antara manfaat kawasan konservasi dengan masyarakat setempat.

Dengan demikian, kesatuan pengelolaan hutan memiliki letak, luas, dan batas yang jelas dan permanen, dengan batas-batas yang se bisa mungkin mengikuti batas alam.

Sementara itu, dari kelayakan ekologinya, pembentukan KPHK mesti menimbang: kesesuaian daerah aliran sungai, keseragaman geomorfologi dan tipe hutan; serta bentuk kawasan cukup ideal secara ekologis.

Itu dari sisi kawasan hutan.

Dari sisi kelembagaan, KPHK dibentuk dengan memperhatikan luas kawasan, yang sebaiknya dalam rentang kendali optimal; memperhatikan intensitas pengelolaan; serta keutuhan batas kawasan. Di masa datang, KPHK juga harus memanfaatkan peluang pengembangan jasa ekosistemnya dengan melihat potensi, kekompakan kawasan, fragmentasi kawasan rendah dan aksesibilitas.

Ali Djajono menuturkan, secara planologi dalam membangun KPHK yang terpenting adalah kesepakatan aspek hukum batas kawasan antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dengan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tantangannya, imbuhnya, “Sering ditemui ketidaksesuaian data-informasi di antara keduanya.”

Dari berbagai wacana, dalam membentuk KPHK di luar taman nasional terdapat sejumlah pilihan. Pertama, bila kawasan terlalu kecil, dan tak jauh dari taman nasional, pengelolaannya bisa dititipkan kepada balai taman nasional.

*KPHK diharapkan jadi
garda depan pengelolaan
Suaka Margasatwa
Rawa Singkil.*



AGUS PRIJONO



Kedua, menghimpun beberapa kawasan kecil yang saling berdekatan menjadi satu KPHK. Dan ketiga, untuk kawasan yang luas, di atas 100.000 hektar misalnya, bisa menjadi satu KPHK tersendiri. Pendekatan yang terakhir ini pas untuk Rawa Singkil.

Dengan berbagai paparan di atas, pembentukan KPHK berarti harus memenuhi kriteria geografi, ekologi dan pengembangan tata kelola. Kriteria geografi merupakan aspek mendasar dalam menentukan kedekatan antarkawasan. Kriteria ini untuk memahami relasi spasial berdasarkan jarak rata-rata antar-kawasan yang berdampingan. Makin dekat, kian berpotensi bergabung dalam satu kesatuan pengelolaan. Secara

praktis, kriteria geografis memberi gambaran awal KPHK dengan kriteria ekologi dan tata kelola.

Selanjutnya adalah kriteria ekologi, yang menentukan apakah kawasan tertentu bakal tercakup dalam satu KPHK. Pertimbangan ini bisa dilihat dari tujuan pengelolaan, hasil survei, tutupan lahan dan penggunaan lahan sekitar kawasan, ataupun sistem daerah aliran sungai.

Sementara itu kriteria manajemen untuk menilai efektivitas dari sisi keterjangkauan dan luas kawasan. Dari sisi manajemen ini, BKSDA yang akan menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tertentu. Apakah akan efektif bila digabung dalam satu KPHK, berdiri sendiri, atau perlu dibagi dalam beberapa



Lokasi pal kayu ini menggambarkan tantangan besar sedang menanti KPHK Rawa Singkil. Perambahan ini memberikan alarm: perbatasan suaka mesti dijaga dan dikelola. Di masa datang, personel KPHK Rawa Singkil mesti memulihkan hutan yang terambah di dalam kawasannya. Pengelola KPHK diharapkan juga memantau kawasan hutan di sekitar Rawa Singkil.

KPHK.

Aspek lain yang tak bisa dilupakan: pihak-pihak terkait yang berpotensi mendukung pengelolaan kawasan. Untuk aspek ini, contohnya tak jauh. Program penataan batas Suaka Margasatwa Rawa Singkil memberi pelajaran dan penegasan terhadap isu-isu sosial di sekitarnya.

Dengan demikian, penataan batas yang difasilitasi YLI akan memberi sumbangan bagi kepastian kawasan Rawa Singkil. “Tata batas ini untuk memperjelas kepemilikan lahan dalam membantu perlindungan suaka margasatwa,” papar Abu Hanifah Lubis, Project Leader YLI-TFCA Sumatera.

Tak hanya itu, program ini sekaligus mengkaji status lahan di sekitar suaka.

Nizar menegaskan, bila ada lahan masyarakat di dalam kawasan dan ada bukti legal, pemerintah wajib merevisi batas suaka. Pun sebaliknya, jika lahan yang diklaim adalah kawasan suaka, mak tak mau, mesti dikembalikan untuk keperluan konservasi.

“Tata batas sangat penting untuk menjamin kepastian operasional dan pengelolaan KPHK. Dengan batas yang jelas, pengelola punya kepastian dalam menjalankan kegiatannya, khususnya terkait dengan stakeholder di sekitar kawasan hutan,” papar Ali Djajono.

KESATUAN PENGELOLAAN Hutan Konservasi Rawa Singkil tercakup dalam lanskap Kawasan Ekosistem Leuser. Rawa

Singkil terkoneksi dengan bentang alam, habitat dan sebaran populasi orangutan dan harimau. Kedua spesies kharismatik inilah yang menautkan antara Suaka Margasatwa Rawa Singkil dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Abu menjelaskan bahwa Rawa Singkil merupakan kawasan dengan populasi orangutan sumatera tertinggi di dunia.

Di atas peta, sungguh menakjubkan melihat suaka ini terhubung dengan lanskap sebaran harimau, orangutan dan gajah. Namun, rasa takjub itu runtuh setelah melihat kenyataan di lapangan. Lanskap tiga satwa itu terpotong-potong oleh jalan raya dan perkebunan sawit. Jaringan antarhabitat satwa gajah sumatera, harimau dan orangutan tercerai-berai.

Kenyataan itu menegaskan bahwa Rawa Singkil berperan sebagai ‘suaka inti’ bagi satwa liar yang hidup di luar kawasan konservasi lain. Lahan basah Rawa Singkil juga dikenal sebagai pemasok hara bagi perairan dangkal Samudera Hindia. Gunduk-gundukan gambutnya memendam jutaan ton karbon.

Peran sebagai suaka inti makin krusial lantaran kawasan di sekitar Rawa Singkil telah diduduki populasi manusia. Hampir di sekeliling suaka, permukiman telah memecah-belah habitat satwa liar.

Sementara itu, di sisi utara suaka, di wilayah Aceh Selatan, membentang kawasan hutan lindung yang melindungi daerah resapan air. Di antara Rawa Singkil dan hutan lindung, terdapat Koridor Satwa Trumon untuk pergerakan binatang dari

Ekosistem rawa-rawa banyak dijumpai di sepanjang jalan antara Subulussalam dengan Tapaktuan. Hanya saja, rawa-rawa ini berada di luar kawasan konservasi. Dengan demikian, Rawa Singkil adalah ekosistem alami tersisa yang masih bisa diselamatkan oleh manusia yang beradab.



Leuser ke suaka.

Abu menuturkan, saat ini pengelolaan suaka margasatwa dipegang BKSDA Aceh dengan sebuah kantor seksi konservasi wilayah di Subulussalam, dan satu resor di Aceh Singkil. Mengingat hubungan geografis, amanat konservasi, serta maraknya sengketa lahan, organisasi itu jelas terlalu kecil untuk menangangi suaka masrgasatwa.

“Rawa Singkil memiliki keunikan dari sisi ekosistem rawa yang beragam dan habitat beberapa satwa langka, khususnya orangutan. Artinya, pengelolaan harus fokus untuk konservasi. Selama ini suaka margasatwa sepertinya tidak menjadi perhatian utama pengelolanya. Mungkin karena keterbatasan dana dan personel,”



Tata batas belum usai, konflik buaya-manusia membara di Rawa Singkil.

ungkap Abu.

Secara praktis saja, hampir di sepanjang lingkar batas suaka di tiga kabupaten terjadi sengketa lahan, perambahan dan pembalakan liar. Kelak, tantangan ini sudah pasti mempengaruhi kelembagaan dan sumber daya manusia di KPHK Rawa Singkil. Secara garis besar, sebagai organisasi pengelola, KPHK membutuhkan seorang pemimpin, tenaga teknis dan tenaga terampil. Sumber daya itu harus mampu mengelola Rawa Singkil: menyusun rencana pengelolaan, pemanfaatan, restorasi, dan perlindungan.

Di masa datang, KPHK diharapkan dapat berbentuk organisasi struktural, baik sebagai unit kerja mandiri maupun bagian dari BKSDA. Kesatuan pengelolaan

hutan diharapkan menjadi garda depan bagi pengelola dalam berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Ringkasnya, KPHK Rawa Singkil akan menjalankan pengelolaan yang bersenyawa dengan alam dan masyarakat sekitar.

Organisasi pengelola di tingkat tapak ini mesti diperkokoh dalam struktur kelembagaan. Saat ini, KPHK masih berada di bawah balai KSDA ataupun taman nasional, dan belum menjadi sub-organisasi struktural.

Balai KSDA tidak dilengkapi struktur teknis, tetapi hanya didukung organisasi teknis di tingkat seksi konservasi wilayah. Dengan begitu, hanya sub-bagian tata usaha yang menjadi lembaga struktural di bawah kepala BKSDA—yang juga



Berbagai tantangan besar sedang menunggu kehadiran KPHK Rawa Singkil. Di lapangan, terutama dekat pinggir kawasan, perambah dan pembalak menggerayangi suaka. Dinamika di lapangan ini berlangsung dalam itungan hari, bukan pekan ataupun bulan. Pembakaran lahan memang berada di luar kawasan, namun tiadanya pengelola suaka tindakan itu nyaris tanpa kehati-hatian. Air gambut menggelegak dari sisi suaka di kanal kebun sawit (atas), sepokok pohon menjadi arang (kanan atas), alat-alat balak tergeletak di tepi Sungai Soraya (kanan bawah).





BATAS HIDUP

Deretan pinang berjajar di sempadan Sungai Soraya. Tumbuhan ini menjadi penanda batas hidup lahan kebun milik warga di sekitar suaka. Kearifan lokal seperti ini mesti digali kelak oleh pengelola KPHK Rawa Singkil. Saat beroperasi, pengelola KPHK mesti menggaet masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan.



AGUS PRIJONO

menanggung beban operasi teknis. Tak perlu berkerut kening, beban tambahan ini jelas tidak gampang diemban.

Pengalaman dari pengembangan kesatuan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, ada pemisahan tugas pengurusan dengan pengelolaan hutan. Dalam KPHP dan KPHL, pengurusan hutan dari aspek kebijakan, seperti perencanaan, perizinan, dan penelitian, dipegang oleh satuan kerja perangkat daerah. Sementara pengelolaan hutan secara teknis dipegang oleh KPH. Sebaliknya, sejauh ini untuk KPHK belum ada wacana pembagian pekerjaan yang jelas.

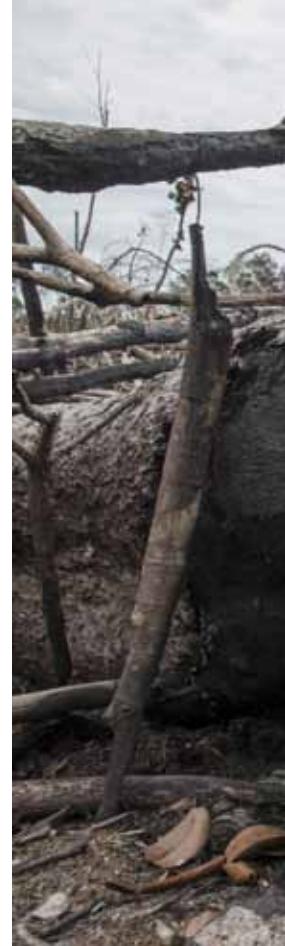
Di sisi lain, keadaan di lapangan menuntut pengelola yang cekatan dalam merespon dinamika sosial. Kajian YLI tentang kekayaan hayati dan status kepemilikan lahan dapat dijadikan bekal bagi rancang bangun KPHK Rawa Singkil.

Rancang bangun kesatuan pengelolaan ini membutuhkan bejibun data dan informasi. Cakupannya meliputi dokumen penunjukan untuk mengkaji mandat pengelolaan, keadaan masyarakat setempat, penguasaan lahan, batas kabupaten, daerah aliran sungai, jaringan jalan, hingga peta perkembangan hutan dari BPKH.

Dari sisi keanekaragaman hayati, populasi orangutan tertinggi berada di titik temu perbatasan tiga kabupaten, yang berada di dalam suaka. "Sementara itu, harimau sumatera makin sulit dijumpai."

Berdasarkan survei biodiversitas, jelas Abu, Rawa Singkil selayaknya dikelola

Terlalu banyak yang sirna sia-sia di sekitar Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Gambut dibongkar, pepohonan dibakar. Kawasan bergelimang gambut ini semestinya berkontribusi bagi dunia global dalam menahan laju pelepasan karbon. Ini tantangan lain bagi KPHK Rawa Singkil.



dalam dua wilayah seksi pengelolaan, dengan empat blok settingkat resor. Abu juga menyodorkan draf rencana pengelolaan yang merupakan hasil diskusi bersama BKSDA Aceh. Namun, draf itu belum disahkan oleh Direktorat Jenderal.

Sebagai kesatuan pengelolaan hutan, Rawa Singkil harus mampu menjawab sejumlah tantangan: menyelesaikan sengketa lahan; pemimpin dengan kendali organisasi yang mumpuni dan mampu membangkitkan kehadiran personel di lapangan.

Abu menyatakan, KPHK dengan organisasi yang partisipatif dapat menjaga kelestarian Rawa Singkil dengan melibatkan pihak terkait. "Saling bersinergi. Peran parapihak dalam



Di ujung tata batas kelak, suaka ini pantas menatap babak baru.

pengelolaan penting dalam pengamanan kawasan, sesuai dengan blok yang akan ditetapkan dalam KPHK.”

Pelibatan masyarakat, tutur Abu, misalnya bisa berbentuk patroli bersama untuk memantau kegiatan illegal. Sementara itu, paparnya, “Pemerintah daerah bersama lembaga swadaya masyarakat bisa bekerja di daerah penyanga, khususnya untuk meningkatkan ekonomi alternatif masyarakat.”

SEMBARI MENUNGGU perahu di tepi Sungai Soraya, Nizar membuka lebar lembaran peta rencana pemasangan pal batas. Jari telunjuknya menyisir titik-titik bulat yang melingkari suaka. Titik-titik di

lingkar luar suaka itulah lokasi pemasangan pal batas. Beban pekerjaan masih panjang dan berliku.

Sayangnya, tata batas belum lagi usai, konflik buaya dengan manusia membara di Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Nizar menuturkan bahwa buaya telah memangsa seorang nelayan pencari lokan atau kerang. “Kebetulan habitat lokan dan buaya sama-sama di sungai,” ujarnya.

Dendam lantas berkembang. Suatu waktu, seekor buaya terperangkap jebakan yang diberi umpan seekor babi. Warga membakar buaya itu hidup-hidup. Perutnya lantas dibelah. Sialnya, tak dijumpai jejak-jejak organ tubuh manusia. Hingga Mei 2015, ada dua buaya telah dibunuh, dan seekor diboyong ke kantor

Potongan kayu dan ranting berserakan di sekitar batas suaka. Vegetasi berperan penting dalam melestarikan gambut melalui luruhan serasah. Dengan begitu, hilangnya pepohonan sudah pasti mempengaruhi proses humifikasi gambut. Tanpa luruhan vegetasi, lapisan gambut perlahan menipis, lalu menghilang.

BKSDA di Banda Aceh.

Dia juga mendengar kabar akan dibangun jalan tembus antara Runding, Kota Subulussalam dengan Buloh Seuma, Kabupaten Aceh Selatan. Jalan ini akan membelah suaka tepat di tengah kawasan. Padahal, pedalaman suaka ini menjadi pusat populasi orangutan sumatera di Rawa Singkil. Tantangan yang bertubi-tubi mengingatkan Nizar pada keputusan Menteri yang menetapkan Rawa Singkil sebagai kesatuan pengelolaan hutan konservasi.

“Rawa Singkil memang pantas dijadikan satu KPHK. Idealnya ada dua kantor seksi, dengan empat atau lima wilayah setingkat resor. Itu nampaknya baru betul. Dan, suaka margasatwa bisa aman, karena akses ke kawasan gampang; mengeluarkan ‘barang’ juga gampang,” Nizar memaparkan.

Selama ini, lanjutnya, hanya ada satu kantor seksi konservasi di Subulussalam dan satu resor di Aceh Singkil. Posisi kedua kantor itu pun jauh dari suaka. Akhirnya, personel hanya menumpuk di kantor dengan sarana-prasarana yang tidak memadai.

Masa-masa penataan batas begitu berat. Tantangan dan keadaan di lapangan menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersic cepat mewujudkan KPHK Rawa Singkil. Di ujung terakhir pemasangan pal batas kelak, Rawa Singkil pantas menatap babak baru. Sebuah babak dengan pengelolaan yang tanggap-cekatan di kawasan dengan batas pasti dan tegas.***

Sayangnya, tata batas belum lagi usai, konflik buaya dengan manusia membara di suaka.



AGUS PRIJONO



JANTUNG MUSALA

Ruangan gergaji liar dari kawasan suaka terdengar hingga bangunan musala yang merepih. Di wilayah yang disebut Jempol, Subulussalam, ini perambahan dan pembalakan liar mengoyak hutan suaka margasatwa.



AGUS PRIJONO



PENJAGA SUAKA

Sendirian di bawah naungan tajuk hutan, pal batas menandai tepi suaka dari pihak lain. Kendati saat tata batas terjadi benturan dengan sejumlah pihak, di masa datang pal ini menjadi saksi kepastian pengelolaan kawasan suaka.



AGUS PRIJONO

Memupuk

JELAJAH MEDAN

Nanik menembus kerumunan akar pohon ara yang tumbuh di Koridor Satwa. Tujuh pohon ara hidup dengan tajuk menggapai angkasa. Situs ini disebut rumbung tujuh yang menyajikan suasana rimba raya di Koridor. Pas buat para wisatawan minat khusus.

Penebar Damai

Duet serasi yang pantas tetap berkiprah di wilayah rawan konflik gajah-manusia. Bagaimana keberlanjutan CRU Trumon dan pengelolaan Koridor Satwa?



WISATA EKOSYARIAH

Aktivitas di Sungai Naca hanya salah satu daya tarik wisata yang biasa dikembangkan di Koridor Satwa Trumon. Tantangannya, selain ramah lingkungan, wisata di kawasan Aceh juga mesti sesuai syariah.



AGUS PRIJONO

M

edin berlari girang di sepanjang tepian Sungai Naca. Mata Medin berbinar-binar menyambut sore. Sampai di tepian sungai, anak kelas dua sekolah dasar itu memberikan sebutir mangga kepada mahout Fransisco Sirait.

Lelaki yang biasa disapa Koko itu lantas memanggil Nanik yang sedang bermain air. Gajah betina remaja itu menjulurkan belalainya, menyambut buah mangga. Medin dan kawannya terkesiap. Belalai Nanik yang menjulur mengejutkan mereka. Tawa riang menggema.

Seperti hari-hari yang lain, kala sore menjelang, Nanik, Bayu, Tuah dan Siska mesti mandi di sungai. Gajah-gajah Conservation Response Unit Trumon itu mandi, berlatih, dan minum sepasnya. Dari atas jembatan, warga yang kebetulan melintas berhenti: memotret dengan gawai atau sekadar menyaksikan para gajah.

Acap kali pagar jembatan dipenuhi warga yang penasaran. Anak-anak Desa Naca turut meriuang. Mereka ingin bonus: naik di punggung gajah. "Saya bilang kalau ingin naik, pas musim buah bawalah buah-buahan untuk gajah," papar Koko, koordinator mahout CRU Trumon.

Seusai gajah mandi, Medin dan

temannya naik ke punggung Siska. Mereka duduk di depan Koko. Rona gembira membersit di wajah anak-anak.

Kala menyeberangi jalan raya, para warga yang melintas memberi jalan bagi Tuah dan kawan-kawannya. Sebagian warga menyempatkan diri berfoto-foto; sebagian yang lain mengikuti di belakang barisan gajah.

Sesampainya di basecamp CRU, Medin bersama teman-temannya turun. Keceriaan mengapung di udara yang hangat. Para pengunjung mengabadikan momen para gajah berlatih. Sejumlah pengunjung kongkow di bale-bale. Kala matahari melindap, anak-anak masih betah bermain bola sepak.

Semenjak ada aktivitas unit tanggap konservasi gajah, kawasan Koridor Satwa makin riuh dan menggeliat. Keseharian gajah dan mahout telah memikat banyak orang. Dalam interaksi itu terselip sebuah hikmah: gajah dan manusia bisa hidup



Selain markas CRU Trumon, Koridor Satwa juga dilengkapi Pusat Informasi yang menyuguhkan beragam pengetahuan konservasi. Fasilitas lainnya berupa daya energi listrik, kamar sederhana namun artistik, serta tenda kubah. Lingkungan di sekitar camp memberikan nuansa alam liar.

rukun dan menjalin kerjasama. Kepada anak-anak pula, Koko dan para mahout menuturkan perlunya melindungi satwa tambun itu.

"Lagipula kami tidak akan selamanya di sini. Mereka, anak-anak itu, yang suatu saat menggantikan kami," jelas Koko. Di sela interaksi yang menghibur itu, Koko menyisipkan pandangan yang positif terhadap gajah.

Konflik yang berlarut-larut membuat masyarakat berpandangan bahwa gajah sebagai musuh. Koko menyatakan pandangan itu harus diubah. "Kalau ingin gajah tidak masuk kampung, habitatnya jangan diganggu. Sudah merusak habitatnya, menanam tumbuhan kesukaan gajah pula," tutur Koko.

Kiprah CRU Trumon memberi bukti terang bahwa manusia dan gajah bisa bersekutu memadamkan konflik.

MENDENGAR dan menerima laporan konflik gajah-manusia sejak 2006, Yayasan Leuser Internasional lantas menggagas unit tanggap konsevasi gajah. Gagasan itu mulai dirintis pada 2010-2011 dengan dukungan Tropical Forest Conservation Action Sumatera.

Sebelum ada CRU Trumon, papar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Masrul, "Konflik gajah memang luarbiasa. Dengan adanya CRU, data tiga tahun terakhir menunjukkan konflik hampir tidak ada lagi."

Pohon ara tua di situs rumbung tujuh menyuguhkan sensasi rimba raya di Koridor Satwa. Perpaduan antara patroli gajah dan alam yang asri membuka peluang pengembangan ekowisata. Dana dari ekowisata bisa disisihkan untuk keberlanjutan operasi CRU Trumon.

Rasa tentram telah mewujud di Trumon Tengah dan Timur. Konflik gajah-manusia di dua kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan ini menurun. “Laporan konflik praktis tidak ada. Tapi kalau di Kota Subulussalam masih terjadi. Tiga minggu lalu, tim turun ke sana. Dua gajah liar masuk kampung. Kita sebenarnya ingin gajah jinak bisa dibawa ke Subulussalam,” papar Abu Hanifah Lubis, project leader YLI-TFCA.

Hingga kini, gajah jinak belum pernah turun ke lokasi konflik. Untuk memboyong gajah diperlukan persiapan matang: logistik, izin dan dana. Tuah dan kawan-kawannya mesti diangkut truk dan menginap.

Dengan begitu, saat konflik membara, hanya para mahout yang turun ke lapangan. Pada saat turun, ujar Abu, “Kita juga memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana cara mengusir gajah liar.”

Untuk meredakan konflik, cukup para mahout yang turun ke lapangan dengan membawa perangkat pengusir gajah liar. “Kita belum perlu menurunkan gajah jinak, karena mahout sudah bisa menghalau gajah liar,” ungkap Koko, “jadi, cukup mahout yang turun.”

Pertarungan terakhir meletup sekitar April 2015 di Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Subulussalam. “Kita cek apakah benar yang masuk adalah gajah,” Koko menjelaskan. Hasil pengecekan menentukan langkah selanjutnya: apakah perlu gajah jinak atau hanya mahout yang datang. “Ternyata mahout sudah cukup

*Tiga tahun terakhir,
hampir tidak ada
konflik gajah-manusia.*



AGUS PRIJONO



Konflik gajah terjadi tanpa pemberitahuan. Maka, kita harus terus waspada.

dan konfliknya sudah bisa selesai. Kita baru menurunkan gajah jinak kalau gajah liarnya tidak mau keluar kampung,” terang Koko.

Upaya tim CRU menanggulangi konflik dipandang bermanfaat oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. “Masyarakat menikmati keberadaan CRU. Keterlibatan masyarakat nampak dari pandangan bahwa CRU telah menjadi milik bersama,” papar Masrul.

Menurut pengamatan Dinas Kehutanan, beberapa kilometer dari permukiman kini sudah tidak terlihat kehadiran gajah. “Walaupun gajah jinak tidak patroli, tapi masyarakat telah memahami satwa langka ini perlu dilestarikan. Masyarakat juga sudah paham cara menghalau gajah,”

Masrul memaparkan. “Pemahaman inilah yang penting.”

Sebelum ada unit tanggap konservasi ini, masyarakat menganggap gajah sebagai hama. “Bahkan kita punya informasi, sejumlah orang mengusir gajah dengan cara meracuninya,” Abu mengimbuhkan. Sialnya, informasi itu bukan kabar burung. Di perbatasan Kota Subulussalam, pada Juni 2012 silam, tim menemukan dua bangkai gajah. Racun yang ditebar warga telah mencabut nyawa dua gajah itu. “Gadingnya hilang, kita hanya dapat bangkainya.”

Seorang warga Naca Hera Sumitra merasakan semenjak CRU Trumon berkiprah, konflik gajah-manusia mereda. “Sebelumnya, konflik gajah-



Warga menyambangi Tuah, Bayu, Siska dan Nanik. Kandang sosialisasi ini sebenarnya untuk membuat Tuah dan kawan-kawannya saling berinteraksi. Dalam keseharian, kandang ini rupanya juga memberi kesempatan kepada warga untuk melihat dari dekat gajah-gajah jinak.

manusia sering terjadi. Sepanjang 2004-2005 misalnya, konflik luar biasa dan sempat ada korban manusia,” paparnya. “Kini, alhamdulillah konflik gajah sudah berkurang. Gajah tak pernah turun ke kebun dan kampung.”

Aktivitas unit tanggap konservasi ini tidak terbatas meredam konflik. Hera menuturkan tim CRU juga mengembangkan program pembibitan dan kolam ikan air tawar. “Kolam terletak di jalur sungai yang berbatasan dengan Koridor. Ini untuk mengantisipasi perambahan di Koridor.”

Sisi barat Koridor dibatasi Sungai Naca yang berhulu di Taman Nasional Gunung Leuser dan berhilir di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Alur sungai

yang melewati Koridor berkelok-kelok dan kerap membanjiri Desa Naca. Pada 2007, dengan program PNPM Mandiri, masyarakat melakukan pelurusan sungai sepanjang 2 km.

Aliran air kini melalui jalur baru, sedangkan jalur sungai lama yang telah mengering tetap menjadi batas Koridor. Untuk menghindari kesalahpahaman batas Koridor itu, dilakukan sosialisasi batas alam Koridor dengan memanfaatkan jalur sungai lama sebagai kolam ikan.

Awalnya, hanya tiga kelompok yang akan berbudidaya ikan di tiga kolam. “Karena antusias, masyarakat membuat lagi tiga kolam secara swadaya,” lanjut Hera. Bersama sejumlah warga Naca dan Ie Jernih, CRU Trumon juga rutin berpatroli di kawasan Koridor. “Patroli bersama masyarakat dilakukan 10 hari setiap bulan yang melibatkan 10 warga. Lima orang dari Naca; lima lagi dari Ie Jernih,” tutur pria yang kerap ikut berpatroli ini.

Kendati telah aman, namun sosialisasi mitigasi konflik gajah harus tetap dilakukan. Apalagi, konflik bisa terjadi kapan dan di mana saja. “Konflik gajah terjadi tanpa ada pemberitahuan. Makanya, kita harus terus waspada,” lanjut Masrul.

Lantaran itulah keberlanjutan CRU di masa datang dirasakan penting oleh banyak pihak. Berdirinya unit tanggap konservasi tak lepas dari dukungan TFCA Sumatera, mulai dari pembangunan basecamp hingga keberadaan empat gajah dan mahout. “Kita hanya bisa mendukung empat gajah, empat mahout, dua asisten

dan beberapa staf pendukung," kata Abu. Semula, setelah dukungan TFCA antara 2011 – 2013, CRU akan dikelola pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Tapi, lanjut Abu, sampai dua tahun lebih rencana itu tidak berjalan. "Kita dulu juga ingin menyusun kerjasama antara YLI, BKSDA Aceh dan pemerintah kabupaten dengan hak dan tanggung jawab masing-masing. Namun juga tidak berjalan," papar Abu, sembari menambahkan sempat ada dukungan dana dari pihak lain selama 10 bulan.

"Dua tahun pertama, kita belum beruntung. Dinas selalu mengajukan anggaran penanganan konflik gajah dan CRU, tapi belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Selatan. Baru tahun ketiga pada 2013 tembus, untuk realisasi tahun 2014. Dana yang disetujui Rp 150 juta. Itu bentuk kolaborasi kita," terang Masrul.

Dinas Kehutanan telah menganggarkan dana bagi CRU Trumon selama lima tahun mendatang untuk kurun 2013 -2017. Dia berharap kolaborasi akan berlanjut setiap tahun. Dana anggaran Aceh Selatan memang terbatas.

Itu juga berarti Dinas Kehutanan harus meyakinkan dewan untuk menyetujui anggaran mitigasi konflik gajah. Masrul menuturkan, anggaran untuk sektor kehutanan belum mencukupi karena pemerintah daerah masih fokus pada pemberdayaan masyarakat, pertanian, dan perkebunan. Aceh Selatan hanya memiliki kawasan budidaya 20 persen dari total luas kabupaten. "Yang lain, sebagian besar

Seorang anak menyaksikan mahout yang memandikan gajah di Sungai Naca. Anak-anak acap menunggu gajah-gajah mandi, lalu berharap bisa ikut menunggangi gajah saat perjalanan ke CRU Trumon.



kawasan hutan, ada taman nasional, suaka margasatwa, dan hutan lindung."

BERDIRINYA CRU Trumon menggugah gagasan lain mengenai pengelolaan Koridor Satwa Trumon. "Aktivitas CRU Trumon mengingatkan kembali nilai penting kawasan Koridor. Ke depan, basecamp CRU dan Koridor memerlukan kepastian status untuk bisa dikelola secara layak," papar Abu.

Sebelum tahun 2002, wilayah Koridor merupakan permukiman dan lahan pertanian warga Naca dan Ie Jernih. Melalui Program Pengembangan Leuser, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lantas membebaskan lahan Koridor dengan Dana Reboisasi. "Jadi



Koridor Satwa perlu kepastian status kawasan untuk bisa dikelola secara layak.

kawasan Koridor adalah lahan milik negara untuk lintasan satwa bolak-balik, antara Bengkung di Taman Nasional Gunung Leuser dengan Suaka Margasatwa Rawa Singkil,” kata Abu.

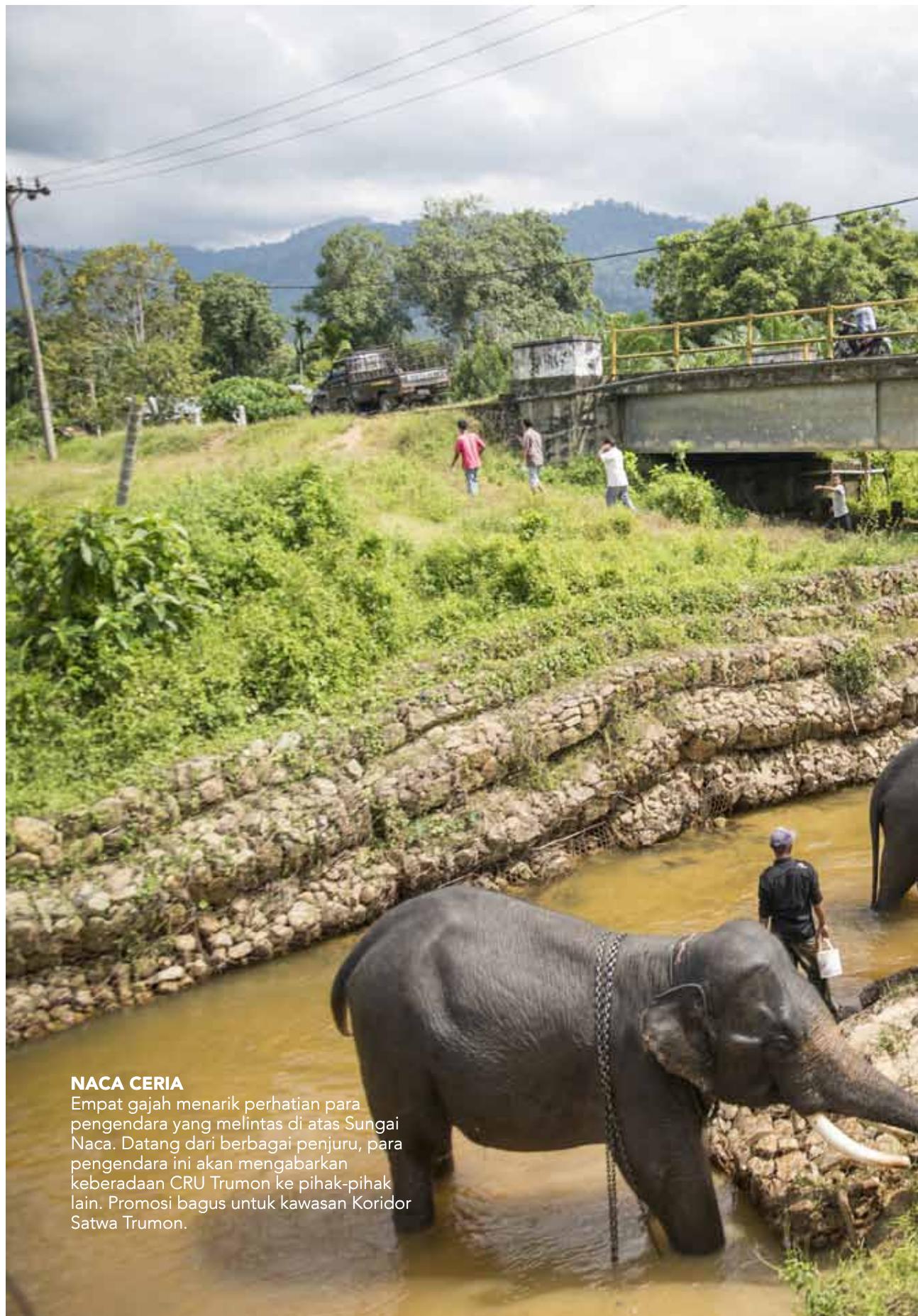
Kendati yang dibebaskan hanya 300 hektar, Koridor Satwa mencakup luasan 2.700 hektar. “Dahulu yang dibebaskan hanya 300 hektar, sementara sisanya kawasan hutan dengan fungsi lain.” Sayangnya, setelah dibebaskan, tidak ada tindak lanjut untuk pengelolaannya. “Artinya, meskipun tanah ini milik negara, tetapi statusnya belum baku. Selama ini hanya disebut sebagai kawasan Koridor Satwa.”

Selama kurang lebih satu dekade, antara 2002-2011, Koridor Satwa tidak

ada yang mengampu dan mengelola. Tak heran, berdirinya unit tanggap konservasi membuka kembali ingatan tentang pentingnya pengelolaan Koridor Satwa.

“Memang sudah disebut kawasan Koridor, tapi di Kementerian secara yuridis belum berkekuatan hukum. Dulu statusnya Areal Penggunaan Lain (APL). Dengan program TFCA, kita ingin Koridor yang 2.700 hektar ini ditetapkan sebagai kawasan hutan, entah hutan lindung atau kawasan konservasi,” ungkap Abu.

Pada 16 September 2014, Yayasan Leuser Internasional menggelar lokakarya untuk meningkatkan status Koridor Satwa Trumon menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA). Upaya ini baru langkah awal untuk mengelola kawasan ini secara



NACA CERIA

Empat gajah menarik perhatian para pengendara yang melintas di atas Sungai Naca. Datang dari berbagai penjuru, para pengendara ini akan mengabarkan keberadaan CRU Trumon ke pihak-pihak lain. Promosi bagus untuk kawasan Koridor Satwa Trumon.



AGUS PRIJONO

Keberlanjutan CRU dirasakan krusial oleh para pihak.

berkelanjutan. “Kawasan konservasi yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah adalah tahura. Itulah yang akan kita usulkan. Atau mungkin juga diusulkan menjadi kawasan strategis daerah, baik ditetapkan oleh bupati maupun gubernur.”

Abu mengatakan Kementerian memberikan saran untuk mengusulkan Koridor sebagai kawasan strategis daerah kepada pemerintah daerah. “Usulan itu sudah dibahas dan disetujui Dinas Kehutanan, meski belum sampai ke bupati.”

Saran itu mengemuka karena usulan status tahura ke Kementerian perlu waktu panjang. “Yang terpenting, Koridor berstatus tetap secepatnya,” papar Abu, “baru nanti kemudian hari, Koridor diusulkan menjadi taman hutan raya.”

Di masa datang, Koridor Satwa diharapkan berkembang menjadi model pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan jasa lingkungan dan hasil hutan nonkayu, pengelolaan Koridor dapat meningkatkan ekonomi setempat dan pendapatan asli daerah.

Bila kepastian status tercapai, lanjut Abu, kawasan Koridor aman. “Artinya, kawasan 2.700 hektar ini tidak diotak-atik. Kalau belum ada statusnya, ya, sewaktu-waktu pemerintah punya kebijakan lain, Koridor bisa saja diubah menjadi hutan produksi.”

“Kita akan mempertahankan fungsi kawasan ini sebagai koridor dan basecamp CRU Trumon. Bahkan kalau bisa, berkembang sebagai lokasi penelitian



Di sekitar Koridor Satwa, kawasan alami telah dirombak menjadi kebun sawit dan permukiman. Koridor bagaikan oase di tengah kepungan sawit: bercengkerama di saungsaung sambil merasakan suara alam. Kawasan ini dan CRU Trumon membuka kesempatan bagi khalayak untuk mengenal alam dan pelestariannya.

satwa liar. Dan pengelolaannya diharapkan lebih baik," tekad Masrul. Di Aceh Selatan memang belum banyak perhatian terhadap konservasi dan penanganan konflik gajah-manusia. Dia menyatakan bahwa pemahaman akan terus diberikan kepada para pihak dan masyarakat.

Pemerintah daerah sebenarnya siap mengelola Koridor. "Kita punya orang-orang terbaik yang bisa mengelola Koridor dalam bentuk unit pelaksana teknis. Tentu saja perlu dukungan dari pihak lain, baik pemerintah pusat, donor maupun lembaga swadaya," Masrul memaparkan.

Di saat yang sama, muncul pula gagasan mengembangkan ekowisata di Koridor Satwa. Apalagi Aceh Selatan belum memiliki kawasan ekowisata yang

representatif. Inilah peluang bagi Koridor Satwa dan CRU Trumon untuk menjadi ikon Aceh Selatan.

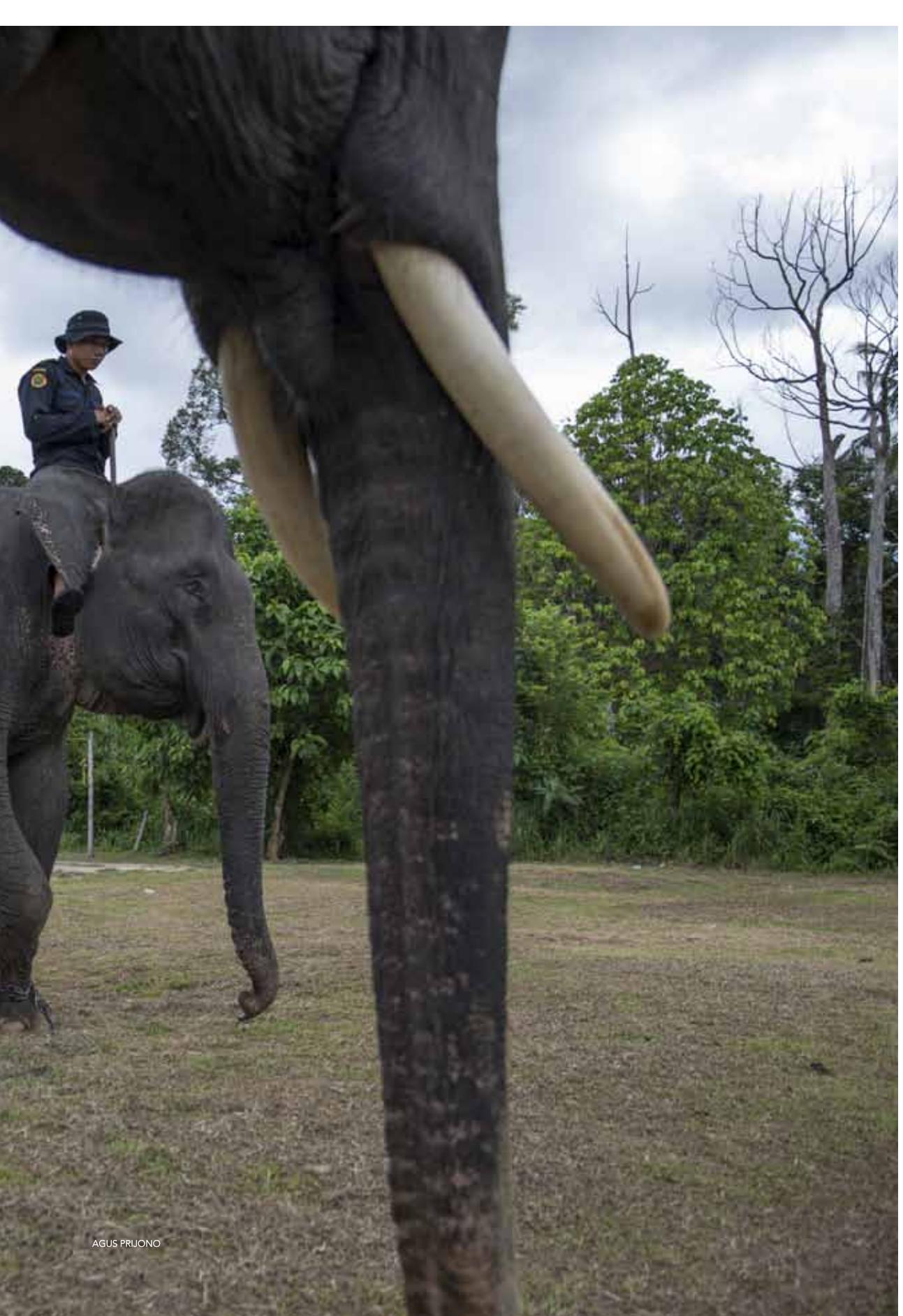
Pengembangan ekowisata di kawasan ini membuka alternatif sumber dana bagi keberlanjutan operasi CRU Trumon. Yayasan Leuser Internasional bersama Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Aceh Selatan telah merintis skema ekowisata. Skema ini sebagai persiapan mengembangkan ekowisata yang menggabungkan patroli bersama, pendidikan lingkungan, dan ekonomi alternatif masyarakat. "Ini baru sebatas persiapan mengembangkan ekowisata di Koridor," Abu menjelaskan.

Program bersama USAID Indonesia Forest and Climate Support (USAID



PENJAGA PERDAMAIAAN

Pengembangan ekowisata membuka sumber dana alternatif bagi operasi CRU Trumon. Untuk mendukung CRU, perlu dibangun mekanisme pendanaan jangka panjang dengan melibatkan berbagai pihak.



AGUS PRIJONO





Dua primata di Kawasan Ekosistem Leuser ini, kedih dan orangutan (atas dan bawah, kanan), dapat dijumpai di Koridor Satwa. Sebagai lintasan satwa liar, Koridor semarak dengan kehidupan flora-fauna. Rimba raya seisinya dan gajah CRU Trumon merupakan potensi yang layak dikembangkan untuk pendidikan lingkungan Aceh Selatan dan sekitarnya. Berada di tepi jalan Tapaktuan-Subulussalam, Koridor menyuguhkan alam tropis bumi Aceh.



Koridor diharapkan menjadi model pengelolaan kawasan konservasi oleh pemerintah daerah.

IFACS) itu juga menyokong operasional CRU Trumon. Hanya saja, pendanaan ini berakhir pada Desember 2014. Sementara dana dari pemerintah Aceh Selatan sangat terbatas. Dengan demikian, diperlukan mekanisme pendanaan yang melibatkan berbagai pihak, baik lembaga lokal, lembaga swadaya, maupun institusi pemerintah.

Peluang ekowisata di Aceh Selatan sangat terbuka lebar mengingat potensi alamnya yang berlimpah. Berbatasan dengan Samudera Hindia, kabupaten ini bergelimang pesona pesisir yang dibatasi pegunungan Bukit Barisan.

Daratannya membentang 100 kilometer di pantai barat diselimuti hutan 405.481 hektar—80 persen dari luas wilayah.

Rimba raya ini sebagian tercakup dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Lanskap hutan Aceh Selatan berderet mulai dari hutan pegunungan, hutan dataran rendah, sampai rawa gambut. Tipe-tipe hutan ini tentu memandam kekayaan hayati.

“Di sepanjang pantai barat Aceh, tidak ada sarana ekowisata dan pendidikan konservasi,” jelas Abu. “Kawasan ini bisa menjadi tempat wisata terbatas dengan tetap menjaga kelestarian Koridor.”

Sejumlah warga sekitar Koridor Satwa bersama YLI pernah beranjangsan ke Tangkahan, Sumatera Utara. Di sana, kehadiran CRU pada 2003 mampu menyemarakkan ekowisata Tangkahan. Hanya saja, perlu ditimbang matang untuk mengembangkan ekowisata di areal



Mahout menggembala gajah-gajah jinak pada lokasi tertentu di Koridor Satwa. Lokasi khusus ini untuk mencegah gajah merusak pepohonan. Penambatan gajah juga untuk menambah asupan pakan alami.

Koridor. "Pengembangan ekowisata perlu pelan-pelan, karena ada qanun syariah. Adanya qanun itu cukup membatasi ekowisata. Kita perlu pelan-pelan, karena masih baru dalam mengembangkan ekowisata," papar Hera Sumitra, seorang warga Desa Naca.

Di sepanjang pesisir Aceh Selatan memang tumbuh tempat-tempat pelesiran yang menyajikan keindahan alam. Tapi hanya sekadar panorama alam tanpa sentuhan pendidikan lingkungan.

Karena itu, Abu menegaskan, Koridor Satwa dan CRU Trumon akan dikembangkan menjadi kawasan wisata terbatas dengan pendidikan konservasi alam bagi masyarakat sekitar. "Jadi lebih mengarah kepada pendidikan konservasi

bagi masyarakat," dia menegaskan kembali. Ekowisata juga harus seturut kearifan lokal dan syariah. Abu mengingatkan, pengembangan wisata mesti menimbang kondisi sosiologis setempat.

Pada saat yang sama, pengembangan ekowisata juga menimbang daya dukung ekosistem Koridor. Karena itu, Abu menegaskan, ekowisata di kawasan ini tidak akan bersifat massal. Jumlah pengunjung yang berlebihan berisiko bagi Koridor yang menjadi perlintasan satwa liar.

Ekowisata merupakan model wisata bertanggung jawab di kawasan alami atau yang dikelola secara alami. Hakikatnya, ekowisata perpaduan antara kepedulian lingkungan, ekonomi, dan sosial.

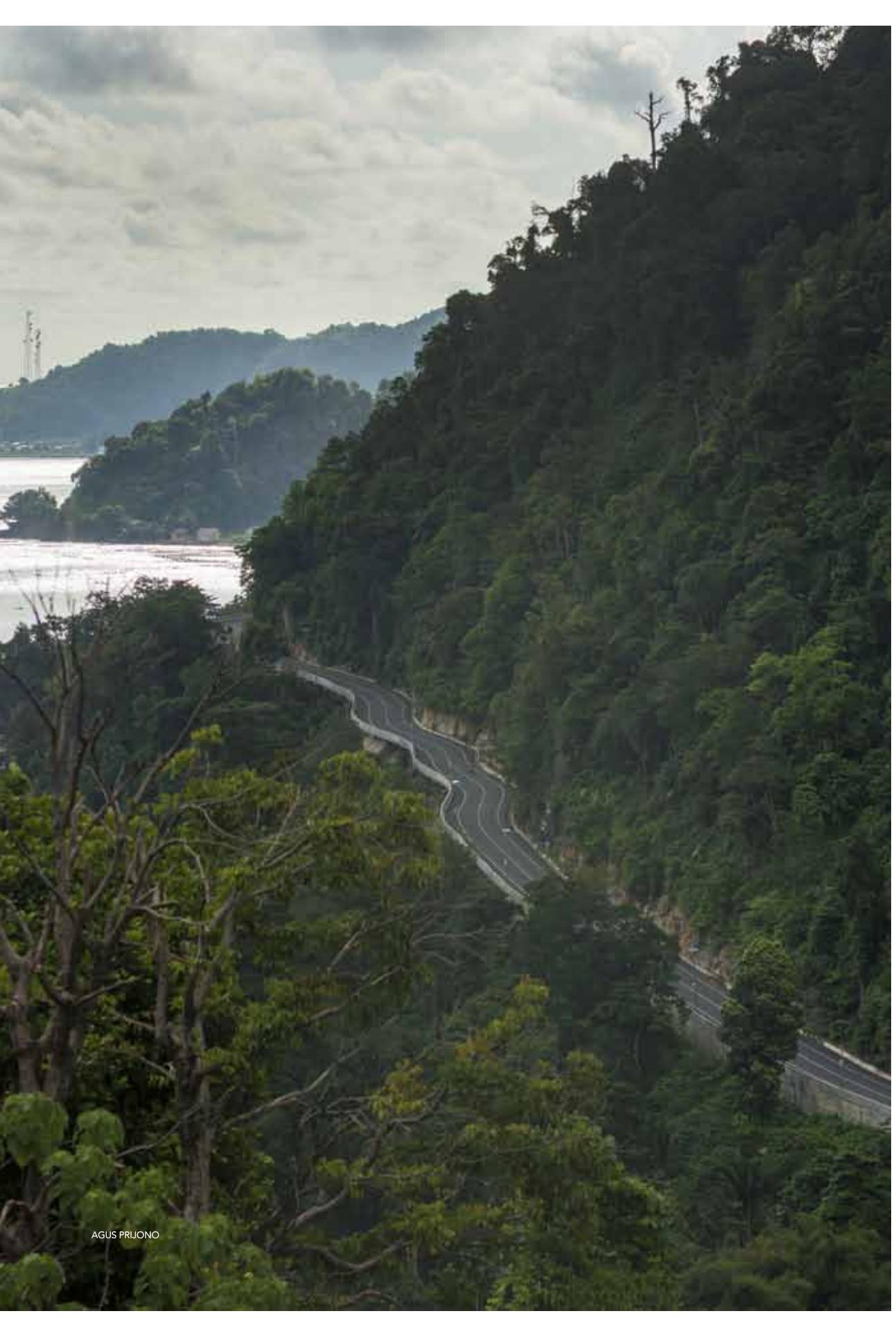
Upaya meminimalkan dampak ekowisata terlihat dari pembedaan jalur patroli dan jalur pengunjung. "Jalur patroli khusus untuk gajah dan monitoring biodiversitas," kata Koko. Sementara jalur pengunjung untuk ekowisata dan mengenal berbagai flora dan fauna. Selain itu, pembedaan jalur juga untuk mencegah gajah ataupun pengunjung tidak merusak jalur untuk setiap tujuan tersebut.

Gajah-gajah telah memikat perhatian pengunjung lokal. Sejumlah sekolah kerap mengunjungi CRU Trumon. "Anak-anak sekolah memang suka dengan CRU, dan di sini bisa belajar flora dan fauna," lanjut Hera. Untuk menambah pengetahuan masyarakat, di Pusat Informasi CRU terdapat media informasi tentang aktivitas pelestarian CRU Trumon dan keanekaragaman hayati.



TAMADUN PANTAI BARAT

Peradaban Aceh Selatan berkembang di seculi daratan landai di pantai barat Sumatera. Jalan raya yang bertengger di lereng bukit diklaim sebagai yang terpanjang di Indonesia. Di sepanjang jalan ini, peradaban manusia berkembang bersama Bukit Barisan dan Samudera Hindia.



AGUS PRIJONO



Mungkin inilah sebentuk jelajah Aceh Selatan dengan sentuhan syariah. Informasi aktivitas mitigasi konflik, upaya konservasi dan kekayaan hayati Koridor terpampang di Pusat Informasi (atas). Bermula dari basecamp, gajah-gajah mengajak jelajah hutan sambil berpatroli (kanan atas). Bumi Aceh Selatan yang gemah ripah menghasilkan berbagai buah-buahan tropis. Salah satunya, mangga dengan bermacam rasa dan varietas (kanan bawah).



Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat telah merancang rencana strategis yang memuat arah pengembangan ekowisata di Koridor. Bentang alam kawasan ini lebih cocok untuk wisata minat khusus: jelajah hutan, susur gua, sungai dan air terjun, panjat tebing dan pendakian.

Jelajah hutan bisa dengan berjalan kaki ataupun turut menunggangi gajah-gajah CRU. Melalui Koridor, para pendaki bisa menembus belantara Taman Nasional Gunung Leuser dari sisi selatan hingga puncak gunung 3.000 meter dari muka laut.

Meski tidak terlalu luas, Koridor memendam kekayaan hayati Aceh. Di tajuk-tajuk pohon, orangutan sumatera hidup tenang. Yayasan Leuser Internasional pernah menjumpai orangutan di sekitar basecamp CRU. Selain kera merah, beberapa primata hidup tenram di Koridor: kedih, siamang, kera ekor panjang dan beruk. “Beberapa jenis mamalia, seperti harimau dan primata, ada pergerakan dari utara ke selatan. Pergerakan burung bisa kita lihat pada pagi hari, dari utara ke selatan atau sebaliknya,” ungkap Abu.

Bagi pengamat burung, Koridor memang memberi kesempatan mengintip aneka spesies burung. Penguasa tajuk hutan, burung rangkong kerap melintasi basecamp. Burung-burung kutilang berkicau di pagi hari. “Kami juga baru menemukan burung trogon, warnanya indah,” ungkap Hera.

Anak-anak turun setelah menunggang galah jinak dari Sungai Naca ke basecamp CRU. Sore adalah waktu yang ditunggu anak-anak untuk menyapa, meraba dan menaiki gajah.



PAGI ITU, gajah dan mahout berbaris berjajar. Mereka memunggungi matahari pagi, menatap kamera. Entah berapa kali syuting dari stasiun televisi swasta dari Jakarta itu mesti diulang. Selalu saja ada yang kurang pas. Setiap diulang, tawa riang menyelimuti para mahout dan gajah.

Kehadiran mahout dan gajah telah menyemarakkan kawasan Koridor. Saat pagi dan sore, warga mendatangi kawasan ini: melihat gajah, bermain bola dan mengobrol. Dalam kehidupan sehari-hari, pengunjung dan anak-anak bercengkerama dengan gajah Tuah, Bayu, Siska dan Nanik. Sejumlah pengunjung turut tersenyum menyaksikan adegan itu.

Hari itu, suasana yang semarak memercikkan harapan bagi masa depan



Pengembangan ekowisata perlu pelan-pelan karena ada qanun syariah.

tim CRU Trumon. Liputan stasiun televisi dari Jakarta itu bukan yang pertama, dan tentu bukan yang terakhir.

Walaupun didominasi kawasan hutan, Aceh Selatan ini masih belum tersentuh pendidikan konservasi alam. Kawasan Koridor bisa menjadi wahana untuk pendidikan generasi muda Aceh Selatan dan sekitarnya. Abu menuturkan, semenjak dihuni para mahout dan gajah, Koridor semakin dilirik banyak pihak.

Basecamp CRU Trumon telah banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Anak-anak sekolah dari Aceh Selatan antusias dengan pendidikan lingkungan di Koridor. Mereka datang untuk menjelajahi kawasan ini secara berkelompok.

Antusiasme yang paling kentara adalah saat hari menjelang senja. Sebagian warga sekitar meriuung di kawasan ini: melihat gajah mandi, bermain bola, atau pun sekadar meriuung untuk melewati petang hari.

Meski pelan, kehadiran CRU Trumon telah membuka mata dan telinga masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam. Ini bagaikan secercah harapan di tengah gemuruhnya perombakan kawasan hutan di luar Koridor. Tim CRU Trumon telah menebar kedamaian di kampung-kampung. Kabar baik ini tersiar ke penjuru negeri melalui berbagai media. Kabar baik yang menegaskan bahwa CRU Trumon pantas tetap berkiprah di masa datang.***



INTERAKSI POSITIF

Keceriaan di Sungai Naca menyisipkan hikmah hubungan manusia dan gajah. Interaksi positif ini akan meninggalkan kesan mendalam bagi anak-anak yang menjadi generasi penerus. Kesan yang menentukan pandangan positif manusia terhadap gajah.



AGUS PRIJONO



WARTA GAJAH

Gajah, mahout, dan seorang pembawa acara berjajar menghadap kamera untuk acara televisi swasta nasional. Aktivitas CRU Trumon telah mengundang para pewarta ke Koridor Satwa. Informasi tentang upaya konservasi di daerah ini telah tersebar ke seluruh negeri.



AGUS PRIJONO

Teraju



SEKUTU SERU

Mahout dan gajah laksana pasangan hidup-semati. Tabiat gajah seringkali serupa dengan watak sang mahout. Keserasian kedua makhluk ini menciptakan kedamaian di wilayah rawan konflik di pesisir barat Aceh Selatan. Mekanisme pendanaan jangka panjang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan CRU Trumon.

Konservasi

Upaya pelestarian berada di antara benturan
kepentingan manusia dengan kehidupan alam liar.
Ikhtiar tiada henti untuk menjaga keseimbangan antara
konservasi dengan ekonomi.





TAMADUN RAWA GAMBUT

Jasa ekosistem rawa gambut menghidupi masyarakat di sepanjang Sungai Soraya. Kini, tanah-tanah gambut diperas airnya untuk ditanami sawit. Tanah miskin hara tapi kaya karbon itu dipaksa menjadi lahan budidaya. Benteng terakhir rawa gambut terdapat di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, yang terletak tidak jauh dari desa ini.



REGINA SAFRI

Kawasan konservasi selalu dalam tegangan dua sisi yang bertolak belakang: Dipenuhi cita-cita indah, lalu dilupakan. Berada di pelosok negeri, tapi bermanfaat global. Dipuja sekaligus diancam. Jasa lingkungannya berlimpah, namun tidak disyukuri.

Aura ketegangan itulah yang menyelimuti Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Kawasan ini memang bergelimang manfaat: memendam karbon, mengayomi satwa liar, benteng tsunami, memasok protein. Namun, pada saat yang sama suaka menanggung beban tiada terperi: dirambah dan dibalak.

Dalam situasi kritis itu, Yayasan Leuser Internasional dan Tropical Forest Conservation Action Sumatera melibatkan diri dalam upaya memulihkan kembali jatidiri suaka. “Tujuan utamanya adalah konservasi hutan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya, YLI menata batas suaka margasatwa dan mitigasi konflik gajah-manusia,” tutur Direktur TFCA Sumatera Samedи.

Rawa Singkil salah satu ekosistem gambut yang tersisa di Aceh, selain Kluet dan Rawa Tripa. Sayangnya, Rawa Tripa menjadi areal penggunaan lain dengan sejibun izin perkebunan sawit. (Di tengah

kepungan sawit, TFCA Sumatera bersama Yayasan Ekosistem Lestari menggelar berbagai aksi konservasi di Rawa Tripa. Aksi ini untuk menyelamatkan ekosistem Rawa Tripa.)

“Rawa Singkil kebetulan berstatus suaka margasatwa. Dari sisi manajemen jauh lebih mudah diselamatkan, sehingga ada penataan batas,” lanjut Samedи. “Problemlnya perambahan dan pembalakan liar, karena tidak jelas batas-batasnya. Kita tata batasnya agar kepastian hukum kawasan jelas, dan orang yang masuk tahu Rawa Singkil adalah suaka margasatwa.”

Penataan batas itu memang menerabas ketegangan: perambahan, pembalakan liar, jalur balak. Sementara itu, pemerintah Aceh Selatan menegah tata batas di areal yang berbatasan dengan lahan tukar guling PT Barumun Agro Sentosa. Untuk sementara waktu, tata batas di sempadan lahan tukar guling itu ditangguhkan.



Penataan batas hingga temu gelang sangat krusial untuk membentengi suaka dari serbuan manusia di masa datang. Tantangan nampaknya bakal makin berat seiring waktu: tekanan manusia terus menggempur. Ini peringatan yang tak biasa bagi pengelola Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Sungguh tidak pantas bila batas suaka telah ditata, namun pengelolaan suaka tak ada kemajuan di lapangan.

"Itu tantangan yang mesti kita hadapi, sehingga kita harus mengelola kawasan dengan aman dan pasti. Dan kita ingin tata batas sampai temu gelang," ungkap Samedi.

Untuk menghindari berlarutnya penyelesaian lahan tukar guling, Samedi menyarankan, "Kita tata batas lebih dahulu batas kawasan sesuai peta tahun 2000. Yang penting aman dulu. Jika tidak segera ditata batas, kita menduga ke depan keadaan bisa lebih buruk."

Hingga 2016, tim lapangan YLI akan menata batas sampai 170 kilometer dari total 233 kilometer batas kawasan. "Itu karena ada kasus tukar guling kawasan hutan yang belum final," timpal Nizar

Tarigan. Pada akhir penataan batas, YLI akan menggelar pertemuan bersama panitia tata batas di tiga kabupaten, Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Aceh, dan instansi terkait untuk membuat berita acara penetapan batas suaka. Nizar mengungkapkan, pada dokumen berita acara itu akan diberi catatan tentang belum adanya pemasangan pal batas di sekitar kawasan tukar guling.

Penataan batas kawasan sebenarnya tidak untuk meminggir suaka dari dunia sekelilingnya. Tata batas untuk meneguhkan kepastian hukum suaka, lalu dikelola secara layak. Pendek kata, suaka bukanlah kawasan yang steril laksana dunia asing di dalam botol kaca.



Kedamaian bukan keadaan yang stabil di daerah jelajah gajah.

Pemanfaatan bukan barang haram di kawasan konservasi. Namun pemanfaatan mensyaratkan kewajiban menjaga daya dukung ekosistem alami. Tata batas baru langkah awal menuju tata kelola yang memadai agar pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan menjadi padu.

Seiring tata batas kawasan, tata kelola suaka juga butuh pembenahan total. Sumber daya manusia dan sarana prasarana masih perlu ditingkatkan kapasitas dan mutunya.

Peliknya tata kelola Rawa Singkil tampak dalam rentang kendali pengelolaannya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam berada di Banda

Aceh, sementara Rawa Singkil berada di pesisir barat Aceh. Kantor setingkat seksi pengelolaan berada di Kota Subulussalam, yang dihuni oleh beberapa personel. "Akan sangat sulit untuk mengawasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang 100.000 hektar lebih," jelas Samedi.

Dia menuturkan tujuan ke depan adalah membangun pengelolaan yang baik di Rawa Singkil. "Tujuan kita menjadikan Rawa Singkil sebagai model pengelolaan yang baik di bidang konservasi." Niat ini seiring pembangunan kesatuan pengelolaan hutan konservasi sebagai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berbeda dengan taman nasional,



Perambahan dan pembalakan liar mengirim sinyal bahwa Rawa Singkil wajib diselamatkan secepatnya. Ini bukan peringatan biasa: Suaka Margasatwa Rawa Singkil benar-benar dalam status genting! Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Rawa Singkil mendesak didirikan dan segera berkiprah. Rawa Singkil seisinya tidak bisa menunggu lama.

pengembangan KPHK di suaka margasatwa, cagar alam maupun taman wisata alam mesti dimulai dari awal. Taman nasional telah dikelola oleh balai taman nasional, dengan pembagian wilayah kelola dari seksi hingga resor. Sementara di luar taman nasional, pengelolaan kawasan konservasi diemban Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Perbedaan ini penting dalam mengembangkan kesatuan pengelolaan hutan. "Taman nasional sudah jelas, baik untuk kawasan dan pengelolanya, namun untuk BKSDA memang masih seperti kertas putih," kata Samedi memaparkan. Artinya, pembangunan KPHK di luar taman nasional mesti mulai dari awal: organisasi, personel, hingga sarana dan

prasarana. Intinya, kesatuan pengelolaan hutan akan mendekatkan pengelola dengan suaka.

Momentum tata batas membuka harapan bagi Rawa Singkil untuk menjadi model KPHK. "Kita berharap Rawa Singkil menjadi model KPHK," imbuhnya.

Ketegangan lain yang membayangi upaya konservasi adalah konflik gajah dan manusia. Sengketa ini telah menggiring ikhtiar konservasi di batas tipis antara melestarikan gajah dengan nyawa manusia. Solusi yang adil dan beradab adalah mitigasi konflik gajah-manusia: Conservation Response Unit Trumon.

"CRU Trumon penting untuk mengatasi konflik manusia-gajah.

Ini kondisi umum di Sumatera. Kita ingin pusat penanggulangan konflik, seperti CRU, ada di daerah-daerah yang konfliknya tinggi,” ungkap Samedi.

Semenjak berdiri, CRU Trumon telah menebar kedamaian di Aceh Selatan dan Subulussalam. Pengetahuan dan kedewasaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi sengketa dengan gajah juga meningkat.

Namun kedamaian bukan keadaan yang stabil di daerah jelajah gajah. Di wilayah Kota Subulussalam tak jarang gajah masih turun ke permukiman. Penanggulangan konflik gajah-manusia mensyaratkan CRU Trumon tetap beroperasi. Dan itu menjadi perhatian bersama, YLI, TFCA Sumatera dan pemerintah daerah.

“Kita concern dengan keberlanjutan CRU, karena TFCA ada batasnya. TFCA hanya beberapa tahun, sementara CRU perlu dana yang terus-menerus. Kita tidak mungkin membantu dalam jangka panjang. Yang kita tekankan, bagaimana membangun keberlanjutan CRU,” jelas Samedi.

Dengan begitu, perlu mekanisme pendanaan yang melibatkan berbagai pihak, lembaga lokal, donor ataupun pemerintah. Meski terbatas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Selatan telah menyokong operasi CRU pada 2014 dengan dana Rp150 juta. Dinas telah menganggarkan dana bagi CRU antara 2013 -2017, yang baru terealisasi mulai 2014.

Pembalak liar dengan bebas membangun jalur ongakak untuk mengangkut kayu dari dalam suaka. Kayu-kayu yang keluar telah berbentuk papan, diangkut dengan kereta dorong ubahan. Sesampai di tepi Sungai Soraya, kayu liar dikirim ke berbagai daerah. Ada lusinan jalur ongakak di sepanjang Sungai Soraya.

Selain dengan pemerintah daerah, ungkap Samedi, bisa dengan mekanisme lain yang bisa mendatangkan pendapatan bagi CRU. “Seperti di Tangkahan, yang bersama mitra terkait, mengembangkan ekowisata.” Peluang lainnya: tanggung jawab sosial perusahaan kebun sawit. “Karena, kalau kita runut ke belakang, kebun sawit dahulu merupakan habitat gajah.”

Ide ini tak asing dalam pelestarian di luar kawasan konservasi. Di Sumatera dan Kalimantan, perusahaan sawit turut melestarikan orangutan, harimau ataupun spesies terancam lainnya. “Kita berharap peluang-peluang seperti itu bisa dikelola dengan mekanisme pendanaan,” harap Samedi.

Konservasi memang terkesan menuntut pengorbanan. Namun dari kesan egoistik itu, terslip makna sublim: konservasi sekadar meminta keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kehidupan liar.

Suaka Margasatwa Rawa Singkil ditunjuk-ditetapkan-dikukuhkan untuk melindungi sepetak tanah bagi kehidupan liar—selain manusia. Penetapan suaka margasatwa bukan tujuan, tapi cara, metode, untuk mengayomi kekayaan hayati bagi generasi mendatang.

Penataan batas kerap dinilai berimplikasi pada larangan kaku bagi pemanfaatan kawasan konservasi. Tema besarnya, akhirnya, kawasan konservasi versus manusia.

Padahal, tata batas baru ayunan



AGUS PRIJONO

Dari markas CRU Trumon, gajah dan mahout selalu siaga untuk menjaga perdamaian di daerah rawan konflik satwa-manusia.

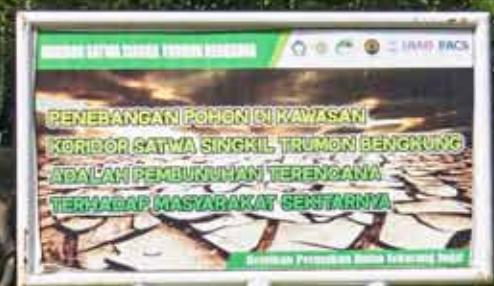
*Suaka margasatwa
bukan tujuan, tapi sekadar
cara mengayomi alam.*

pertama dalam pengelolaan suaka. Setelah itu, barulah penataan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan, kekayaan hayati Rawa Singkil. Tiga aspek itu: perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan mesti menyatu dan saling membatasi. Dengan demikian, sudah pasti tidak ada kebebasan bagi hasrat manusia di kawasan konservasi.

Di sisi lain, untuk memadamkan konflik gajah-manusia, tentu tidak mungkin memagari wilayah jelajah gajah di tanah manusia. Pemagaran lintasan satwa di lahan manusia pasti dipandang ide ganjil. Gajah tidak bisa menuntut manusia untuk menyediakan selarik jalur sebagai lintasan jelajahnya.

Contoh bagus adalah Koridor Satwa Trumon yang diniatkan untuk lintasan satwa liar. Semula, Koridor merupakan permukiman dan lahan pertanian warga Naca dan Ie Jernih. Pemerintah lantas membebaskan lahan Koridor. Tetapi tepat di tengah Koridor, melintang jalan poros Subulussalam – Tapaktuan, Aceh Selatan. Tantangan seolah tiada habisnya.

Upaya penataan batas suaka dan mitigasi konflik memang makin memperkeras benturan antara kepentingan manusia dengan kehidupan liar. Namun, sejatinya, kiprah Yayasan Leuser Internasional dan TFCA Sumatera itu untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi manusia dengan konservasi alam.***





PATROLI TIADA HENTI

Ditemani sang mahout, Nanik bersimpuh di hamparan pasir putih di pedalaman hutan Koridor Satwa Trumon. Selain menjadi lokasi patroli rutin, ‘pasir putih’ di tengah hutan ini merupakan situs yang memikat untuk jelajah Koridor. Kala air sungai mengalir, butiran pasir memutih cemerlang.



AGUS PRIJONO



HEBOH GAJAH

Setelah mandi di sungai, gajah-gajah jinak CRU Trumon membuat kehebohan sesaat menuju basecamp. Jalan raya ini membelah kawasan Koridor Satwa Trumon, yang menghubungkan Subulussalam dengan Tapak Tuan, Aceh Selatan.



AGUS PRIJONO

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2014. *Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia*. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Aceh Selatan. 2014. *Rencana Strategis Pengembangan Ekowisata Di Kawasan Koridor Satwa Singkil Trumon-Bengkung Kabupaten Aceh Selatan*. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Aceh Selatan, USAID, Indonesia Forest and Climate Support (IFACS).
- Onrizal, Erwin A Perbatakusuma, Nurdin Sulistiyono. 2009. *Kandungan Karbon Rawa Singkil dan Potensi Pengembangan Produk Jasa Lingkungan Di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam*. Kertas Kerja Seminar "Pengembangan Produksi Tanaman Bahan Bakar Nabati dan Perkebunan Sawit Berkelanjutan."
- Yayasan Leuser Internasional. 2013. *Laporan Final Fasilitasi Penyusunan Konsep Trayek Batas Kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil-Trumon*. Yayasan Leuser Internasional dan Tropical Forest Conservation Action-Sumatera.
- 2013b. *Laporan Final Survei Sumberdaya Alam di Kawasan SM Rawa Singkil-Trumon Untuk Mendukung Rencana Pengelolaan/Rencana Strategis SM Rawa Singkil*. Yayasan Leuser Internasional dan Tropical Forest Conservation Action Sumatera.
- 2014a. *Laporan Monitoring Kronologis Kematian Dua Ekor Gajah di Kebun Masyarakat di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan*. Yayasan Leuser Internasional dan Tropical Forest Conservation Action Sumatera.
- 2014b. *Rumusan dan Rekomendasi Hasil Workshop Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Koridor Satwa Trumon Menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai Upaya Pengelolaan Kawasan Konservasi Berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan*. Yayasan Leuser Internasional dan Tropical Forest Conservation Action Sumatera.
- 2014c. *Draft Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam Periode 2014 – 2023*. Yayasan Leuser Internasional.
- 2014d. *Ringkasan Kajian Ilmiah Peningkatan Status/Perubahan Fungsi Hutan Kawasan Koridor Satwa Singkil Bengkung, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, menjadi Kawasan Pelestarian Alam*. Yayasan Leuser Internasional.

Di Balik Pengisahan

Dari kebun sawit, perbatasan hutan Rawa Singkil hingga hutan Koridor Satwa Trumon pengisahan ini didampingi oleh sejawat Yayasan Leuser Internasional: Project Leader Abu Hanifah Lubis dan Koordinator Tata Batas Nizar Tarigan. Cerita dari punggung gajah jinak didampingi seluruh kru CRU Trumon dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Selatan Masrul. Diskusi perihal KPHK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Nurman Hakim dan Ali Djajono.

Dari pesisir barat Aceh, muncul pertanyaan buat bangsa ini: benarkah konservasi di Indonesia anak kandung peradaban? Konservasi yang sepenuhnya maujud sebagai usaha sadar manusia Indonesia untuk menyisihkan alam liar bagi masa depan.

Kiprah Yayasan Leuser Internasional baru sepenggal kisah pelestarian di 13 kawasan prioritas Tropical Forest Conservation Action Sumatera. Kiprah pertama: Yayasan Leuser Internasional terjun langsung menata batas kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Tata batas baru tahap awal untuk mengelola suaka yang bergelimang tanah gambut itu. Tata batas untuk menjamin kepastian hukum kawasan suaka, agar pengelolaannya mendapatkan legitimasi dari pihak-pihak terkait. Sebelum ditata batas, kepastian hukum sima selama 15 tahun lebih. Setelah penataan batas, tahap selanjutnya lebih menantang: tata kelola yang baik bagi Rawa Singkil. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Rawa Singkil sebagai kesatuan pengelolaan hutan konservasi.

Sementara itu, tepat di sudut utara suaka, di kawasan Koridor Satwa Trumon, YLI-TFCA Sumatera mendirikan unit juru damai konflik gajah-manusia. Namanya Conservation Response Unit Trumon. Tim CRU berada di garis depan dalam menyelesaikan dan mencegah konflik. Sebelum gajah jinak bersama mahoutnya hadir di Koridor Satwa Trumon, Aceh Selatan dan Subulussalam sering dilanda konflik gajah dengan manusia.

Dua kisah yang menyentil akal sehat perihal masa depan hutan di pulau yang saban tahun digulung asap ini. Konservasi menuntut daya tahan jangka panjang. Proyeksinya melampaui imajinasi hari ini: menyisihkan kebutuhan sesaat untuk kehidupan anak cucu. Sayangnya proyeksi konservasi sulit ditularkan kepada kebanyakan orang. Dengan demikian, upaya konservasi bagaikan saga umat manusia dalam mencegah kepunahan di muka Bumi.



TFCA-Sumatera

Administrator : Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)

Jl. Bangka VIII No.38 Pela Mampang

Jakarta 12720 - INDONESIA

Tel: +(62-21) 7199953; 719 9962

Fax: +(62-21) 719 6530

twitter: @tfcasumatera

e-mail: tfcasumatera@tfcasumatera.org

www.tfcasumatera.org

ISBN 979-979-3986-44-4

